

UNIVERSITAS INDONESIA

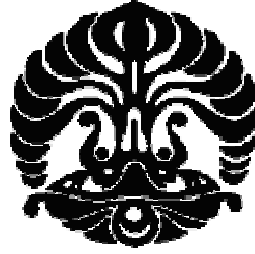
**ANALISA PENERAPAN E-PROCUREMENT
PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA BOGOR)**

SKRIPSI

ANIK PUJIATI

0706197912

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
DEPOK
JANUARI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA PENERAPAN E-PROCUREMENT
PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA BOGOR)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana**

ANIK PUJIATI

0706197912

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
DEPOK
JANUARI 2010**



UNIVERSITY OF INDONESIA

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION E-PROCUREMENT
IN LOCAL GOVERNMENT LEVEL II
(CASE STUDY IN BOGOR CITY GOVERNMENT)**

FINAL ASSIGNMENT

**ANIK PUJIATI
0706197912**

**FACULTY OF ENGINEERING
STUDY PROGRAM OF CIVIL ENGINEERING
DEPOK
JANUARY 2010**



UNIVERSITY OF INDONESIA

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION E-PROCUREMENT
IN LOCAL GOVERNMENT LEVEL II
(CASE STUDY IN BOGOR CITY GOVERNMENT)**

FINAL ASSIGNMENT

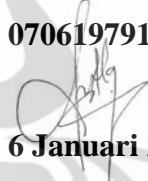
Made to Fulfill Part of Requirements Needed to Achieve Bachelor Degree

**ANIK PUJIATI
0706197912**

**FACULTY OF ENGINEERING
STUDY PROGRAM OF CIVIL ENGINEERING
DEPOK
JANUARY 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Anik Pujiati
NPM : 0706197912
Tanda Tangan : 
Tanggal : 6 Januari 2010

STATEMENT OF AUTHENTICITY

**This final assignment's made by own idea,
And I assure for all those sources that have been quoted or referred,
had written correctly.**

Name : Anik Pujiati
NPM : 0706197912
Signature : 
Date : 6th January 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Anik Pujiati
NPM : 0706197912
Program Studi : Teknik Sipil
Judul Skripsi : Analisa Penerapan *e-Procurement* Pada Pemerintah Daerah Tingkat II (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bogor)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Ir. Setyo Supriyadi S, M.Si



Pembimbing II : Ayomi Dita Rarasati, ST, MT



Penguji I : Dr. M. Ali Berawi, M.Eng. Sc, Phd



Penguji II : Alin Veronika, ST, MT



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Januari 2010

SHEET OF APPROVAL

The final assignment submitted by:

Name : Anik Pujiati
NPM : 0706197912
Study Program : Civil Engineering
Title : Analysis of Implementation *e-Procurement* In Local Government Level II (Case Study In Bogor City Government)

Has succeeded to be submitted in examiner board and accepted as partial fulfilment needed to obtain Bachelor Degree in Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Indonesia.

EXAMINER BOARD

Counsellor : Ir. Setyo Supriyadi S, M.Si



Counsellor : Ayomi Dita Rarasati, ST, MT



Examiner I : Dr. M. Ali Berawi, M.Eng. Sc, Phd



Examiner II : Alin Veronika, ST, MT



Decided in : Depok

Date : 13th January 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana teknik pada Program Studi Teknik Sipil, Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu terima kasih saya ucapkan kepada:

- 1) Orang tua dan keluarga saya, untuk dukungan, semangat dan do'a yang tak terputus;
- 2) Ir. Setyo Supriyadi, M.Si dan Ayomi Dita Rarasati, ST, MT selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
- 3) Dr. Mohammed Ali Berawi, Alin Veronika, ST, MT selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk menguji dalam ujian sidang skripsi ini;
- 4) Seluruh staf Bagian Pengendalian Program Pemerintah Kota Bogor atas bantuan dan pengertian kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini;
- 5) Segenap dosen pengajar dan karyawan Departemen Teknik Sipil Universitas Indonesia yang telah banyak membantu;
- 6) Sahabat, teman, dan suara-suara yang senantiasa memberikan semangat, doa dan canda tawa;
- 7) Teman-teman angkatan 2007 yang telah memberikan dukungan bantuan, semangat, dan gelak tawa .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun, penulis tetap berharap semoga skripsi ini bisa menjadi manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 6 Januari 2010



Anik Pujiati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anik Pujiati
NPM : 0706197912
Program Studi : Teknik Sipil
Departemen : Teknik Sipil
Fakultas : Teknik
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisa Penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Daerah Tingkat II (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bogor)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan bukan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 13 Januari 2010

Yang menyatakan



(Anik Pujiati)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL...	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS...	ii
HALAMAN PENGESAHAN...	iii
KATA PENGANTAR...	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH...	v
ABSTRAK...	vi
ABSTRACT...	vii
DAFTAR ISI...	viii
DAFTAR GAMBAR...	xii
DAFTAR TABEL...	xiii
DAFTAR DIAGRAM...	xv
DAFTAR RUMUS...	xvi
DAFTAR LAMPIRAN...	xvii
DAFTAR SINGKATAN...	xviii
DAFTAR ISTILAH...	xix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.2.1 Deskripsi Masalah	3
1.2.2 Signifikasi Masalah	4
1.2.3 Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Batasan Penelitian	5
1.5. Manfaat Dan Kontribusi	5
1.6. Keaslian Penelitian	6
2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian Electronic Procurement	10

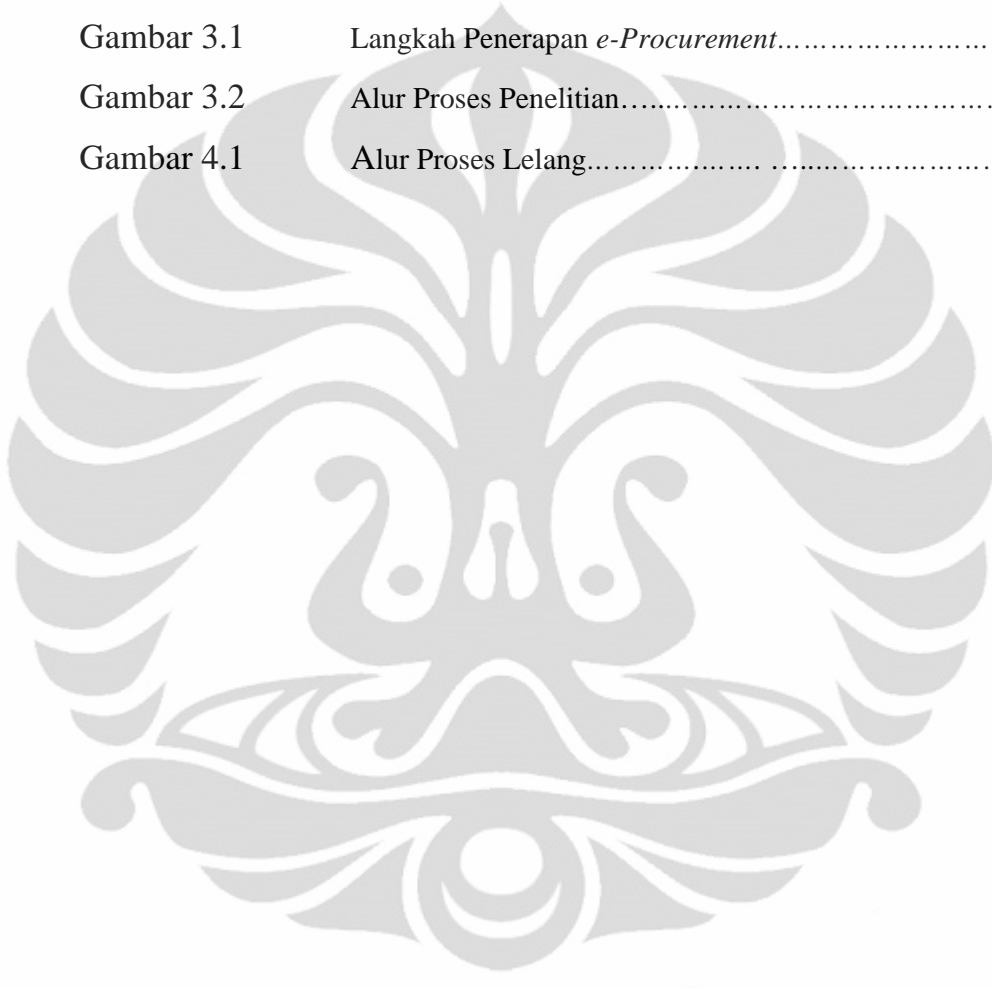
2.2. Aplikasi electronic Procurement atau e-Procurement	12
2.2.1 Dukungan Hardware, Software, Organware	12
2.3. Kebijakan Pemerintah Dalam Sistem Pengadaan Barang Jasa Elektronik 14	
2.3.1 Prinsip-Prinsip Dasar.....	14
2.3.2 Filosofi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.....	16
2.4. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	18
2.4.1 Tujuan e-Procurement	19
2.4.2 Keunggulan e-Procurement.....	20
2.4.3 Manfaat e-Procurement.....	21
2.4.4 Hambatan e-Procurement.....	28
2.5. Penerapan e-Procurement di Berbagai Negara	30
2.5.1 Indonesia	30
2.5.2 Australia	37
2.5.3 Singapura.....	39
2.5.4 Jepang.....	41
2.4. Critical Success Faktor	42
3. METODE PENELITIAN	45
3.1. Kerangka Pemikiran	45
3.2. Hipotesis	46
3.3. Pertanyaan Penelitian	47
3.4. Metode Penelitian	47
3.5. Kerangka Penelitian	48
3.5.1 Variabel Penelitian	52
3.5.2 Instrumen Penelitian.....	54
3.5.2.1 Format Wawancara Terhadap Narasumber.....	55
3.5.2.2 Format Kuisisioner Responden.....	56
3.5.2.3 Format Kuisisioner Validasi Pakar	57
3.5.3 Penentuan Sumber Data Penelitian	57
3.5.4 Pengumpulan Data Penelitian	57
3.6. Metode Analisis Data Penelitian	58
3.6.1 Uji Validitas	58

3.6.2 Analisis Komparatif	58
3.6.3 Analisis Statistik Deskriptif	59
3.7. Validasi Hasil Penelitian	59
4. HASIL PENELITIAN	60
4.1. Gambaran Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik (<i>e-Procurement</i>) Pada Pemerintah Kota Bogor	60
4.1.1 Dasar Pemikiran	61
4.1.2 Sasaran Penerapan.....	61
4.1.3 Landasan Hukum	62
4.1.4 Konsep dan Layanan	63
4.1.5 Sumberdaya.....	64
4.1.5.1 Sumber Daya Manusia	64
4.1.5.2 Infrastruktur Penunjang.....	65
4.1.6 Implementasi <i>e-Procurement</i> di Kota Bogor.....	65
4.1.7 Jumlah, Nilai dan Jumlah Pekerjaan	69
4.1.8 Kualifikasi Pekerjaan	70
4.2. Potensi Manfaat Dari Implementasi <i>e-Procurement</i> Pemerintah Kota Bogor	70
4.3. Faktor-Faktor Yang Menghambat dan Dapat Menyebabkan Kegagalan Dari Implementasi <i>e-Procurement</i> pada Pemerintah Kota Bogor	72
4.3.1 Data Responden.....	73
4.3.2 Jawaban Responden	76
4.3.3 Analisis Data Penelitian	78
4.3.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas	78
4.3.3.2 Analisis Komparatif	81
4.3.3.3 Analisis Statistik Deskriptif	81
4.4. Validasi Hasil Penelitian.....	86
4.4.1 Pendapat Pakar	87
5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	90
5.1. Analisis Penelitian	90

5.1.1 Manfaat Implementasi Penerapan e-Procurement Pada Pemerintah Kota Bogor.....	90
5.1.2 Faktor-Faktor yang Menghambat dan Dapat Menyebabkan Kegagalan dari Implementasi Penerapan e-Procurement di Pemerintah Kota Bogor	92
5.1.2.1 Pembahasan Penelitian.....	93
6. KESIMPULAN DAN SARAN	96
6.1. Kesimpulan	96
6.2. Saran	97
DAFTAR REFERENSI	99
LAMPIRAN	104

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1	Langkah Penerapan <i>e-Procurement</i>45
Gambar 3.2	Alur Proses Penelitian..... 52
Gambar 4.1	Alur Proses Lelang.....67



DAFTAR TABEL

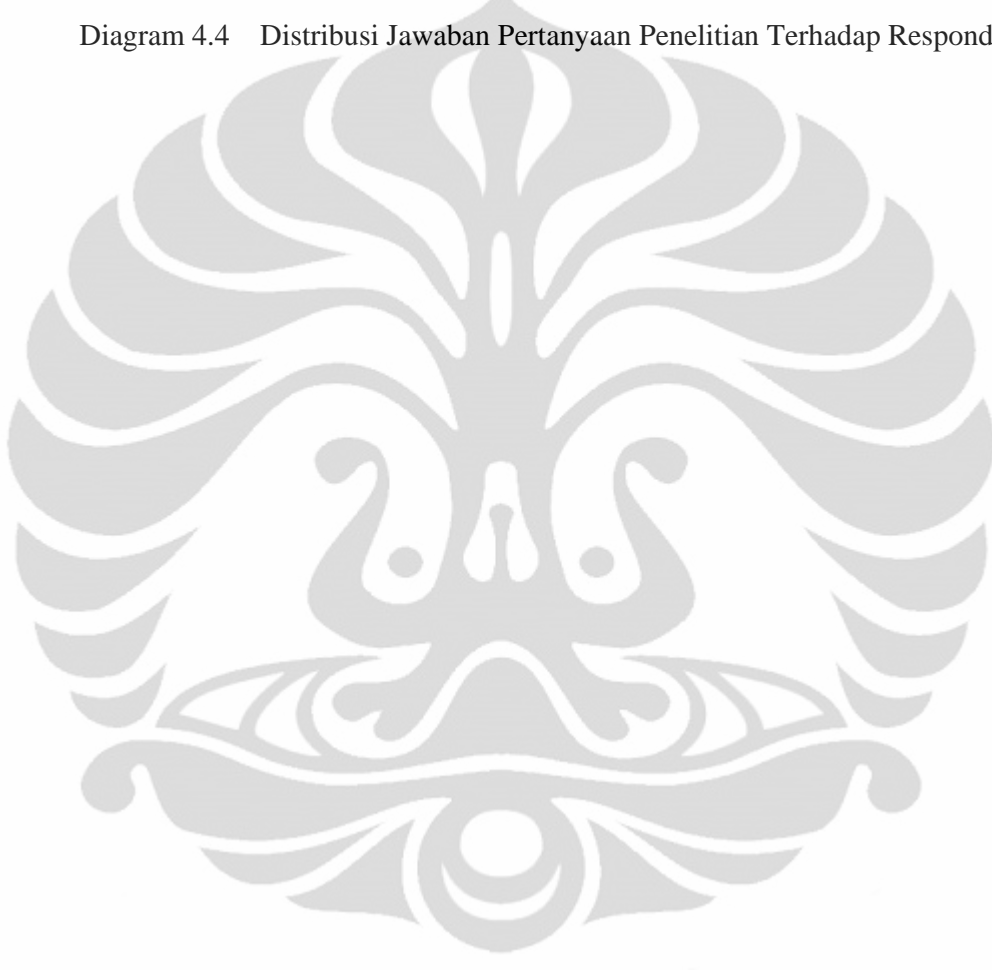
	Halaman
Tabel 2.1	Pengumuman pelelangan umum/terbatas pengadaan barang/ pemborongan/jasa menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003.....34
Tabel 2.2	Pengumuman Seleksi Umum/Seleksi Terbatas Untuk Jasa Konsultansi menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003.....35
Tabel 2.3	Outline Program Aksi CALS/EC.....41
Tabel 3.1	Variabel Penelitian.....53
Tabel 3.2	Form Wawancara Terhadap Narasumber.....56
Tabel 3.3	Format Kuisisioner56
Tabel 3.4	Format Validasi Kuisisioner Penelitian 57
Tabel 4.1	Jumlah Pekerjaan yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Bogor..... 69
Tabel 4.2	Nilai Pekerjaan yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Bogor..... 69
Tabel 4.3	Penyedia Barang/Jasa yang Berpartisipasi Dalam Pelaksanaan <i>e- Procurement</i> pada Pemerintah Kota Bogor 71
Tabel 4.4	Sebaran Daerah Asal Penyedia Barang/Jasa yang Berpartisipasi Dalam Pelaksanaan <i>e-Procurement</i> pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2007..... 71
Tabel 4.5	Sebaran Daerah Asal Penyedia Barang/Jasa yang Berpartisipasi Dalam Pelaksanaan <i>e-Procurement</i> pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2009..... 72
Tabel 4.6	Rekapitulasi Hasil Isian Kuisisioner Pertanyaan Penelitian..... 76
Tabel 4.7	Output Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> untuk hambatan internal 78
Tabel 4.8	Output Nilai <i>df</i> untuk hambatan internal 79
Tabel 4.9	Output Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> untuk hambatan internal 79
Tabel 4.10	Output Nilai <i>df</i> untuk hambatan eksternal..... 79
Tabel 4.11	Variabel Penelitian hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 80

Tabel 4.12	Output Nilai <i>Asymp. Sig</i>	81
Tabel 4.13	Rekapitulasi Hasil Penelitian.....	84
Tabel 4.14	Data Pakar Jasa Konstruksi Validasi Hasil Penelitian.....	87
Tabel 4.15	Validasi Hasil Penelitian	87



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1	Distribusi Unsur Responden.....	74
Diagram 4.2	Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	75
Diagram 4.3	Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja.....	75
Diagram 4.4	Distribusi Jawaban Pertanyaan Penelitian Terhadap Responden..	77



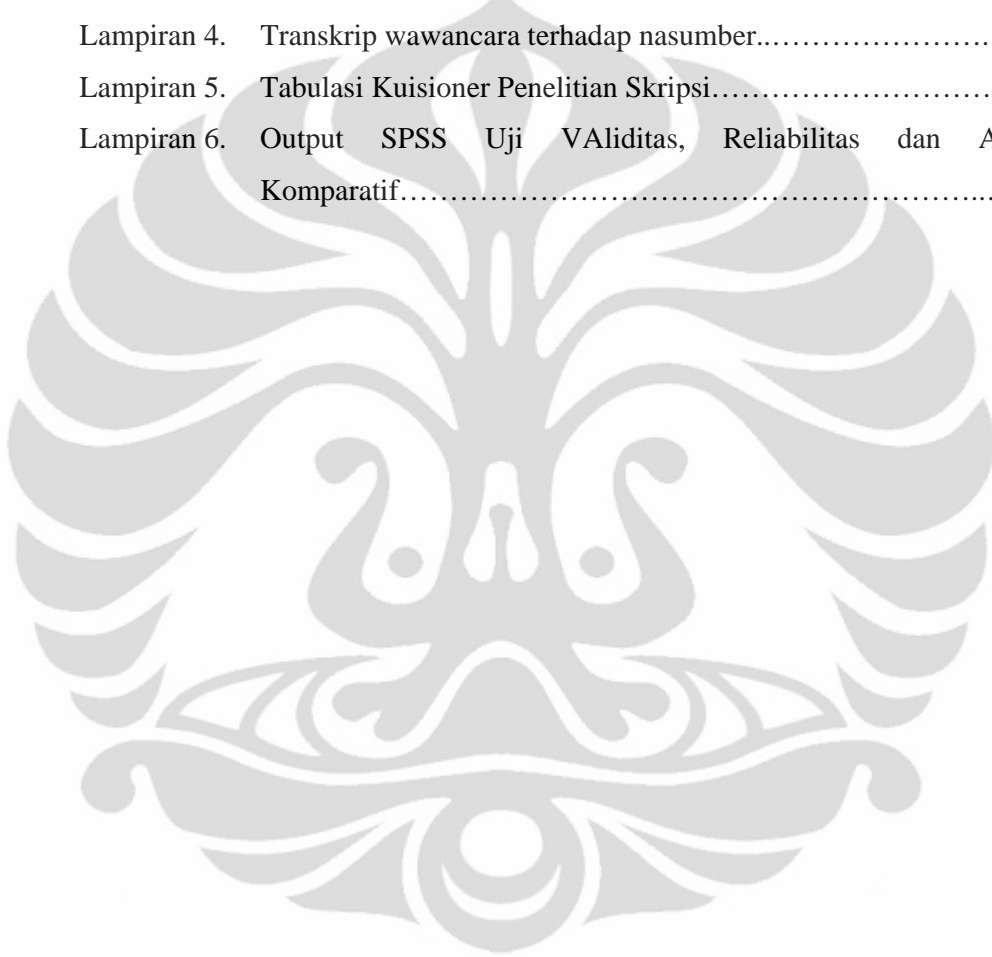
DAFTAR RUMUS

4.1	Rumus menghitung sampel.....	73
-----	------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Kuisisioner penelitian skripsi.....	103
Lampiran 2.	Kuisisioner validasi hasil penelitian	111
Lampiran 3.	Risalah skripsi sarjana.....	117
Lampiran 4.	Transkrip wawancara terhadap nasumber.....	121
Lampiran 5.	Tabulasi Kuisisioner Penelitian Skripsi.....	125
Lampiran 6.	Output SPSS Uji VALiditas, Reliabilitas dan Analisis Komparatif.....	127



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
AGIMO	Australian Government Information Management
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CD	Compact Disk
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
EDI	Electronic Data Interchange
ERP	Enterprise Resource Planning
e-GP	Electronic Government Procurement
e-Procurement	Electronic Procurement
IKP	Infrastruktur Kunci Publik
ISO	International Standard Operation
IT	Information Technology
Keppres	Keputusan Presiden
KKN	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
SDM	Sumber Daya Manusia
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPSS	Statistic Program for Social Science

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Keterangan
Aanwijzing	Penjelasan lelang
Availability system	Ketersediaan, keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan
Bandwith	Ukuran yang diberikan ISP, seberapa lebar spektrum yang dihantarkan sesuai dengan lebarnya jalur komunikasi, untuk menampung kapasitas data.
Budget	Penyusunan anggaran
Bottleneck	Istilah yang digunakan untuk menyebut gangguan yang terjadi apabila piranti keluaran (output) tidak dapat mengimbangi kinerja piranti pemrosesan sehingga memperlambat kerja sistem secara keseluruhan
Confidentiality	Pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi
Customer	Pembeli
Database	Pangkalan data, basis data
Download	Menyalin data dari server secara remote. Mengambil file atau mentransfer file dari satu komputer ke komputer lainnya
e-announcement	Pengumuman secara elektronik
e-Budgeting	Penyusunan anggaran secara elektronik
e-Contracting	Kontrak secara elektronik
e-Delivery	Pengiriman secara elektronik
e-Government	istilah yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan yang dibantu melalui media teknologi informasi dan komunikasi

DAFTAR ISTILAH

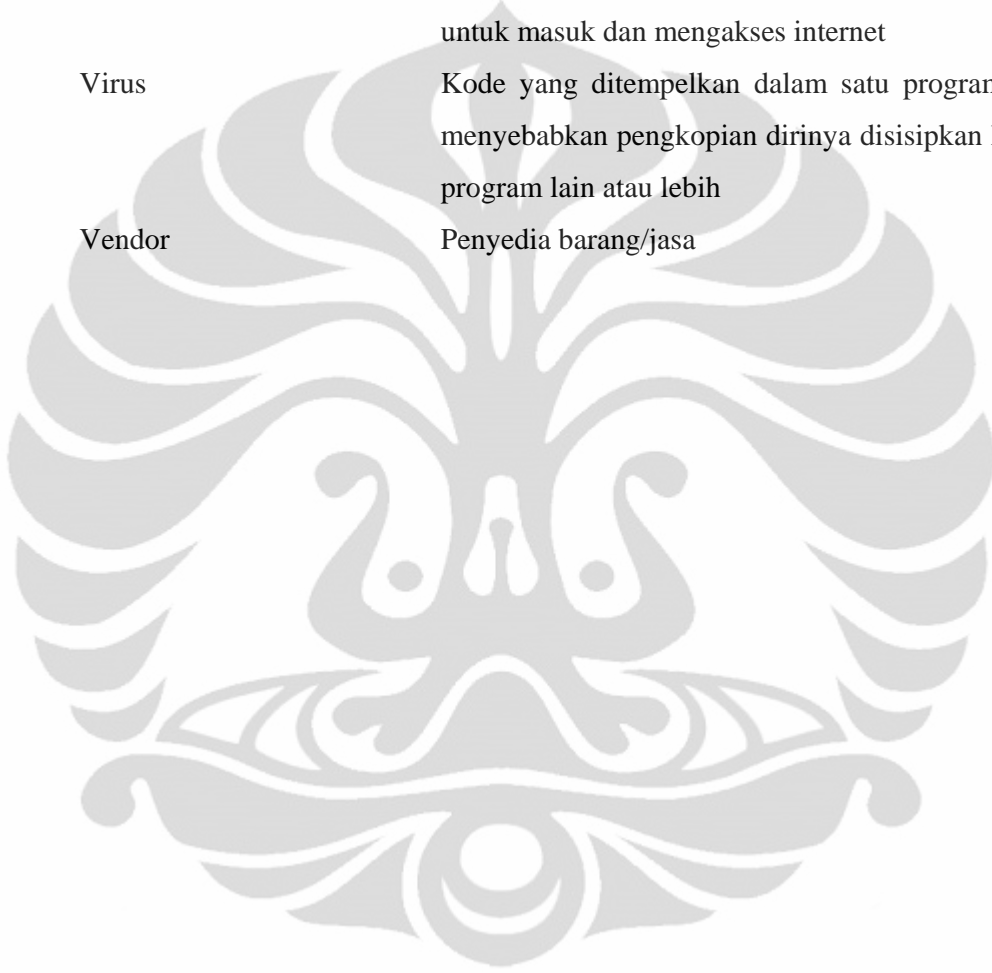
Istilah	Keterangan
e-Project	Pelaksanaan pekerjaan secara elektronik
e-Procurement	Pengadaan barang dan jasa secara elektronik
e-Performance	Hasil kerja yang dapat dicapai melalui system elektronik
e-Registrasi	Pendaftaran secara elektronik
Hacker	Mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya
Hardcopy	Hasil cetakan dari tulisan(kata, angka, karakter khusus, dan simbol-simbol lain) serta image (grafik atau gambar) pada media hard(keras) seperti kertas, atau film
Hardware	Perangkat keras
Integrity	Integritas, kejujuran, ketangguhan, bobot. Keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi.
Interface	Penghubung antara dua sistem atau alat
Link	Terhubungnya suatu objek dengan objek lain. Misalnya dalam jaringan, ataupun antar program.
Login	Proses memasuki sistem, proses ini disebut juga dengan otentifikasi pemakai (user authentication).
Network	Jaringan antar komputer yang menghubungkan satu komputer dengan jaringan lainnya
Organware	Manajemen organisasi

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Keterangan
On line	Sedang menggunakan jaringan. Terhubung dalam jaringan. Satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.
Paperless	Pengurangan penggunaan kertas
Password	Suatu bentuk dari data otentikasi rahasia yang digunakan untuk mengontrol akses ke dalam suatu sumber informasi
Passphrase	Password yang digunakan ketika akan memasukkan penawaran
Payment	Pembayaran
Register	Memori yang sangat cepat dalam transfer datanya, bertugas membantu operasi yang dilakukan pemroses, terutama sebagai tempat operan-operan
Reliability	Keandalan suatu sistem untuk tetap dapat berkomunikasi meskipun ada simpul yang terganggu
Situs web	Adalah halaman di internet yang menyediakan informasi. Alamat dari website ini biasanya ditunjukkan berdasarkan URL-nya.
Software	Perangkat lunak
Supplier	Penyedia barang
Upload	Mengirim file dari komputer Anda ke komputer lain. Kegiatan pengiriman data (berupa file) dari komputer lokal ke komputer lainnya yang terhubung dalam sebuah network
User	Pengguna. Biasanya ditujukan kepada pengguna suatu sistem yang umumnya adalah manusia. Misalnya pengguna komputer.

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Keterangan
User-friendly User id	Bagaimana suatu sistem dapat memberikan service Serangkaian huruf yang merupakan tanda pengenal untuk masuk dan mengakses internet
Virus	Kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengkopian dirinya disisipkan ke satu program lain atau lebih
Vendor	Penyedia barang/jasa



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dimaklumi, untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah diperlukan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yang baik dan handal. Untuk itu, maka perlu diperkenalkan sistem pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement*. Dengan mengimplementasikan sistem ini, maka dapat dimungkinkan adanya efisiensi sekurang-kurangnya 30% dalam belanja (Loetan, 2008).

Pada prinsipnya *e-Procurement* merupakan sistem pengadaan atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Sistem tersebut selain mengefisienkan proses pengadaan barang dan jasa juga merupakan cara yang efektif dan transparan serta bisa memangkas biaya secara signifikan, dibandingkan dengan sistem lama. Hal itu sesuai dengan pernyataan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dimana 70 persen dari total kasus yang ditanganinya berasal dari korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa (Nuryanto, 2008). Pada prinsipnya embrio sistem *e-Procurement* adalah Keppres No 80 Tahun 2003. Keppres tersebut menggariskan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN dan APBD dengan menggunakan teknologi informasi, terbuka, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif. Prosedur *e-Procurement* yang belum termuat dalam Keppres kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006.

Berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, proses pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, dan mulai menggunakan *e-Procurement*.

Penggunaan *e-Procurement* pada dasarnya akan (Patriastomo, 2008):

- a) Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Siapapun dapat melihat proses pengadaan yang dilakukan, sehingga masyarakat luas dapat ikut mengawasi proses pengadaan yang dilakukan oleh suatu instansi. *E-Procurement* akan menjadi alat dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat pada proses pengadaan barang/jasa sehingga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan yang biasanya mengindikasikan pula terjadinya korupsi dan kolusi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Masyarakat dapat mengetahui perusahaan yang memenangkan lelang di suatu instansi beserta harga penawarannya termasuk mengetahui jumlah dan perusahaan yang mengikuti lelang.
- b) Meningkatkan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha untuk mendapatkan kontrak dengan Pemerintah. Hambatan-hambatan bagi pelaku usaha dapat diminimalkan sehingga seluruh pelaku usaha yang benar-benar merupakan pelaku usaha akan mendapat akses yang sama untuk mengajukan penawaran. Dengan *e-Procurement*, kelompok-kelompok pelaku usaha berkurang peluangnya untuk melakukan arisan lelang.
- c) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Selama ini, sebagian pengelola pengadaan mengeluhkan rumitnya proses pengadaan karena harus berhadapan dengan pelaku usaha yang tidak profesional. Sanggahan dan pengaduan menjadi menu harian yang melelahkan. Seringkali proses lelang belum selesai, tetapi pengaduan adanya KKN sudah sampai ke Kepolisian. Sanggahan seringkali keluar dari konteks sanggahan. *E-Procurement* akan sedikit banyak membantu sebagian proses interaksi dengan peserta lelang. Proses pengumuman sampai dengan pembukaan penawaran akan dilakukan oleh sistem. Setelah pemenang lelang diperoleh berdasarkan evaluasi panitia, sistem akan mengumumkan hasil lelang.

Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai instansi Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana yang diamanatkan dalam Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pemerintah Kota Bogor sebagai instansi publik yang menangani pengadaan barang/jasa merupakan salah satu pelopor penggunaan *e-Procurement* di Provinsi Jawa Barat, sehingga sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan *e-Procurement* pada daerah tingkat II ini. Selain itu penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor juga mendapat apresiasi yang sangat baik, hal ini terbukti dengan diraihnya juara ketiga dalam kompetisi *e-Government* dalam tingkat nasional (Wartaegov, 2009).

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Pelelangan jasa konstruksi pada proyek Pemerintah di Kota Bogor diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor, yang mengacu pada Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Petunjuk pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada Pemerintah Kota Bogor diatur secara teknis dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Dengan Sistem *e-Procurement*.

Penerapan sistem *e-Procurement* di Kota Bogor memiliki peran penting di dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam sistem ini memuat pelaksanaan pengadaan barang jasa bidang konstruksi dan lainnya yang bernilai lebih dari 100 (seratus) juta rupiah. Pengadaan barang/jasa ini tidak hanya diikuti oleh penyedia jasa dalam lingkup wilayah Kota Bogor, sehingga akan lebih meningkatkan kualitas pemenang lelang.

Pemerintah Kota Bogor sebagai salah satu Daerah Tingkat II yang menerapkan *e-Procurement* masih dalam tahap pengembangan dalam pelaksanaannya untuk menuju konsep *full procurement*.

1.2.2 Signifikansi Masalah

Penerapan *e-Procurement* di tingkat Pemerintah Kota Bogor Jawa Barat ternyata masih terkendala oleh berbagai faktor (Yudiatna, 2008). Terlihat sistem belum bisa berjalan secara optimal dan masih ada kelemahan yang jika dibiarkan justru bisa menjadi media kolusi gaya baru serta menimbulkan modus kecurangan lainnya. Untuk itulah pentingnya dilakukan evaluasi terus menerus terhadap sistem *e-Procurement* untuk menutup lubang-lubang kelemahan tersebut. Sehingga eksistensi *e-Procurement* benar-benar sesuai dengan harapan rakyat. Selain itu Pemerintah Kota dalam waktu dekat harus mampu mengintegrasikan sistem *e-Procurement* dalam sistem *e-Government* yang utuh guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian terwujudlah efektifitas, keterpaduan, dan kejujuran dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan atau proyek. Sistem *e-Procurement* merupakan tahap ketiga dari tata kelola kegiatan atau proyek yang mestinya harus terpadu dengan sistem sebelumnya yakni *e-Budgeting* dan *e-Project* (Nuryanto, 2008). Juga cocok dengan sistem berikutnya yakni *e-Delivery*, *e-Contracting* dan *e-Performance*.

1.2.3 Rumusan Masalah

Perkembangan teknologi informasi terutama internet berjalan sangat pesat, tidak terkecuali di Indonesia. *e-Procurement* sebagai salah satu denyut nadi perekonomian yang sangat vital, dapat pula memanfaatkan teknologi ini sebagai sarana pendukungnya.

Penulisan ini, akan membahas tentang sejauh apa penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa serta hambatan yang dihadapi. Tinjauan penelitian akan dilakukan terhadap pelaksanaan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu:

- a) Bagaimana pelaksanaan pelelangan secara elektronik (*e-Procurement*) di Pemerintah Kota Bogor.
- b) Manfaat apa yang diperoleh dari pelaksanaan pelelangan secara elektronik (*e-Procurement*) di Pemerintah Kota Bogor.

- c) Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan pelelangan secara elektronik (*e-Procurement*) di Pemerintah Kota Bogor.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Memberikan gambaran pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-Procurement*) di Pemerintah Kota Bogor.
- b) Mengidentifikasi dan menganalisis potensi manfaat apa saja yang diperoleh dari implementasi *e - Procurement* di Pemerintah Kota Bogor.
- c) Menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan dapat menyebabkan kegagalan dari implementasi *e - Procurement* di Pemerintah Kota Bogor.

1.4 Batasan Penelitian

Dengan banyaknya tinjauan yang dapat dibahas dalam penelitian pada pelelangan elektronik (*e-Procurement*) ini, maka pada penelitian ini Penulis memberi batasan pada :

- a) Sudut pandang yang diambil adalah pelaksanaan pada pelelangan elektronik (*e-Procurement*) dari perspektif pengguna jasa dan pihak yang terkait pada pelaksanaan pelelangan secara elektronik yaitu panitia lelang, dan tim *e-Procurement* .
- b) Sampel Pelaksanaan *e-Procurement* yang dilakukan pada tahun anggaran 2007-2009
- c) Model sistem yang dipakai adalah *Government to Business*.

1.5 Manfaat Dan Kontribusi

Adapun manfaat dan kontribusi dari penelitian ini yaitu kepada:

- a) Untuk Pemerintah Kota Bogor, sebagai penentu kebijakan pelaksanaan *e-Procurement*, agar menjadi acuan ke depan dalam pelaksanaan pelelangan yang lebih baik di Pemerintah Kota Bogor.

- b) Untuk akademisi FT UI, memberikan informasi tentang pelaksanaan *e-Procurement* dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa pada proyek pemerintah di Kota Bogor .
- c) Penyedia jasa, sebagai acuan informasi dalam mempersiapkan perusahaan ketika akan mengikuti pelelangan elektronik (*e-Procurement*).
- d) Memberikan informasi kepada masyarakat dunia konstruksi, mengenai pelaksanaan proses lelang jasa konstruksi pada proyek Pemerintah Kota Bogor.
- e) Menambah pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan proses pelelangan barang/jasa konstruksi pada proyek Pemerintah Kota Bogor.

1.6 Keaslian Penelitian

Sebagai kerangka berpikir awal dan untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang berhubungan dan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian tersebut, baik yang dilakukan di Indonesia maupun penelitian di luar negeri yang telah ditetapkan dan dipergunakan dalam pelaksanaan *e-Procurement*. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

- a) Gokmauli, Florence. (2008) *Kajian kelayakan pelaksanaan sistem lelang elektronik (e-procurement) pada instansi pemerintah ditinjau dari prasyarat pelaksanaan*, Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yang berisi tentang hasil studi dalam mengenali karakteristik prasyarat pelaksanaan yang ada saat ini di Departemen Pekerjaan Umum yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai kajian kelayakan pelaksanaan sistem lelang elektronik yang diadakan. Sudut pandang yang diambil adalah dari sudut pandang penyedia jasa. Proses yang dilakukan adalah pengumpulan data-data lewat penelusuran dokumen lelang, wawancara dan penyebaran kuesioner guna mengetahui karakteristik prasyarat pelaksanaannya. Dari hasil proses tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat

evaluatif. Saat ini di Departemen Pekerjaan Umum, sistem lelang elektronik belum dapat dilaksanakan optimal karena belum dipenuhinya 3 (tiga) prasyarat pelaksanaan yaitu : hukum, manajemen dan teknis.

- b) Muharami Fitria, Andriani. (2006) *Manfaat penerapan electronic procurement rekayasa online (EPRO) pada pelaksanaan proyek kontruksi (studi kasus PT: X)*, Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yang berisi manfaat yang didapat dari penerapan EPRO adalah meningkatkan efisiensi pelaksanaan proses pengadaan di PT Rekayasa Industri, termasuk dalam hal meminimalkan waktu pelaksanaan, mengurangi biaya operasional dan peningkatan manajemen informasi ke seluruh area pembelian. Sedangkan hambatan yang paling utama dalam penerapan EPRO adalah sangat bergantungnya sistem EPRO kepada jaringan infrastruktur teknologi informasi yang dapat mengakibatkan kinerja karyawan akan terganggu apabila sistem down.
- c) Moon, M Jae. (2005), *e-procurement management in state government : Diffusion of e-Procurement practices and its determinants*, Journal of public procurement, yang berisi tentang penelitian mengenai penerapan *e-procurement* yang sudah mencakup elemen pesyaratan namun pemerintah belum menyiapkan implementasi secara *full* seperti penawaran lewat internet dan tandatangan digital. Selain itu Pemerintah harus menghadapi berbagai tantangan teknis dan managerial saat mulai menerapkan *e-procurement*. Yang harus diperhatikan adalah mengenai manfaat dari *e-procurement* itu sendiri bagi pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah yang sudah menerapkan sistem ini tidak boleh menggunakannya untuk aktivitas pengadaan. Tantangan yang riil untuk pemerintah mengenai *e-procurement* bukan secara teknis, tetapi lebih kepada arah manajerial dan organisasi
- d) G Reddick, Christopher. (2004) *The Growth Of E-Procurement In American State Governments: A Model And Empirical Evidence*,

Journal of Public e-procurement, yang berisi tentang penelitian perkembangan *e-Procurement* di Pemerintah Amerika Serikat. Secara rinci, *e-Procurement* diuji dengan data dari suatu survei nasional dari pegawai pengadaan. Bagian pertama dari artikel ini menunjukkan suatu model pertumbuhan *e-Government* sebagai cara untuk memperagakan pengembangan *e-Procurement*. Bagian yang kedua menguji literatur yang ada atas pengembangan dan tantangan berhubungan dengan implementasi *e-Procurement*. Bagian yang ketiga membangun suatu *e-Procurement index*, yang mana mengukur adopsi tingkat pengadaan elektronik yang menyangkut setiap negara itu. *E-Procurement index* ini diuji melawan terhadap manajemen, organisatoris, dan variabel pengamat ekonomi

- e) Dooley, Ken., & Purchase, Sharon., (2006) *Factors Influencing E-Procurement Usage*, Journal of Public e-procurement, yang berisi tentang penelitian mengenai faktor-faktor positif yang mempengaruhi *e-Procurement* di dalam organisasi *semi-Government*. Faktor utama yang mempengaruhi penggunaan *e-Procurement* dalam organisasi *semi-government* dalam studi ini adalah keberadaan dari faktor ini adalah digunakannya oleh organisasi penyalur atau oleh organisasi pembeli melalui fasilitas *e-Procurement*.
- f) Vaidya, Kishor., A S M Sajejev., Callender, Guy., (2006) *Critical Factors That Influence E-Procurement Implementation Success In The Public Sector*, Journal of Public Procurement, yang berisi tentang hasil pengembangan dari suatu survei literatur untuk mendukung suatu model yang menyangkut *Critical Success Factor* (CSFs). Penelitian ini juga meneliti pentingnya perbedaan CSFs dan faktor manajemen serta organisasi sebagai kategori yang paling utama untuk menentukan kesuksesan prakarsa *e-Procurement*. Jika prakarsa *e-Procurement* di dalam sektor publik akan membantu pengembangan *e-Procurement* dalam ekonomi informasi, maka harus ada penelitian lebih lanjut mengenai CSFs dan bagaimana prestasi kesuksesan dapat diperkirakan

g) Roche, Jeremy ,2001, *Are you ready for e-procurement*, artikel, yang berisi tentang keuntungan dari penggunaan sistem *e-procurement* yaitu:

- Dapat menggabungkan dua sistem yaitu keuangan dan pembelian tanpa memerlukan pertukaran data elektronik.
- Manajemen pembelian dan penjualan keduanya dapat mengidentifikasi kecenderungan permasalahan.
- Siklus pembelian lebih pendek sehingga memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan barang yang sedikit namun persediaan selalu tersedia.
- Mempersatukan penyalur dan pelanggan dalam suatu jaringan dan menciptakan suatu hubungan yang dapat mengefektifkan proses yang memerlukan banyak tenaga.

Dari tinjauan pustaka di atas dapat diketahui 3 syarat utama dapat dilaksanakannya *e-Procurement* adalah aspek hukum, manajemen dan teknis yang dalam penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Selain itu belum adanya penelitian mengenai penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Daerah Tingkat II mendorong penulis mencoba untuk melakukan hal yang berbeda dengan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan *e-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota Bogor. Dalam hal ini studi kasus dilakukan pada proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Pemerintah Daerah Kota Bogor.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian *Electronic Procurement*

Beberapa definisi *e-Procurement* dari berbagai sumber yaitu: menurut Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Australia (Australian Government Information Management, AGIMO) : *e-Procurement* merupakan pembelian antar bisnis (*business to business*) dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Menurut daftar kata X-Solutions, *e-Procurement* merupakan sebuah istilah dari pengadaan (*procurement*) atau pembelian secara elektronik. *e-Procurement* merupakan bagian dari e-bisnis dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan. *e-Procurement* tidak hanya terkait dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Karena proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan dengan strategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut. Tugas-tugas baru yang berhubungan dengan strategi pembelian ini meliputi manajemen kontrak kepada pemasok lama maupun baru serta penciptaan struktur pasar baru dengan secara aktif mengkonsolidasikan sisi pemasokan/suplai. Sedangkan *procurement system* adalah sistem perangkat lunak untuk pembelian secara elektronik, yaitu pengadaan barang dan jasa. Menurut daftar kata Siemens, *e-Procurement* atau *e-purchasing* adalah pengadaan yang menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer yang lain. Sistem e-procurement memusatkan pada platform (perangkat keras maupun lunak) komersial bagi para pembeli. Menurut Wikipedia, *e-Procurement* adalah pembelian *business to business* dan penjualan barang dan jasa melalui internet maupun sistem-sistem informasi dan jaringan lain, seperti *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Enterprise Resource Planning* (ERP). Sebagai sebuah bagian penting dari banyak situs *business to business*, *e-Procurement* juga kadang disebutkan oleh istilah-istilah lain misalnya *supplier exchange*. Secara khusus, situs-situs web *e-Procurement* memungkinkan *user* yang memenuhi

syarat dan terdaftar untuk mencari para pembeli atau penjual barang dan jasa. Tergantung pada pendekatannya, para pembeli atau penjual dapat menentukan harga atau mengajukan tawaran. Transaksi-transaksi dapat dimulai dan diakhiri. Pembelian yang sedang berjalan dapat memenuhi permintaan customer untuk diskon jumlah atau penawaran khusus. *Software e-Procurement* memungkinkan otomatisasi beberapa pembelian dan penjualan. Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi berharap dapat mengendalikan inventori-inventori secara lebih efektif, mengurangi biaya pembelian agen, dan meningkatkan siklus manufaktur. *e-Procurement* diharapkan dapat diintegrasikan dengan tren *Supply Chain Management* yang terkomputerisasi. Menurut Scottish Enterprise dalam *E-Business Factsheet*-nya menyebut bahwa *e-Procurement* adalah sebuah istilah untuk menyebut metode elektronik yang digunakan dalam tiap tahap proses pembelian dari indentifikasi persyaratan-persyaratan hingga pembayaran, dan secara potensial manajemen kontrak Menurut Infonet dalam makalahnya tentang *e-Procurement* menyebutkan bahwa *e-Procurement* adalah nama lain untuk pembelian barang dan jasa *business to business* melalui pertukaran dagang extranet, antar ERP langsung, dan koneksi internet dengan pemasok-pemasok. Beberapa definisi oleh Davila, Tony, Mahendra Gupta, dan Richard Palmer dalam jurnal "Moving Procurement Systems to The Internet" (2003) menyebutkan e-procurement adalah :

- a) teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet.
- b) Manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik.
- c) Aspek-aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.

Bank Dunia menyebutkan sebuah definisi berlapis tiga dari *e-Procurement* dari segi pemerintahan (*e-GP*) *electronic Government Procurement* (World Bank Draft Strategy, 2003). Tingkat pertama menyatakan bahwa e-GP adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik. Definisi tingkat kedua dan ketiga membuat

perbedaan tipis antara e-tendering dengan e-purchasing. *e-Procurement* sebagai seperangkat teknologi, prosedur, dan langkah-langkah organisasional yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online, melalui peluang-peluang yang ditawarkan oleh internet dan *e-commerce* (Sarzana Fulvio, 2003). Pengertian ini mirip dengan definisi Bank Dunia tetapi menghilangkan “pengadaan karya”. Fitur *e-Procurement* Pembelian dan penjualan online mengefisienkan proses pengadaan dan mengurangi biaya operasi dengan mengurangi pengeluaran untuk waktu administrasi dan memperpendek birokrasi.

2.2 Aplikasi *electronic Procurement* atau *e-Procurement*

Aplikasi *electronic Procurement* atau *e-Procurement* adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mengelola pengadaan barang/ jasa berbasis internet yang didisain untuk mencapai suatu proses pengadaan barang/ jasa yang efektif, efisien dan terintegrasi. Salah satu penerapan kemajuan teknologi telematika dalam mendukung proses bisnis adalah dalam proses pengadaan barang/ jasa, sehingga proses tersebut akan lebih transparan, efektif dan efisien. Pemanfaatan *e-Procurement* menjadikan proses pengadaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah/ Perusahaan.

2.2.1 Dukungan Hardware, Software, Network, Organware

e-Procurement sebagai suatu sistem informasi merupakan sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi dan jaringan) dan manusia untuk menghasilkan informasi (Setiadi, 2009). Sehingga dalam membangun suatu sistem informasi *e-Procurement* sedapat mungkin menggunakan metode Siklus Hidup Pengembangan Sistem atau *System Development Life Cycle (SDLC)*. Siklus itu dalam aplikasi *e-Procurement* terdiri dari sejumlah tahapan yang dilaksanakan secara berurutan. Pengembangan siklus itu berupa SDLC Model. Berupa metodologi yang didasarkan pada beberapa aktifitas penting yang meliputi : *System/Information Engineering and Modeling*,

Software Requirements Analysis antar muka aplikasi (*interfacing*), *System Analysis and Design*, *code Generation*, *Testing and Maitance*.

Pada prinsipnya sistem aplikasi *e-Procurement* merupakan integrasi modul-modul aplikasi yang saling terkait satu dengan lainnya untuk membentuk aplikasi yang utuh dengan fungsi utama mengaplikasikan konsep *e-Procurement*. Sistem aplikasi itu sebaiknya dikenakan audit, standarisasi dan tata kelola yang kokoh. Audit itu menyangkut efektifitas, efisiensi, *availability system*, *reliability*, *confidentiality*, dan *integrity*, serta *aspek security*. Tahapan-tahapan dalam audit sistem *e-Procurement* pada prinsipnya sama dengan audit teknologi informasi pada umumnya. Dalam pelaksanaannya, auditor sistem *e-Procurement* mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik. Dalam proses pengumpulan bukti ini ada beberapa cara yang sering dipakai yaitu, *audit around computer*, *audit trough comuter* dan *audit with computer*. Jika tingkat pemakaian sistem *e-Procurement* tinggi maka audit yang dominan digunakan adalah audit *with computer* atau biasa disebut dengan teknik audit berbantuan computer atau menggunakan CAAT (*Computer Aided Auditing Technique*). Sebagai gambaran, di Amerika Serikat (AS) hasil audit sistem informasi *e-Procurement* harus dipublikasikan kepada publik. Dengan demikian pengguna jasa mengetahui betul kondisi layanan sistem informasi *e-Procurement* tersebut.

Dari sudut software engineer, tujuan akhir proses rekayasa perangkat lunak adalah menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi. Philip Crosby dalam bukunya tentang kualitas perangkat lunak menerangkan bahwa manajemen kualitas bukanlah suatu hal yang tidak diketahui. Dalam konteks pengembangan *e-Procurement* ada dua jenis kualitas yang ada, yaitu kualitas disain dan kualitas konformansi. Kualitas disain mengacu pada karakteristik yang ditentukan desainer terhadap suatu item tertentu. Nilai material, toleransi, dan spesifikasi kinerja, semua memberikan kontribusi terhadap kualitas disain. Karena material dengan nilai tinggi digunakan dan toleransi yang lebih ketat serta tingkat kinerja yang lebih baik ditentukan, maka kualitas desain dari suatu produk bertambah, bila produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Kualitas konformansi adalah tingkat dimana spesifikasi desain terus diikuti selama pembuatan.

2.3 Kebijakan Pemerintah Dalam Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik

2.3.1 Prinsip-Prinsip Dasar

Disadari atau tidak, teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Teknologi informasi ini memungkinkan perdagangan, perniagaan, transaksi dilakukan melalui media elektronik. Termasuk di dalamnya adalah aplikasi pengadaan barang dan jasa yang disebut *e-Procurement*.

Aplikasi teknologi informasi yang baik dapat menyebabkan data lebih cepat diproses dan terjaga akurasi. Sifat ini diinginkan untuk menjaga transparansi. Namun aplikasi yang salah akan menyebabkan sistem tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien, serta dapat menimbulkan harapan yang salah seperti adanya *false sense of security*.

Pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah merupakan besaran yang sangat signifikan untuk itu diperlukan sistem pengadaan yang baru untuk menghemat waktu dan biaya pada setiap prosesnya. *Electronic Procurement (e-Procurement)*, merupakan sistem baru dalam upaya untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.

Sistem *e-Procurement* sebenarnya sama dengan sistem pengadaan barang/jasa yang sudah dijalankan kalangan pemerintah selama ini (memerlukan tatap muka). Yang membuat *e-Procurement* menjadi berbeda adalah mulai digunakannya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yakni media internet. Dengan adanya teknologi internet maka antara pemerintah dan pihak swasta tidak perlu bertatap muka dalam proses pengadaan barang/ jasa. Mulai dari pendaftaran, penawaran, penyanggahan sampai penentuan pemenang bisa dilakukan secara *on line* atau hanya membuka alamat *situs web* lembaga pemerintah yang dituju. Kendala proses komunikasi, jarak dan waktu akhirnya bisa diminimalisir berkat sebuah kemajuan teknologi.

Konsep dasar implementasi *e-Procurement* adalah (Nuryanto, 2008):

- a) Yang pertama menghilangkan kontak langsung antara panitia pengadaan dengan peserta lelang, dan antara peserta dengan peserta lainnya.

- b) Kedua, semua alasan kuat dari panitia untuk menggugurkan peserta lelang harus dapat diakses oleh publik di situs *e-Procurement*.
- c) Ketiga, dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus dapat diakses oleh publik di situs *e-Procurement*.
- d) Selain itu harus ada Standarisasi Layanan berupa kemampuan untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001 tentang “*Quality Management System*” bagi Sekretariat Layanan *e-Procurement*. Dan juga sertifikasi ISO 27001 tentang “*Information Security Management System*”.

Mengenai menu atau modul dalam aplikasi *e-Procurement*, harus terdapat beberapa hal di dalamnya. Diantaranya: fungsi *registrasi* (pendaftaran), penjelasan persyaratan lelang barang/jasa beserta harganya, pengisian proposal, mekanisme negosiasi/penyanggahan, lelang *online*, transaksi/*purchase order*, form serah terima, *database* para pemasok (*supplier*) dan sebagainya. Selanjutnya teknologi *e-Procurement* juga didukung sistem keamanan (*security*) yang bisa menjaga agar setiap hasil lelang *online* tersebut dianggap sah oleh semua pihak.

Ada 3 syarat utama dapat dilaksanakannya *e-Procurement*, yaitu (Fal-tSe, 2009):

- a) Aspek Hukum

Dalam proses *e-Elektronik* ini legal aspek harus dinyatakan sebagai landasan yang mengikat untuk seluruh *procurement* yang dilaksanakan secara elektronik, tanpa melihat besaran nilai proyek atau kegiatan. Dalam upaya menegakkan aspek hukum ini diperlukan peraturan perundangan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan transaksi elektronik untuk menjamin keabsahan pelaksanaan transaksi, termasuk surat-menyurat melalui media elektronik seperti legal aspek tanda tangan elektronik, dan bea materai untuk berbagai dokumen. Disamping itu, perlu dibentuknya suatu badan yang berhak untuk melakukan pengesahan registrasi dari para penyedia jasa. Serta penetapan lokasi dan waktu pengiriman, serta penerimaan dokumen penawaran. Dalam hal ini diperlukan juga suatu jaminan atas keabsahan dalam mengaudit proses lelang/tender melalui media elektronik (*e-Procurement*)

b) Aspek Manajemen

Aspek manajemen dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan IT. Disamping itu juga perlu dipersiapkan Keppres yang mengatur pelaksanaan *e-Procurement*, serta melakukan sosialisasi ke seluruh *stakeholders* dengan memberikan informasi/data pelelangan/tender kepada publik/masyarakat.

c) Aspek Teknis

Keamanan proses tender yang mensyaratkan: *zero tollerance insider information*, atau kemampuan pelaksana dalam *e-Procurement*, mensyaratkan beberapa aspek teknis yaitu penyelenggaraan transaksi melalui media elektronik, pembangunan sistem *e-Registrasi* untuk penyedia jasa, kapasitas *bandwith* yang cukup untuk kelancaran proses pengisian format-format pelelangan/tender, upload dan download dokumen, serta keamanan sistem aplikasi dan dokumen dari serangan virus atau *hacker*.

2.3.2 Filosofi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebenarnya sedang dibangun sistem perdagangan/bisnis global tanpa batas yang sering disebut sebagai *e-Business*. Dengan implementasi *e-Procurement*, sistem kolaborasi antara internet dan intranet dapat diwujudkan untuk memudahkan pekerjaan.

E-Government sebagai salah satu penopang *e-Business* sebenarnya bergantung pada *e-Procurement*. Jika instansi Pemerintah menerapkan *e-Procurement* maka konsep *e-Business* dapat diwujudkan sekaligus. PT Mediaplus Elektronik (2006) menyatakan bahwa tingkat pengembangan implementasi *e-Business* tersebut adalah :

a) *Connectivity*

Antara penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan dan Pengguna barang/jasa dapat *online* dalam menyelenggarakan proses pengadaan.

b) *Content*

Bahwa dalam proses "*online communication*" tersebut instansi penyelenggara *e-Procurement* bisa memberikan isi dan menu pada

web(situs) pengadaannya sehingga tahapan-tahapan lelang sebagaimana diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 dapat dilaksanakan dengan baik.

c) *Commerce*

Bahwa terjadi proses transaksi antara penyedia barang/jasa dan pengguna (penawaran-persetujuan harga-kontrak), meskipun pada kenyataannya transaksi dengan *payment* berbasis *online* baru dapat dilaksanakan kemudian.

d) *Collaboration*

Dengan adanya database *vendor* ataupun barang/jasa dan data pengguna, maka masing-masing *stake holder* sebenarnya sudah tercipta jaringan komunikasi data yang akan sangat menguntungkan guna mencapai tujuan masing-masing pihak.

e) *Communities*

Dengan adanya implementasi *e-Procurement* yang terintegrasi antar instansi maka komunitas antar *stakeholder* yang mempunyai kepentingan sama dapat terbentuk.

Konsep dasar implementasi *e-Procurement* adalah prosedur pengadaan sebagaimana peraturan dilaksanakan sebisa mungkin dengan cara elektronik dimana (Fal-tSe, 2009) :

- a) Lelang tetap dilakukan oleh Panitia Pengadaan (aanwijzing, evaluasi penawaran – kualifikasi, usulan calon pemenang) di unit layanan pengadaan (ULP)
- b) Dibentuk sekretariat layanan *e-Procurement* sebagai admin sistem informasi & fasilitator para *user/stake holder* (Penyedia Barang/Jasa – Panitia Pengadaan – PPK)
- c) Urut-urutan/tahapan lelang mengikuti ketentuan Keppres 80/2003 – jo Perpres 8/2006
- d) Menghilangkan kontak langsung panitia pengadaan dengan peserta lelang, dan antara peserta dengan peserta lainnya kecuali pada pembukaan sampul

- e) Semua alasan Panitia untuk menggugurkan peserta lelang dapat diakses publik di situs *e-Procurement*
- f) Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat diakses oleh publik di situs *e-Procurement*

2.4 Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Sistem *e-Procurement* sebenarnya tak ubahnya dengan sistem pengadaan barang/ jasa yang sudah dijalankan kalangan pemerintah saat ini (memerlukan tatap muka). Yang membuat *e-Procurement* menjadi berbeda adalah mulai digunakannya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yakni media internet. Berkat internet antara pemerintah dan pihak swasta (*supplier*) tidak perlu bertatap muka dalam proses pengadaan barang/ jasa. Mulai dari pendaftaran, penawaran, penyanggahan sampai penentuan pemenang bisa dilakukan secara *on line* atau hanya membuka alamat situs web lembaga pemerintah yang dituju. Kendala proses komunikasi, jarak dan waktu akhirnya bisa diminimalisir berkat sebuah kemajuan teknologi (wartaegov, 2009).

Tapi teknologi *e-Procurement* bukanlah hanya berupa situs web internet semata. Situs web hanyalah bagian depan (*interface*) yang bisa diakses oleh publik (pemasok/ masyarakat). Selain melalui situs web, *e-Procurement* juga bisa diakses melalui *short message service* (SMS) atau telepon (*call center*). Selanjutnya kalau melihat dibelakangnya, *e-Procurement* juga didukung oleh manajemen data dalam sebuah dibelakangnya.

Khusus mengenai menu atau modul dalam aplikasi e-procurement, harus terdapat beberapa hal di dalamnya. Diantaranya: fungsi registrasi (pendaftaran), penjelasan persyaratan lelang barang/ jasa beserta harganya, pengisian proposal, mekanisme negoisasi/ penyanggahan, lelang *on line*, transaksi/ *purchase order*, form serah terima, *database* para pemasok (*supplier*) dan sebagainya. Semua modul tersebut biasanya ditampilkan dalam bentuk aplikasi berbasis web internet atau SMS (wartaegov, 2009).

Selanjutnya idealnya teknologi *e-Procurement* juga didukung sistem keamanan (*security*) yang bisa menjaga agar setiap hasil lelang *on line* tersebut dianggap sah oleh semua pihak. Peralnya, *e-Procurement* bisa menjadi sebuah

aplikasi yang berpotensi menimbulkan ancaman dari berbagai pihak (persaingan antar supplier, serangan penyusup untuk merubah data, dsb). Teknik *security* e-procurement sebenarnya tak jauh berbeda dengan sistem security aplikasi e-government lainnya (wartaegov, 2009).

2.4.1 Tujuan *e-Procurement*

James E. deMin menyatakan bahwa tujuan dari *e-Procurement* adalah sebagai berikut :

- a) Untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para pembeli, pemasok, dan pengguna.
- b) Untuk mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut.
- c) Untuk meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait pengadaan melalui standarisasi, pengecilan, dan otomatisasi proses pengadaan di dalam dan di mana yang sesuai dengan agensi-agensi dan sektor-sektor.
- d) Untuk mendorong kompetisi antar pemasok sekaligus memelihara sumber pasokan yang dapat diandalkan.
- e) Untuk mengoptimalkan tingkatan-tingkatan inventori melalui penerapan praktek pengadaan yang efisien.
- f) Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan.
- g) Untuk mengurangi pengeluaran putus kontrak dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap fasilitas-fasilitas kontrak yang ada dan membuatnya lebih mudah untuk menentangnya.
- h) Untuk meningkatkan kemampuan membeli dengan menggunakan teknologi untuk mendukung identifikasi peluang untuk penyatuan dan dengan memfasilitasi penyatuan persyaratan pengguna di dalam dan melalui garis-garis bisnis.
- i) Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan proses-proses, yang mana masih tercetak

(paper-based), dan untuk mengecilkan, dan menstandarisasi proses-proses dan dokumentasi

2.4.2 Keunggulan *e-Procurement*

e-Procurement sebenarnya merupakan suatu konsep yang paling mudah untuk dijalankan dan dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi Pemerintah. *e-Procurement* adalah salah satu pengembangan *e-commerce* yang mulai berkembang pada akhir abad-20 ini dan tanpa ragu lagi akan terus berkembang dengan pesat pada permulaan abad-21 ini. *e-Procurement* sebenarnya merupakan kegiatan penyelenggaraan untuk pembelian barang atau jasa melalui media elektronik (informasi dan komunikasi) yang berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi (internet), seperti *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Enterprise Resource Planning* (ERP). Pembelian barang atau jasa disini mempunyai pengertian adanya transaksi antara *buyers* dan *sellers*, sehingga diperlukan adanya beberapa transaksi data yaitu adanya identitas, kesepakatan, pertukaran dokumen, dan validasi sehingga tersedia informasi penting untuk analisa strategi yang menguntungkan (Satyawira, 2008)

Beberapa keunggulan dari penerapan *e-Procurement* adalah (Satyawira, 2008):

- a) *e-Procurement* menawarkan kesempatan seluas-luasnya untuk perbaikan dalam biaya dan produktivitas;
- b) *e-Procurement* adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menyempurnakan manajemen dalam proses langsung, maupun tidak langsung dalam pencarian sumber pembelian;
- c) Strategi *e-Procurement* yang efektif akan merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan daya saing di waktu yang akan datang.

Sedangkan menurut PT. Almadary Indonesia keunggulan penerapan *e-Procurement* antara lain :

- a) Tidak adanya batas ruang dan waktu karena menggunakan teknologi berbasis internet;
- b) Proses pengadaan barang dapat diikuti oleh pemasok secara terbuka;

- c) Proses dalam setiap tahapan pengadaan akan dengan mudah diikuti / diawasi oleh seluruh stakeholder;
- d) Proses akan berlangsung lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel;
- e) Akan lebih mendorong terjadinya persaingan antar pemasok yang lebih sehat;
- f) Mencegah tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

Sedangkan keunggulan yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Denpasar selaku salah satu Pemerintah Daerah Tingkat II yang melaksanakan penerapan *e-Procurement* diantaranya :

- a) Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti lelang cukup satu kali registrasi;
- b) Komunikasi dilakukan secara online sehingga dapat meminimalisasi pertemuan antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan;
- c) Mengurangi kertas kerja yang dibutuhkan dalam proses lelang;
- d) Menjamin kualitas barang dan jasa;
- e) Pemerataan pekerjaan;
- f) Proses penawaran dilengkapi dengan sistem Kunci Publik sehingga keamanan data dapat dipertanggungjawabkan;
- g) Pelaksanaan lelang dapat dipantau langsung;
- h) Adanya optimasi waktu proses pengadaan barang/jasa;
- i) Mengurangi dan menekan biaya dari kedua belah pihak;
- j) Respon yang cepat terhadap pertanyaan dan klarifikasi lelang.

2.4.3 Manfaat *e-Procurement*

Semakin banyak departemen/ instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau yang dikenal dengan istilah *e-Procurement*. Hal ini merupakan bagian dari tindak lanjut dari Keppres. No. 80/ 2003 yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar lebih efisien, efektif, transparan dan adil bagi semua pihak. Saat ini antara Departemen Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sedang merancang Keputusan Presiden (Keppres) mengenai *e-Procurement* Nasional (wartaegov, 2009).

Dalam pelaksanaannya, *e-Procurement* di Indonesia telah terbukti memberikan manfaat positif dan mampu mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Banyak kalangan departemen/ instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD yang mampu menghemat anggaran maupun waktu yang digunakan. *e-Procurement* juga dianggap bisa "membebaskan" proses pengadaan barang dan jasa dari tuduhan korupsi, kolusi, nepotisme.

Menurut Seth Miller dalam artikelnya keuntungan utama *e-Procurement* meliputi menghemat uang, waktu, dan beban kerja tambahan yang normalnya berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis. Proses pengadaan konvensional biasanya melibatkan banyak pemrosesan kertas-kertas, yang mana menghabiskan sejumlah besar waktu dan uang. Dalam beberapa contoh, biaya pemrosesan berkurang sebesar 85%. *e-procurement* merupakan komponen besar dalam e-commerce *bussines to bussines* modern dan dapat diterapkan pada spektrum luas industri dan pasar. Banyak perusahaan telah menerapkan *e-procurement* dengan sukses, memperoleh keuntungan hingga jutaan dolar AS. Pengalaman menunjukkan bahwa sebuah perusahaan dapat menikmati pengembalian yang mencapai 300% dari investasi awal dalam hanya tiga tahun. Jumlah keberhasilan yang meningkat menunjukkan pertumbuhan pengakuan akan keuntungan *e-procurement*. Hal ini menandakan sebuah optimisme terhadap otomatisasi meskipun dalam perlambatan ekonomi dunia. Beberapa perusahaan telah mengadopsi otomatisasi pada semua tahap dari proses suplai untuk memaksimalkan keuntungan *e-Procurement*. *e-Procurement* terutama diterapkan pada pembelian barang-barang kecil dan tidak mahal seperti perlengkapan kantor. Pendekatan tradisional masih disukai untuk produk yang lebih mahal seperti permesinan industri kompleks. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan secara meningkat mengakui manfaat pengadaan bahan secara online. Pengadaan secara

online membantu organisasi-organisasi untuk merancang rencana yang optimal untuk memanager rantai pasokan (*supply chain*). Keuntungan *e-Procurement* tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi juga penyederhanaan keseluruhan proses. Rencana-rencana yang optimal dapat dikomunikasikan dengan cepat kepada pemasok-pemasok, oleh karena itu dapat mengurangi biaya dan pemborosan yang biasanya terdapat dalam *supply chain*. Keuntungan *e-Procurement* meliputi pengurangan biaya overhead seperti pembelian agen, juga peningkatan kendali inventori, dan keseluruhan peningkatan siklus manufaktur. Sistem *e-Procurement* membantu perusahaan-perusahaan mengkonsolidasikan data tentang pengadaan bermacam-macam barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Data ini memungkinkan mereka melakukan pembelian besar dan bernegosiasi dengan para pemasok untuk diskon yang lebih besar. Daripada sepuluh departemen independen berbeda, misalnya, membeli suatu produk tertentu dalam jumlah kecil, suatu sistem pengadaan yang terpusat dan terhubung dengan baik dalam organisasi akan membantu melacak kebutuhan secara periodik untuk produk tersebut dan pemesanan pembelian besar dapat disusun sesuai kebutuhan. Jika perusahaan dapat dengan mudah menunjukkan kepada pemasok bahwa ada permintaan yang konsisten, hal itu dapat mengatur pesanan pembelian. Lebih lanjut, dengan menghubungkan seluruh pesanan untuk bagian-bagian tertentu dan suplai melalui rute yang ditentukan, perusahaan pembeli dapat mengurangi jumlah transaksi yang diperlukan untuk barang-barang tersebut. Singkatnya nilai yang ditawarkan *e-Procurement* meliputi :

- a) Pengurangan biaya pengadaan : Pengurangan dalam biaya, yang dapat berkisar 20-25%, dapat dicapai melalui proses yang efisien seperti perluasan basis pemasok, negosiasi harga yang lebih baik, dan pemendekan siklus pengadaan, sehingga mengurangi inventori.
- b) Pelacakan transaksi yang mudah dan pembayaran terotomatisasi : Meminimalkan beberapa biaya pasca pembelian, sehingga menjamin kepuasan pelanggan.
- c) Kendali yang lebih baik : Melalui sarana-sarana pelaporan dan analisis yang mudah dan efektif, seseorang dapat meningkatkan efisiensi dalam

pemeliharaan laporan, memeriksa pembelian tidak terkendali, dan menciptakan integrasi data yang utuh.

- d) Otomatisasi tugas-tugas repetitif : Jika beberapa pembelian yang dilakukan adalah teratur, sistem secara otomatis menyetujui pembelian tersebut berdasarkan pada pembeli dan jumlah yang diminta

Sedangkan menurut *emarketplace* beberapa manfaat dari penerapan *e-*

Procurement adalah :

- a) Penghapusan biaya administrasi.

Penerapan *e-Procurement* mengotomatisasi banyak proses administrasi dalam pembelian sehingga menjadi proses yang tanpa tertulis (*paperless*). Pengadaan secara tradisional dipandang sebagai pekerjaan penyampaian kertas dalam seluruh perusahaan. Mengalihkan beban administrasi bagi staf dan mengotomatiskan pekerjaan kunci menghemat waktu mereka dan lebih lanjut menghemat dana dewan.

- b) Pemotongan biaya pembelian

e-Procurement tidak secara intrinsik mengurangi biaya pembelian, namun mendorong organisasi untuk mencapai tujuan ini dengan cara berikut:

- Dengan mengenalkan sebuah sistem yang dapat digunakan dengan mudah oleh orang-orang dan dengan senang menggunakannya, memungkinkan setiap orang di organisasi menyesuaikan dengan aturan pemasok yang dipilih dan oleh karena itu meningkatkan kemampuan membeli organisasi terhadap supplier yang dipilih.
- Ketika bertransaksi dengan pemasok secara elektronik, pemasok-pemasok menjadi lebih sering memberikan diskon karena biaya administrasi mereka lebih rendah.
- Dengan mengurangi pembelian yang tidak terawasi oleh dewan, para pemasok dapat menjadi lebih berkomitmen terhadap perjanjian-perjanjiannya karena lebih terjamin untuk memperoleh bagian yang lebih besar dari pengeluaran dewan.

- c) Pemotongan waktu siklus pembelian

Dalam banyak dewan, waktu dari pemesanan hingga pengiriman dapat berhari-hari atau berbulan-bulan, membuat proses pengadaan menjadi

kurang layak untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus dipesan secara cepat. Penundaan-penundaan sering disebabkan oleh persyaratan-persyaratan tertulis yang harus ditangani secara manual oleh satu atau lebih orang dan di mana *budget* dan komitmen-komitmen harus diperiksa sebelum pesanan keluar. Solusi *e-Procurement* dengan tingkat kemajuan pekerjaan menjadi sifat inti mengefisienkan proses ini dan menghindari kemacetan (*bottleneck*) yang umum terjadi dalam proses ini. Hal ini memungkinkan suatu permintaan diperiksa secara otomatis terhadap setting-setting yang sudah ditetapkan dan disetujui secara elektronik. Hal ini tidak hanya mempercepat proses keseluruhan tetapi juga memberikan analisis lengkap atas siklus pembelian sehingga staff pengadaan dapat mengenali kemacetan-kemacetan umum dan menentukan apakah penundaan diakibatkan oleh sebab internal atau eksternal. Singkatnya, *e-Procurement* mendorong staf menyelesaikan tugasnya dengan cepat tanpa mengorbankan kendali. Ketika mencoba untuk menghitung manfaat bagi dewan dari segi pengurangan waktu siklus pembelian, adalah penting bahwa banyak pembelian merupakan hal kritis dan akan diuntungkan karena peningkatan efisiensi, keluar dari sistem yang ada. Hal ini menjadi sulit untuk menghitung manfaat biaya yang akurat.

d) Kontrol manajemen yang lebih besar

Karena semua data pengadaan diproses melalui satu database terpusat dan secara otomatis diintegrasikan ke dalam Financial Management Information System (FMIS), *e-Procurement* memungkinkan analisis yang relevan dan laporan manajemen dapat dengan mudah dihasilkan. Di samping mempersenjatai profesional pengadaan dengan informasi yang dibutuhkan untuk memmanage dengan efektif, *e-Procurement* bertujuan mengurangi beban administratif yang berarti bahwa mereka dapat memfokuskan pada pengambilan keputusan yang lebih proaktif.

e) Sesuai kebutuhan user (*user compliance*).

Memaksimalkan kecocokan dengan kebutuhan, menjamin bahwa setiap orang hanya membeli dari pemasok yang disetujui adalah hal penting bagi manajer pembelian, karena mempunyai dua manfaat yaitu mendapatkan

nilai terbaik dari persetujuan-persetujuan dengan yang dipilih oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan persetujuan-persetujuan yang jauh lebih baik dengan para pemasoknya. Dengan proses pengadaan tradisional, permintaan tertulis sangat menghabiskan waktu untuk menyelesaikan dan mudah mengalami penundaan-penundaan ketika permintaan tersebut melalui proses persetujuan yang tidak membutuhkan perhatian banyak pengguna. Mereka menemukan cara-cara lain untuk membeli, apakah dengan menempatkan pesanan secara langsung kepada pemasok atau menggunakan kartu kredit atau uang tunai. Hal ini dikenal dengan pembelian yang tidak terawasi (*“maverick purchasing”* atau *“rogue spending”*), walaupun bagi banyak pengguna mencoba membeli sesuatu untuk menyelesaikan pekerjaan bukanlah *“maverick”* (tidak terkendali, bebas), tetapi demi kepentingan organisasi. Ketika mereka menggunakan sistem tradisional, mereka kadang harus melakukan panggilan telepon kepada pemberi wewenang yang berbeda-beda atau kepada pembeli untuk mempercepat transaksi. Berikut adalah masalah yang muncul sebagai akibatnya. Pertama, nilai terbaik tidak diperoleh. Pembeli yang tidak terawasi tidak dapat mengeluarkan persyaratan-persyaratan seperti organisasi yang karena jarang digunakan oleh pemasok yang dipilih. Kedua, karena pembelian melampaui sistem sehingga tidak dapat dianalisa dan oleh karena itu informasi manajemen yang berarti sulit dihasilkan. Akhirnya, hal tersebut dapat memunculkan masalah internal yang dapat dihindari. *e-Procurement* menyediakan pengguna suatu cara mengadakan barang yang umumnya lebih cepat bahkan daripada metode yang bebas. Mereka dapat dengan cepat menyelesaikan pesanan pada layar dengan *interface* yang *user-friendly*. Mereka dapat melacak perkembangan pesanan mereka pada tahap manapun dari rantai persetujuan dan dapat diinformasikan secara elektronik untuk pengiriman barang dari pemasok.

f) Pengurangan tingkat kesalahan pemesanan

e-Procurement secara dramatis mengurangi kecenderungan kesalahan pengguna dalam proses pengadaan, karena pesanan-pesanan dibuat dengan memilih item-item yang ada di katalog dalam sistem. Transaksi elektronik

disampaikan antara dewan FMIS, *e-marketplace*, dan sistem pemasok tidak membutuhkan campur tangan manusia. Hal ini mengurangi peluang pesanan diterjemahkan secara tidak tepat, harga-harga tidak tepat, atau item-item dalam katalog sudah usang dan tidak diproduksi lagi pada waktu pemesanan.

g) Pekerja pengetahuan (*knowledge workers*).

Pendiri Microsoft, Bill Gates, dalam bukunya *Business @ the Speed of Thought* (1999) menggambarkan efek dari penempatan solusi e-procurement pada Microsoft. Di samping penghematan sekitar 140 juta dolar per tahun, efek mendasar dari penerapan tersebut adalah peralihan staf menjadi "*knowledge workers*". Istilah ini menggambarkan bagaimana staf tidak lagi terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan administratif seperti mengisi dan menyampaikan form-form, karena semuanya dikomputerisasi dan staf-staf diberi informasi untuk memanager pengadaan, daripada "di-manage olehnya". Mengubah staf menjadi *knowledge workers* menghasilkan produktivitas yang lebih baik dari seluruh dewan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi staf pembelian tetapi bagi seluruh orang yang terlibat dalam proses pengadaan yaitu penyusun pesanan, pemberi wewenang, manajer, staf keuangan, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan end-user untuk fokus sepenuhnya pada tugas mereka sendiri dengan dukungan suatu sistem pengadaan yang efektif, dan staf pengadaan dapat mengalihkan fokus mereka dari tugas administratif yang seringkali tidak berarti ke strategi dan analisis pengadaan. Pengadaan oleh sebuah organisasi dapat digolongkan sebagai pengadaan MRO (*Maintenance, Repair, and Operating*) dan pengadaan langsung. Pengadaan MRO terdiri dari semua pembelian tidak langsung yang meliputi perlengkapan kantor, suku cadang mesin, komputer dan asesorisnya, dan dapat juga meliputi jasa seperti travel, kurir, dan sebagainya. Walaupun hal ini menggambarkan hanya sebagian kecil persentase pengeluaran total sebuah perusahaan, untuk perusahaan besar nilai itu bisa jadi besar. Jumlah total pengadaan MRO bervariasi dari 10% untuk seluruh pengadaan untuk organisasi bidang manufaktur hingga 60% untuk organisasi pelayanan

seperti bank dan konsultasi keuangan lainnya. Keuntungan menggabungkan sebuah model *e-Procurement* untuk MRO adalah bahwa proses-proses tersebut lebih cepat dan oleh karena itu mengurangi ketergantungan. Untuk model langsung, dalam melihat volume besar transaksi repetitif, keuntungannya terletak pada integrasi solusi *e-Procurement* dengan sistem perencanaan produksi perusahaan dan manajemen inventori. Kebanyakan sistem sisi penjualan menangani transaksi yang lebih sederhana seperti suplai MRO. Sistem sisi penjualan memungkinkan penjual berinteraksi dengan banyak *customer* sekaligus, organisasi *customer* mungkin harus mengintegrasikan sistem mereka dengan banyak solusi tergantung jumlah pemasok. Keuntungan menggunakan solusi ini, dibandingkan dengan yang tradisional bagi sebuah organisasi *customer* yaitu dalam hal peningkatan nilai *customer* melalui manajemen biaya/waktu yang efisien dan kemampuan akses yang mudah. Sistem *end-user* pembelian berinteraksi dengan sistem informasi internal seperti *Enterprise Resource Planning* (ERP) memungkinkan sistem mengotomatisasi sebagian transaksi, sehingga meningkatkan kecepatan penanganan transaksi serta mengurangi biaya pemrosesan. Pemasok-pemasok juga dapat memperoleh manfaat dari *e-Procurement*. Mereka dapat meniadakan katalog tercetak melalui *Electronic Data Interchange* (EDI) dan e-mail. Manajemen inventori menjadi lebih mudah melalui peringatan dan update otomatis, secara simultan memungkinkan pembeli memberitahu pemasok-pemasok secara otomatis untuk pembayaran pasangan yang diperbarui. Memanage akun-akun yang diterima juga menjadi lebih ringkas bagi mereka.

2.4.4 Hambatan *e-Procurement*

Meski banyak membawa manfaat kepada lembaga pemerintah, *e-procurement* juga bisa berpotensi menimbulkan masalah (Wicaksono, 2009). Banyak bisnis kecil dan menengah lambat dalam pengadaan secara online, karena batasan-batasan dalam mengintegrasikan platform pengadaan dengan sistem yang sudah ada dan kurangnya standar data. *e-Procurement* dalam sektor *Bussines to Consumer* juga lambat untuk diterima karena jalur-jalur rantai suplai tidak

sepenuhnya mendukung e-bisnis (*emarketplace*). Salah satu halangan adalah tidak banyak pemasok yang memiliki perlengkapan untuk berpartisipasi dalam sebuah proses *e-Procurement*. Mereka harus berinvestasi dalam pembuatan interface yang sesuai dan dalam beberapa kasus customer enggan berpartisipasi. *e-Procurement* mempengaruhi setiap fungsi dalam perusahaan dan dapat berkembang melampaui proses *procurement* saja. Hal ini dapat memperkenalkan pemasok baru dan peran baru bagi pemasok yang ada seperti bank dan perusahaan logistik. Dalam banyak kasus, prosedur pengendalian keuangan dan kebijakan komitmen harus disesuaikan, di mana kegagalan terhadap hal ini akan berpengaruh negatif pada pengembalian investasi. Beberapa dari masalah yang perlu diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin menerapkan solusi *e-Procurement* yaitu :

- a) Pemasok-pemasok yang mampu mendukung fitur elektronik;
- b) Pencarian pemasok baru;
- c) Kebutuhan akan kolaborasi yang kuat;
- d) Kemampuan untuk menyampaikan;
- e) Biaya transaksi;
- f) Pada keadaan tertentu, ketersediaan content dan transparansi proses.

Beberapa masalah yang berpotensi muncul dalam pengadaan barang/ jasa baik yang konvensional/ elektronik, diantaranya (Wartaegov, 2009):

- a) Keharusan memilih harga terendah seringkali membuat banyak lembaga pemerintah justru berpotensi menerima barang/ jasa yang tidak sesuai standar. Selain itu proses lelang seringkali diikuti oleh peserta (perusahaan) yang “banting harga”.
- b) Pengadaan barang/ jasa yang bersifat sulit diukur (*intangibile*) seperti biaya konsultasi, belanja perangkat lunak (*software/ aplikasi*), berpotensi menimbulkan dugaan korupsi dari lembaga penyidik/ anti korupsi seperti BPK, KPK, Polisi dan Kejaksaan. Pemahaman dalam menentukan harga barang/ jasa yang layak sesuai spesifikasi atau “kelas” seringkali masih menjadi perdebatan antara panitia lelang dan lembaga penyidik.
- c) Begitu besarnya sorotan publik (masyarakat dan lembaga penyidik) dan makin banyaknya peserta lelang, menimbulkan efek keengganan untuk menggunakan anggaran lelang adakan menjadi panitia lelang.

d) Belum adanya peraturan hukum yang memayungi proses *e-Procurement*. Akibatnya belum ada standar baku mengenai standar proses *e-Procurement*, waktu, penggunaan teknologi informasi, sumber daya manusia, keabsahan hukum dan sebagainya.

e) Rendahnya komitmen pemimpin lembaga pemerintah untuk mengadakan barang/ jasa secara transparan baik secara konvensional atau elektronik.

Seperti pada semua kegiatan pastinya ada hambatan dan kendala, *e-Procurement* di pemerintahan pun juga seperti (ikha, 2009) :

a) Perlunya SDM di bidang IT yang memadai, baik dari sisi pengelola dan pengguna terutamanya, demikian pula penyedia/rekanan yang dapat dipastikan membutuhkan tenaga tambahan untuk dapat mengikuti sistem ini.

b) Perlunya biaya tambahan terutama di dalam interkoneksi internet dimana pada era sekarang ini masih merupakan produk yang eksklusif/dapat dikatakan mahal.

Implementasi *e-Procurement* memang dapat mereduksi penyimpangan dan KKN, sistem yang memiliki pengamanan data dan dokumen yang lebih baik serta transparan dalam proses lelang. Kesenjangan digital merupakan tantangan terutama untuk menyukseskan *e-Procurement* sebab belum semua pengguna atau penyedia barang dan jasa menguasai teknologi elektronik atau teknologi informasi sehingga diperlukan waktu untuk adaptasi dan persiapan yang lebih optimal (Prabowo,2009).

2.5 Penerapan e-Procurement Di Berbagai Negara

2.5.1 Indonesia

Di Indonesia *e-Procurement* mulai mendapat perhatian kembali setelah terbitnya Keppres Nomor 61 Tahun 2004 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik. Adanya Keppres ini merupakan sebuah langkah penting dilihat dari sisi hukum, yaitu untuk memastikan status hukum dari *e-Procurement* beserta dokumen-dokumen terkait.

Dalam pelaksanaannya, *e-Procurement* di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat positif dan mampu mewujudkan pengadaan barang dan jasa

yang menerapkan prinsip *good corporate governance* serta mampu menghemat anggaran maupun waktu yang digunakan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja sistem *e-Procurement* maka pemerintah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), lembaga non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan lembaga ini berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Salah satu fungsi lembaga ini adalah untuk pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Procurement*).

Sesuai tugas dan fungsi LKPP dalam mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, maka LKPP akan melakukan langkah strategis guna mendorong/meningkatkan realisasi program dan kegiatan khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Fal-tSe (2009) menyatakan bahwa langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Melakukan revisi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b) Melakukan inventarisasi anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dengan mengirimkan surat kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk melaporkan penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam mengintegrasikan sistem pengadaan dengan sistem penganggaran.
- c) Menyempurnakan dan mendorong kembali penggunaan sistem pengumuman rencana pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-announcement*) bagi seluruh Departemen/Instansi. Pada tahun 2006, KPK, Bappenas, DepKominfo telah membangun sistem *e-announcement*, yang dimaksudkan terutama untuk menjamin kepastian dan kejelasan informasi bagi setiap orang (*symetric information*). Data yang terkandung dalam sistem *e-announcement* mencakup antara lain data dan informasi mengenai pagu anggaran dan rencana paket-paket pekerjaan masing-masing departemen/instansi Pemerintah. Di masa

yang akan datang, seyogyanya *e-announcement* diintegrasikan dengan *e-Procurement*.

- d) Membangun tahap awal sistem *e-monitoring* dan evaluasi. Berkaitan dengan butir b dan c sebagaimana tersebut diatas, LKPP akan membangun sistem e-monitoring dan evaluasi sebagai satu kesatuan dari *e-announcement* dan *e-Procurement*. *E-monitoring* dan evaluasi dimaksudkan untuk memonitor kesesuaian rencana pengadaan dengan proses pengadaan yang terjadi, misalnya pemilihan metoda pengadaan dan evaluasi yang dilakukan oleh suatu instansi. Sehingga tidak hanya proses pengadaan barang/jasa Pemerintah akan lebih transparan, terbuka dan bersaing, akuntabel serta mampu menciptakan iklim persaingan usaha nasional yang lebih sehat, kompetitif dan bebas KKN, namun indikasi dan/atau potensi sengketa ataupun permasalahan yang mungkin terjadi dapat sejak awal diketahui.
- e) Diperbolehkan melaksanakan lelang untuk suatu kegiatan pada tahun sebelumnya sepanjang kegiatan tersebut sudah tercantum di DIPA, dan penandatanganan kontrak dilaksanakan setelah DIPA dimaksud disahkan. (Revisi ke-IV atas Keppres No. 80 Tahun 2003).
- f) Memperkenalkan *e-Procurement* untuk efisiensi biaya (dokumen melalui CD), mengurangi KKN (tanpa tatap muka), transparan (seluruh *stakeholder* dapat mengakses), waktu (tidak perlu menggandakan berkas dan kegiatan lain yang terkait), dan menghindari tekanan dari *top down* (pimpinan).
- g) Memfasilitasi penyelesaian sengketa dan bantuan hukum terkait dengan pengadaan barang/jasa untuk mempercepat proses pelelangan.
- h) Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola pengadaan melalui pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi.
- i) Menerbitkan Surat Edaran (oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas) mengenai alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh setiap instansi pemerintah untuk mengantisipasi kekurangan personil pengelola pengadaan yang bersertifikat, yaitu:
 - membentuk unit layanan pengadaan;

- bagi para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak wajib bersertifikat;
- Dapat meminjam panitia pengadaan dari unit kerja lain.

Sejak 2007, Indonesia dengan kawalan Bappenas mulai menggunakan *e-Procurement* untuk mendukung implementasi program *e-Government*. Secara nasional, portal pengadaan barang/jasa dapat ditemukan di <http://pengadaannasionalbappenas.go.id>. Bappenas telah mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pada tahap awal layanan tersebut telah digunakan di beberapa departemen, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

Belakangan ini semakin banyak departemen atau instansi pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dalam pelaksanaannya, *e-Procurement* di Indonesia telah terbukti memberikan manfaat positif dan mampu mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang menerapkan prinsip *good corporate governance*. Banyak kalangan departemen/instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD yang mampu menghemat anggaran maupun waktu yang digunakan. *E-Procurement* juga dianggap bisa membebaskan proses pengadaan barang dan jasa dari tuduhan korupsi, kolusi dan nepotisme. Budi Raharjo (2009) menyatakan bahwa diluar pemerintahan sudah ada beberapa perusahaan yang menerapkan *e-Procurement* seperti Garuda Indonesia, PT. Indonesia Power dan beberapa perusahaan lainnya. Sistem *e-Procurement* pada PT. Garuda Indonesia terbagi dalam 2 (dua) modul besar, yaitu: Modul Manajemen Proses dan Modul Manajemen Pemasok, sedangkan untuk proses pelelangan (*bidding*) perusahaan menggunakan modul *e-action* yang disediakan oleh pihak ketiga. Sistem *e-Procurement* pada PT. Indonesia Power digunakan untuk pemenuhan pengadaan barang dan jasa.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan untuk lebih meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka perlu adanya perbaikan mekanisme pengumuman rencana pengadaan dan pengumuman

pengadaan barang/jasa. Setiap instansi wajib mengumumkan seluruh rencana pengadaan setiap awal tahun anggaran, kecuali pekerjaan yang bersifat rahasia, di website pengadaan nasional dengan alamat “www.pengadaannasional-bappenas.go.id” dan/atau di website Departemen/Lembaga/Komisi/BI/Pemerintah Daerah/BHMN/BUMN/BUMD yang telah diintegrasikan ke website pengadaan nasional. Koordinasi untuk pelaksanaan pengumuman rencana pengadaan dilakukan oleh Meneg. PPN/Kepala Bappenas.

Pada saat ini kalau ada pengadaan melalui lelang akan ditulis pengumuman di koran 1 hari dan 7 hari pengumuman resmi di kantor pemerintah, dengan *e-Procurement* pengumuman tersebut dapat dipersingkat waktunya. Apabila waktu pengumuman yang dibutuhkan lebih pendek maka diharapkan pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan juga akan lebih cepat berjalan.

Pengumuman pelelangan umum/terbatas pengadaan barang/pemborongan/jasa lainnya harus mengacu kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang dirangkum sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pengumuman pelelangan umum/terbatas pengadaan barang/pemborongan/jasa menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003

No	Nilai	Metode Pemilihan	Tempat Pengumuman
1	< 1 Milyar	Pelelangan umum/terbatas	Sekurang-kurangnya : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satu surat kabar provinsi ▪ Diupayakan diumumkan di website www.pengadaannasional-bappenas.go.id

Tabel 2.1 Sambungan
Pengumuman pelelangan umum/terbatas pengadaan barang/ pemborongan/jasa
menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003

No	Nilai	Metode Pemilihan	Tempat Pengumuman
2	< 1 Milyar	Pelelangan umum/terbatas dimana jumlah penyedia barang/jasa yg berdomisili di provinsi yg mampu mengerjakan diyakini jumlahnya kurang dari 3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satu surat kabar nasional ▪ Diupayakan diumumkan di website www.pengadannasional-bappenas.go.id
3	> 1 Milyar	Pelelangan umum/terbatas	Sekurang-kurangnya : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satu surat kabar provinsi, dan Satu surat kabar nasional. ▪ Diupayakan diumumkan di website www.pengadannasional-bappenas.go.id

Sumber : Keppres Nomor 80 Tahun 2003 “telah diolah kembali”

Sedangkan Pengumuman Seleksi Umum/Seleksi Terbatas Untuk Jasa Konsultansi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pengumuman Seleksi Umum/Seleksi Terbatas Untuk Jasa Konsultansi menurut
Keppres Nomor 80 Tahun 2003

No	Nilai	Metode Pemilihan	Tempat Pengumuman
1	< 200 Juta	Seleksi Umum	Sekurang-kurangnya : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satu surat kabar provinsi ▪ Diupayakan diumumkan di website www.pengadaannasional-bappenas.go.id

Tabel 2.2 Sambungan
Pengumuman Seleksi Umum/Seleksi Terbatas Untuk Jasa Konsultansi menurut
Keppres Nomor 80 Tahun 2003

No	Nilai	Metode Pemilihan	Tempat Pengumuman
2	< 200 Juta	Seleksi umum dimana jumlah penyedia barang/jasa yg berdomisili di kabupaten/kota/provinsi yg mampu mengerjakan diyakini jumlahnya kurang dari 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satu surat kabar nasional ▪ Diupayakan diumumkan di website www.pengadaannasional-bappenas.go.id
3	> 200 Juta	Seleksi umum/terbatas	Sekurang-kurangnya : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satu surat kabar provinsi, dan Satu surat kabar nasional. ▪ Diupayakan diumumkan di website www.pengadaannasional-bappenas.go.id

Sumber : Keppres Nomor 80 Tahun 2003 “telah diolah kembali”

Untuk pemilihan surat kabar nasional dilakukan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas dan surat kabar provinsi dilakukan Gubernur berdasarkan daftar surat kabar yang ditetapkan Menkominfo. Sedangkan penetapan hasil pemilihan surat kabar nasional oleh Menkominfo dan surat kabar provinsi oleh Gubernur.

Selain itu, penegasan proses pengadaan dapat dilaksanakan sebelum dokumen anggaran disahkan

- a) Proses pengadaan (perencanaan pengadaan sampai dengan masa sanggah) dapat dilaksanakan sebelum anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan tersebut sudah dialokasikan.
- b) Proses penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan tersebut disahkan.

- c) Yang melakukan proses pengadaan adalah panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan tahun sebelumnya.

2.5.2 Australia

Fal-tSe (2009) menyatakan bahwa Australia sebagai salah satu negara pelopor pelaksanaan *e-Procurement* di dunia yang dimulai pada akhir tahun 1990an telah menggunakan *e-Procurement* sebagai salah satu alat dalam efisiensi pengeluaran anggaran serta mempermudah dalam penyediaan barang/jasa bagi pemerintah sehingga dapat membantu dalam percepatan penyerapan anggaran. Efisiensi dilaksanakan karena dalam proses pelaksanaan *e-Procurement* digunakan suatu analisis belanja (*spend analysis*) dimana sebelum dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa perlu diketahui:

- a) Barang/jasa yang akan dibeli oleh *spending agency* dan sudah terstandarisasi.
- b) Profil penyedia barang/jasa.
- c) Nilai dan jumlah transaksi, dan kemungkinan untuk mendapatkan pengurangan harga dari penyedia barang/jasa.
- d) Barang/jasa yang distandarisasi (pembatasan pembelian barang hanya untuk barang yang sudah mempunyai standarisasi)
- e) Metode pembelian yang akan dilaksanakan apakah secara satu persatu atau secara terakumulasi sesuai jenis barang/jasa.
- f) Prioritas penggunaan *e-Procurement*.

Dengan menggunakan analisis belanja yang dilaksanakan tersebut, mekanisme penggunaan anggaran akan seoptimal mungkin sehingga dana yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan pelaksanaan *spend analysis* juga menunjukkan kemungkinan apa saja yang dapat dilakukan untuk penghematan anggaran.

Pelaksanaan e-procurement di Australia dibagi kedalam 3 tahapan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan evaluasi atas setiap proses dalam tahapan-tahapan tersebut sehingga dalam setiap tahapan tersebut diperoleh hasil yang efektif dan optimal. Evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan

Evaluasi ini dimaksudkan agar dapat membantu dalam proses pengembangan rencana yang telah ditentukan, misalnya:

- Waktu (orang/waktu) yang dibutuhkan untuk membuat pengumuman tender.
- Jumlah pengumuman tender yang didistribusikan dan metode distribusi yang digunakan.
- Jumlah pengumuman tender yang mendapatkan respon dari penyedia barang/jasa.
- Waktu (orang /waktu) yang dibutuhkan untuk mereview penawaran tender dari penyedia barang/jasa.

b) Tahapan Pengadaan

Evaluasi dimaksudkan untuk membantu mengurangi waktu yang digunakan dalam proses pengadaan serta meningkatkan kepatuhan terhadap kontrak. Evaluasi tersebut antara lain:

- Jumlah penyedia barang/jasa yang mengakses sistem *e-Procurement*.
- Jumlah penyedia barang/jasa yang tersedia dalam system.
- Jumlah permintaan pembelian yang diproses.
- Waktu yang digunakan untuk memproses permintaan pembelian.
- Waktu rata-rata yang digunakan untuk memenuhi permintaan pembelian.

c) Tahapan pembayaran

Dalam tahapan pembayaran yang dievaluasi adalah :

- Jumlah tagihan dan nilai tagihan yang diselesaikan per bulan.
- Persentase total pengeluaran.
- Persentase jumlah tagihan yang telah dibayar.
- Ketepatan waktu pembayaran.
- Kesesuaian nilai dan jumlah pembayaran dengan pesanan pembelian.

Selain dengan *spend analysis* dan evaluasi atas setiap tahapan dalam *e-procurement*, juga dilakukan analisis efektifitas biaya (*Cost-effectiveness*) atas

penggunaan *e-Procurement* untuk meningkatkan kapabilitas dan manfaat pelaksanaan *e-Procurement* dan meningkatkan manfaat yang diperoleh penyedia barang.

2.5.3 Singapura

Dari 145 negara yang disurvei, Singapura menduduki peringkat lima dengan nilai Corruption Perceptions Index (CPI) 9,3; skala nilainya dari 0-10 (Suprayoga, 2009). Nilai 0 adalah negara paling korup, sedangkan nilai 10 adalah negara paling bersih dari korupsi. Sementara China menduduki peringkat 68 dengan nilai CPI 3,4. Dari data-data tersebut dapat diambil simpulan bahwa Singapura yang cukup maju dalam pengembangan *Information and Communication Tecnology* (ICT) atau Telematika itu berhasil menjadi pemerintah yang bersih, yang di antaranya melakukan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*.

Pembangunan infrastruktur dan telekomunikasi telah dilakukan sejakwala 1980. Tahapan-tahapan pembangunannya dapat dibagi atas 4 tahap yaitu, awal tahun 1980, pertengahan 1980, awal 1990 dan akhir 1990. Tahapan pertama awal 1980 diawali dengan kemampuan penggunaan komputer tanpa kertas. Tahapan kedua, pertengahan 1980 menghubungkan antar instansi pemerintah dan sekolah, kemudian memperkenalkan jaringan informasi perdagangan, jaringan informasi hokum, dan jaringan informasi kesehatan. Jaringan informasi pengadaan telah mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses pengadaan barang/jasa. Tahapan ketiga, awal 1990 Singapura mendeklarasikan *Intelegent Island*, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi yang kemudian dikenal dengan IT 2000. Tahapan akhir, akhir 1990 programnya disebut dengan *infocomm 21* yang mempersiapkan Singapura dalam menghadapi era global.

Wu Choy Peng (2001) menyatakan bahwa visi dari Pemerintah Singapura dalam kaitan dengan *e-Procurement* diharapkan untuk bisa mewujudkan *e-Government* ke arah pelayanan lebih baik dalam era ekonomi digital. *e-Government* sebagai rencana melalui lima percobaan strategis, dan enam program strategis yang tidak hanya mencakup penyebaran *e-services* tetapi

juga merubah *mindset* untuk seluruh departemen negara, lembaga yang berhubungan dengan sektor publik.

Web pemerintah berisi tentang *e-Government* yang telah terintegrasi dengan keperluan publik. Jasa layanan elektronik, merupakan tindak lanjut dari rencana program *e-auction*, yang merupakan kerangka hubungan kritis antara tiga komponen yaitu: warganegara dan pemerintah, karyawan (pegawai sipil dan karyawan sektor publik) dan pemerintah, dan pemerintah dengan dunia bisnis.

Ada tiga sasaran pokok yang sedang dikembangkan untuk mencapai program *Government to Bussines* yaitu :

- a) pertama, akan diupayakan suatu masukan pertama untuk jasa mengakses *Government to Bussines*, yang diorganisir di dalam suatu layanan jasa berupa web yang menyediakan informasi bisnis.
- b) kedua adalah monitoring mendalam terhadap jasa *Government to Bussines* dan mendorong agar semua kegiatan dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi untuk memotong hubungan antara pemerintah dan rekanan kerja pemerintah.
- c) ketiga, jasa elektronik harus mampu mempersingkat waktu

E-services Government to Bussines dapat digolongkan dalam dua area luas yaitu :

- a) Pengadaan dengan pemerintah, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti e-procurement
- b) Bagaimana e-services bisa digunakan untuk mempromosikan produktivitas yang lebih besar dan efisiensi, kenyamanan bisnis dalam rangka transaksi dengan pemerintah.

Government to Bussines dipertimbangkan untuk menjadi suatu pusat untuk para penyedia jasa untuk mengakses semua pengadaan untuk sektor publik dan untuk berdagang secara elektronik dengan pemerintah, berupa pengunduhan dokumen dan pembayaran secara elektronik. *Government to Bussines* juga akan meningkatkan kemampuan untuk mendukung program *e-Procurement*. *Government to Bussines* merupakan solusi terintegrasi untuk melaksanakan aktivitas pengadaan, dari pengumuman lelang, memperoleh pemenang lelang dan pengumuman pemenang secara elektronik. *Government to Bussines* adalah suatu solusi yang menyertakan sektor publik dan sektor penyedia jasa.

Sistem *Government to Bussines* meliputi tiga komponen:

- a) *Government to Bussines* merupakan sistem intranet yang dapat diakses oleh pegawai pemerintah untuk melaksanakan aktivitas pengadaan. Mereka dapat mengumumkan pengadaan hingga mendapatkan penyedia jasa.
- b) Penyedia jasa dapat mengakses *e-Procurement* melalui web.
- c) *Government to Bussines* akan memudahkan pembayaran elektronik.

2.5.4 Jepang

Pemerintah Jepang mengembangkan “*e-Japan Strategy*” dengan maksud untuk menjadikan Jepang sebagai bangsa yang maju dalam bidang IT dan pada tahun 2005 telah dibuat upaya untuk mencapai sasaran dimaksud. Salah satu upaya itu adalah komputerisasi di sector pekerjaan umum/public terfokus pada “*CALS EC*” (*CALS: Continous Asquisition Life Cycle Support, EC: Electronic Commerce*) untuk pencapaiannya. (Kamotu Minoru, 2006), menyatakan bahwa trend tersebut adalah untuk menuju pada informasi dan komunikasi komunitas masyarakat yang maju. Outline program aksi dari CALS/EC ditampilkan pada table berikut :

Tabel 2.3 Outline Program Aksi CALS/EC

Tahap I 1996-1998	Tahap 2 1992-2001	Tahap 3 2002-2004	2010
<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan lingkungan yang tepat bagi pemakaian internet. • Awal dari test verifikasi 	Pelaksanaan dari e-procurement pada sejumlah kecil pelaksana konstruksi	Realisasi dari CALS/EC pada seluruh pekerjaan proyek	Realisasi dari CALS/EC di semua organisasi public termasuk pemerintah daerah

Sumber : (Minoru, 2006)

Sejak awal 1996, MLIT (*Ministry of Land, Infrastructure and Transport*) mempromosikan CALS/EC untuk bidang konstruksi, pelabuhan dan fasilitas bandara. “ CALS/EC Action Program” didirikan pada maret 2002, telah melakukan pelaksanaan total dari e-bidding dan pengiriman elektronik, meluncurkan kontrak elektronik, tersedia bagi distribusi data *optical fiber*, pembentukan aliran kerja elektronik (*electronic work flow system*), dan lain-lain sebagai sasaran bagi tahap 3.

Manfaat dari e-bidding adalah system memungkinkan peserta lelang berpartisipasi dalam lelang dari kantornya masing-masing dimana akan mengurangi waktu, biaya dan pekerja yang terlibat didalamnya. Hasil lain adalah lebih banyak penyedia jasa yang berpartisipasi dalam tender pada harga yang lebih layak sesuai dengan prinsip dari kompetisi tersebut. Isu utama dari e-bidding adalah jaminan keamanan pemenang lelang. Untuk mencegah dalih (*pretense*), pertukaran dan penyangkalan, digunakan teknologi “*electronic certification*”.

Sampai tahun 2006, teknologi sertifikasi membawa manfaat karena kunci sandi public (*public cryptography*), dimana teknik sandi menggunakan pasangan kunci (*pair of keys*), kunci public dan kunci pribadi (*public key and private key*), bekerja sebagai metode yang lebih maju dari sertifikat elektronik (*electronic certification*) pada sistem tender MLIT. Dengan begitu peserta tender tidak perlu khawatir akan kejahatan-kejahatan di internet yang menggunakan *IC Cards*.

2.6 Critical Success Factor (CSFs) .

Tercapainya pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien merupakan salah satu dari indikasi keberhasilan penerapan *e-Procurement*. Faktor penentu keberhasilan atau *Critical Success Factor* (CSFs) merupakan faktor yang menentukan keberhasilan dari segala jenis kegiatan yang dilakukan oleh organisasi oleh eksekutif. Keberhasilan adalah hasil dari suatu strategi dan usaha, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut (Teddy,2006). Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kesuksesan dalam pelaksanaan penerapan *e-Procurement* juga perlu strategi dan usaha .

Beberapa *critical success factor* dalam implementasi *e-procurement* adalah (Teddy,2006) :

a) Penerimaan dan pelatihan *end-user*

Pelatihan terhadap pihak yang terlibat mutlak diperlukan karena merupakan langkah awal pelaksanaan penerapan *e-Procurement* dapat berjalan secara optimal. Pelatihan diberikan kepada pengguna jasa, dan sekretariat layanan . Keterlibatan orang - orang yang berkompeten dalam bidangnya secara *full time*, hal ini adalah agar lebih fokus.

b) Adopsi rekanan

Rekanan merupakan salah satu elemen yang tidak dapat ditinggalkan dalam penerapan *e-Procurement*. Oleh karena sosialisasi dan pelatihan terhadap rekanan mutlak dilakukan sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan sistem baru.

c) Integrasi sistem

Selain itu sistem yang dipakai harus dapat mengakomodir semua tata cara pelaksanaan pelelangan barang/jasa sebagaimana yang termuat dalam Keppres nomor 80 tahun 2003.

d) Rekayasa ulang proses

Jadwal yang realistik dan tetap harus selalu di monitor perkembangan dan kemajuannya.

e) Dukungan pimpinan

Dukungan dan komitmen dari pimpinan sangat di butuhkan dari sebelum project dimulai sampai setelah project selesai atau sudah .Dukungan harus sampai setelah project selesai, hal ini di perlukan agar semangat pengembangan dan ke ikut sertaan dari semua yg terlibat terus berakar.

f) Pengukuran kinerja

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan *e-Procurement* harus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan ini maka diharapkan masalah yang timbul dapat diketahui dengan cepat dan didapatkan solusi yang aplikatif sehingga peningkatan kinerja dapat tercapai.

g) Strategi implementasi.

Strategi implementasi juga diperlukan agar pelaksanaan *e-Procurement* dapat berjalan secara optimal. Solusi dalam menghadapi masalah yang terjadi selama implementasi harus menjadi koreksi dalam implementasi.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian (riset) ilmiah adalah kegiatan untuk mencari kebenaran suatu masalah. Untuk itu diperlukan metode penelitian yang tepat untuk menunjang kelancaran selama proses penelitian ini berlangsung. Pada bab ini, selanjutnya akan dibahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis yang berisi penjelasan mengenai kerangka berpikir dan hipotesis, pertanyaan-pertanyaan penelitian, metode penelitian, kerangka penelitian, metode analisis penelitian yang dilanjutkan dengan validasi penelitian.

3.1 Kerangka Pemikiran

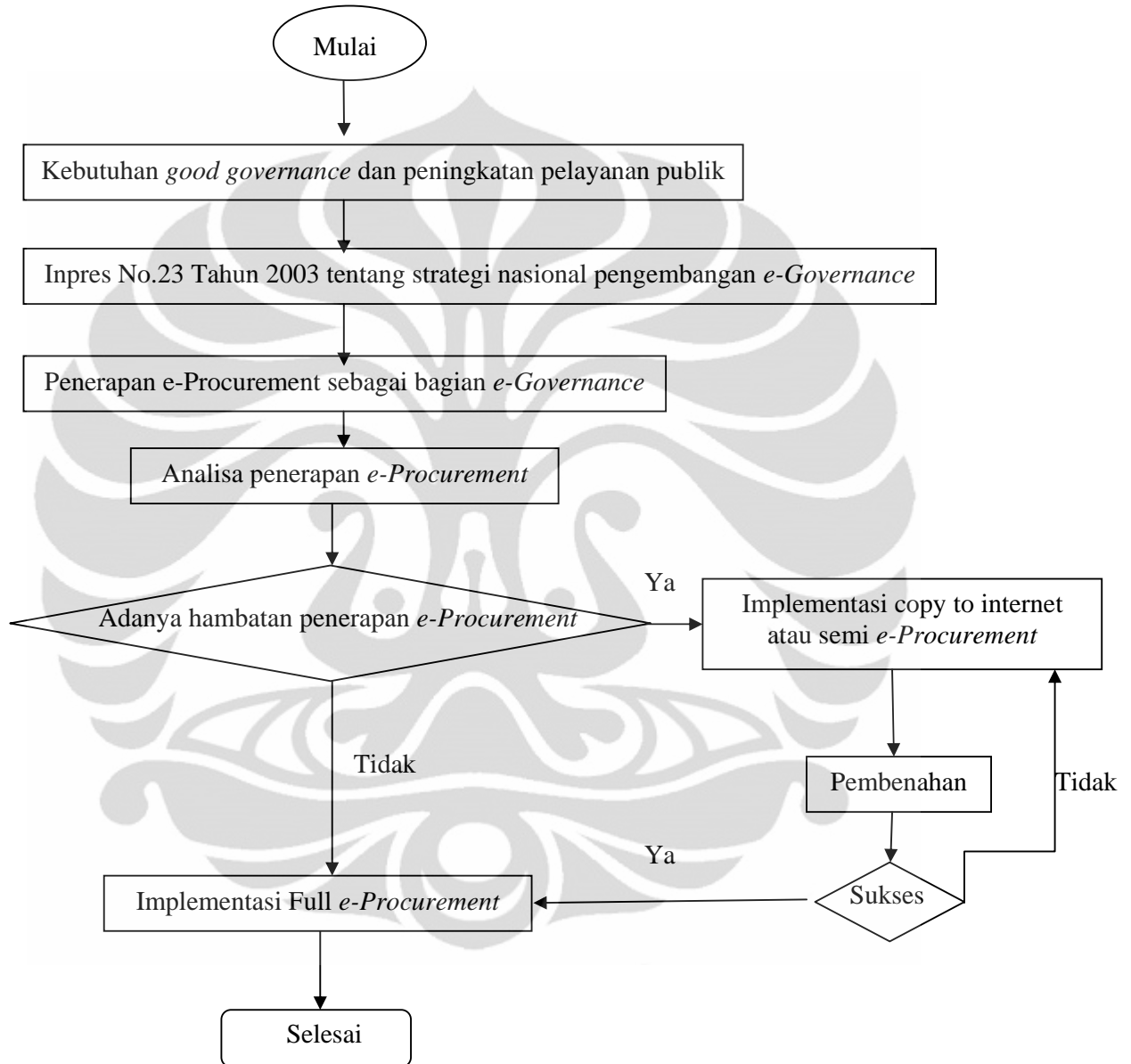
Usaha pencarian dan penyelidikan terhadap pengetahuan baru atas permasalahan yang terjadi merupakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam sebuah penelitian. Sebuah penelitian dilakukan dalam suatu hubungan, karena merupakan hal penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor hubungan tersebut dengan data-data yang diperoleh.

Penelitian ini didasarkan akan pemenuhan terhadap kebutuhan *good Governance* dan peningkatan pelayanan publik sebagaimana yang termuat dalam Inpres No.23 Tahun 2003 tentang strategi nasional pengembangan *e-Governance*. Dimana penerapan *e-Procurement* merupakan salah satu bagian dari *e-Governance*.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penerapan *e-Procurement* dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Pemerintah Kota Bogor. Dimana, *e-Procurement* merupakan langkah awal yang positif untuk mengefisienkan semua proses pengadaan berbagai keperluan pemerintah dan lembaga negara, termasuk BUMN, dan sekaligus melakukan penghematan, serta menghindari kemungkinan terjadinya tidak korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya.

Mengkaji implementasi dari Keppres No. 80 Tahun 2003 menjadi tantangan akademis terhadap penyelenggaraan lelang secara elektronik pada Pemerintah Kota Bogor, dimana terdapat dinamika yang sangat menarik dalam

kurun waktu tahun 2007-2009, menunjukkan kompleksitas permasalahan dalam penerapan *e-Procurement*. Secara garis besar langkah penerapan *e-Procurement* ini digambarkan dalam diagram berikut :



Gambar. 3.1 Langkah Penerapan *e-Procurement*

3.2 Hipotesis

Berdasarkan kajian literatur diatas dapat diperoleh suatu hipotesa penelitian,yaitu :

- a) Penerapan sistem *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, namun pada penerapannya baru pada tahap semi *e-Procurement*.
- b) Dengan adanya penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor maka manfaat yang diperoleh adalah :
 - Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara transparan, adil, dan persaingan sehat.
 - Masyarakat luas dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi.
- c) Penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor masih terkendala berbagai hambatan, diantaranya adalah :
 - Adanya keraguan sebagian orang akan sistem *e-Procurement* yang masih baru.
 - Lembaga lain, SDM dan infrastruktur yang berhubungan dengan *e-procurement* belum memadai.

3.3 Pertanyaan Penelitian

Dapat diminimalisirnya hambatan dalam penerapan *e-Procurement* merupakan indikasi keberhasilan penerapan *e-Procurement*. Berdasarkan hipotesa tersebut, maka pertanyaan utama yang muncul dan dijadikan "*research question*" adalah:

- a) Bagaimana gambaran pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-Procurement*) di Pemerintah Kota Bogor?
- b) Potensi manfaat apa saja yang diperoleh dari implementasi *e - Procurement* di Pemerintah Kota Bogor?
- c) Faktor-faktor yang menghambat dan dapat menyebabkan kegagalan dari implementasi *e - Procurement* di Pemerintah Kota Bogor?

3.4 Metode Penelitian

Untuk memilih suatu metode, hal yang penting untuk diketahui adalah metode tersebut dapat membantu mengetahui hubungan semua variabel-variabel,

mekanismenya dan jumlah dari faktor pengaruh yang kuat. Pemilihan metode penelitian dilakukan agar proses pelaksanaan penelitian dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pada pemilihan metode penelitian adalah jenis pertanyaan yang digunakan, kendala terhadap peristiwa yang diteliti dan fokus terhadap peristiwa yang sedang berjalan atau baru diselesaikan (Yin, 1994).

Data dikumpulkan melalui studi langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan deskriptif, wawancara dan penyebaran kuesioner. Kuisisioner disebar kepada kepada pengguna jasa, sekretariat layanan, dan panitia lelang. Responden dari pengguna jasa adalah profesional yang berpengalaman menjadi panitia tender dan mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa. Data juga didapat dari penyebaran kuesioner kepada sekretariat layanan, dimana direncanakan kepada tim *e-Procurement* yang menangani pelelangan.

Pada tahap awal, disusun pertanyaan-pertanyaan kuesioner dan draft kuesioner dikonsultasikan kepada beberapa profesional untuk di verifikasi, klarifikasi dan validasi hingga didapatkan bentuk kuesioner yang dianggap tepat sebagai alat pengumpul data. Adapun pakar yang dipilih untuk melakukan validasi tersebut adalah mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a) Dari kalangan akademisi, birokrasi, yang berkompeten terhadap penerapan *e-Procurement*.
- b) Pendidikan minimal S1 dengan pengalaman professional minimal 10 tahun.

Pengumpulan data kuesioner akan menggunakan :

- a) Media surat-menyurat, pertanyaan dan jawaban kuesioner dikirimkan lewat email.
- b) Diantarkan dan diambil langsung ke responden.
- c) Kombinasi dari media surat-menyurat dan antar-ambil langsung.

3.5 Kerangka Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan studi kasus pada Pemerintah Kota Bogor dengan meninjau lebih dalam tentang penerapan pelaksanaan pemilihan

penyedia barang/jasa secara elektronik. Adapun tahap-tahap pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Pada tahap awal ditemukan masalah yaitu bahwa penerapan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Bogor belum dapat dilaksanakan secara optimal. Indikasi ini terlihat karena sempat dihentikannya proses penerapan *e-Procurement* pada tahun anggaran 2008.
- b) Pemahaman permasalahan ini terjadi didapatkan dari survei literatur (selain dasar teori) sehingga pada tahap selanjutnya masalah dapat diidentifikasi dan dilanjutkan dengan penetapan judul.
- c) Hipotesa ada setelah tahap identifikasi masalah, penetapan judul, dan survei literatur. Dari survei literatur dikumpulkan penelitian-penelitian yang relevan.
- d) Manfaat dan kontribusi perlu dirumuskan agar penelitian memenuhi harapan dari segi pelaporan dimana supaya memberi manfaat untuk memberikan deskripsi dan eksplanasi bagi yang membaca. Segi evaluatif merupakan efek kelanjutan karena dari tinjauan deskriptif dan ekplanasi, dapat ditarik suatu kesimpulan evaluatif.
- e) Metodologi disusun untuk memberi arah penelitian.
- f) Data primer dan sekunder dikumpulkan dan dianalisa.
Data primer adalah data dari wawancara terhadap narasumber, dan kuesioner dimana akan didapatkan bukti akan kondisi dilapangan (kesiapan dan apresiasi penyedia jasa), dan pendapat panitia tender (akan kondisi yang ada, pelaksanaan *e-Procurement*, manfaat dan hambatan). Sedangkan data sekunder adalah modul *e-Procurement*, materi sosialisasi dan penelitian-penelitian relevan yang telah dipublikasikan.
- g) Analisa bukti studi kasus :

- Strategi : Preposisi Teoritis

Tujuan dan desain asal studi kasus diperkirakan berdasar atas proposisi semacam itu, yang selanjutnya mencerminkan serangkaian pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka, dan pemahaman-pemahaman baru (Yin, 2006).

- Bentuk analisis dominan : Penjodohan Pola

Logika seperti ini membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif). Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan (Yin, 2006)

- h) Pengolahan data kuesioner dilakukan dengan pembuatan tabel dan pemakaian program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS).
- i) Hipotesa dapat diketahui kebenarannya dan didapatkan kesimpulan awal.
- j) Analisa harus divalidasi dengan cara membandingkan hasil analisa dengan pendapat para pakar penelitian yang telah dipublikasikan (studi literatur) dan wawancara dengan pihak yang berpengalaman dalam pelelangan.
- k) Temuan dan kesimpulan akhir didapatkan dilanjutkan dengan penulisan hasil penelitian. Bentuk hasil penelitian dipilih struktur analitis linear. Struktur analitis linear adalah pendekatan standar untuk mengarang laporan penelitian. Urutan sub-sub topiknya mencakup isu atau persoalan yang akan diteliti, metode yang digunakan, temuan dari data yang dikumpulkan dan dianalisis, dan konklusi-konklusi serta implikasi-implikasi dari temuan tersebut (Yin, 2006).

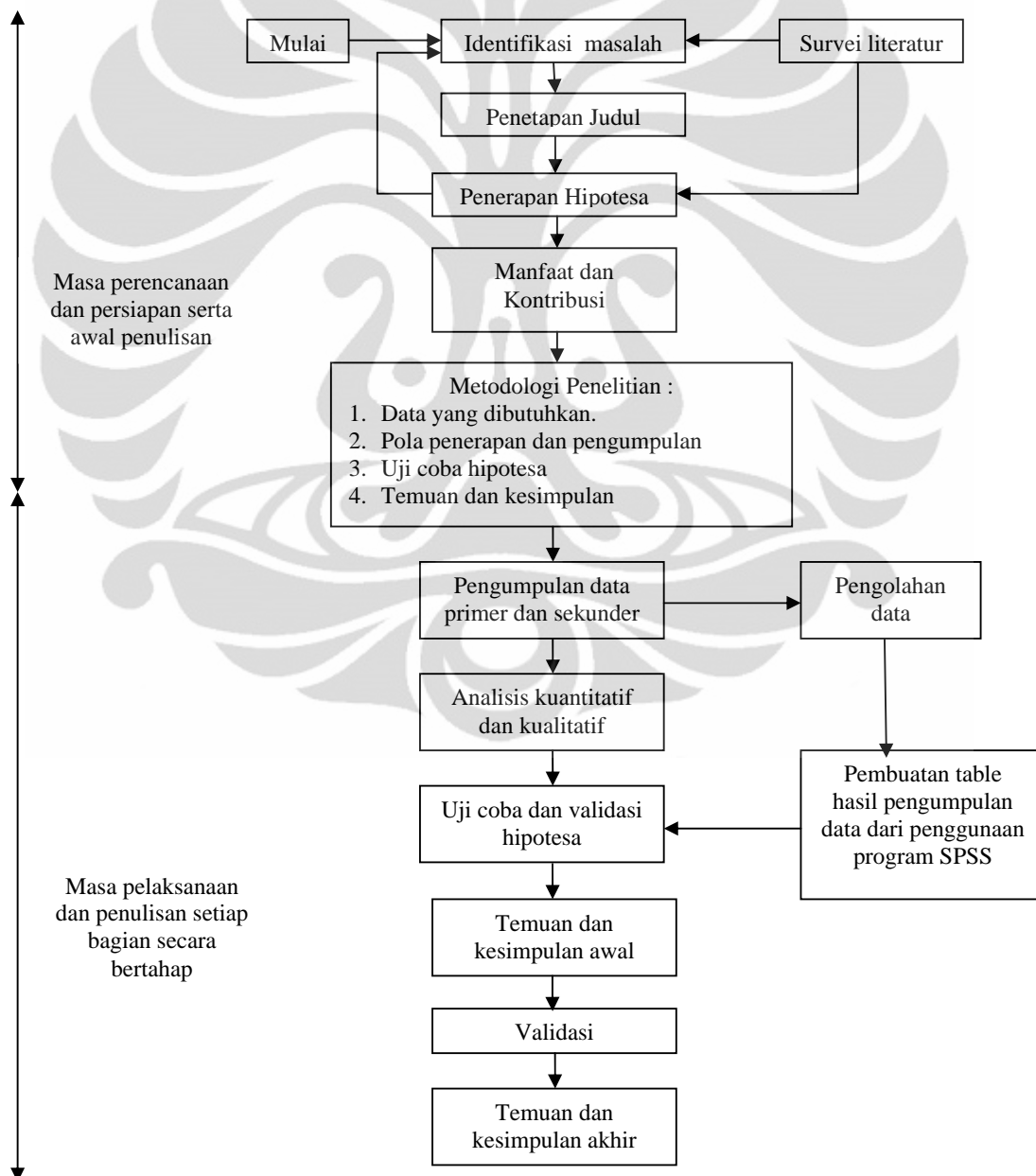
Pada penulisan laporan, penulis terlebih dahulu mengawali dengan penyajian data-data penerapan *e-Procurement*, bagaimana tahapan proses pelaksanaan pelelangan pada Pemerintah Kota Bogor, hasil kuesioner yang disebar dan wawancara (bab IV). Kemudian pada bab V isi dari sub-subnya akan mencakup :

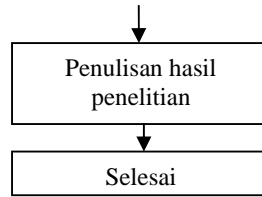
- Gambaran pelaksanaan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor.
- Manfaat dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem *e-Procurement*.

- Metode yang digunakan (apa merupakan komparasi dengan penelitian yang relevan, kuesioner, atau wawancara) dan temuan apa saja dari data tersebut dan analisisnya. Disini bentuk analisis penjodohan pola dipakai.
- Kesimpulan serta maksud dari temuan tersebut.

1) Penelitian selesai setelah semua tahap penelitian dikerjakan.

Adapun tahapan-tahapan penelitian yang ditempuh untuk mencapai penelitian diterangkan pada gambar 3.2 berikut :





Gambar. 3.2 Alur Proses Penelitian

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 1998). Variabel yang diteliti dibedakan kedalam dua kategori, yaitu :

- a) Variabel tak bebas, yaitu merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Juga sering disebut variabel terikat, variabel respons atau endogen (Arikunto, 1998).
- b) Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain (variabel dependen). Juga sering disebut dengan variabel bebas, prediktor, stimulus, eksogenous atau antecedent (Arikunto, 1998).

Variabel untuk pertanyaan penelitian pertama termasuk dalam skala minimal, karena variabel pertanyaan hanya membedakan satu kategori dengan kategori lainnya. Variabel untuk pertanyaan penelitian kedua, ketiga, keempat dan kelima termasuk dalam skala ordinal, karena variabel penelitian menunjukkan tingkatan atau urutan dari kategorinya (Kountour, 2007). Variabel penelitian berdasarkan teori dari beberapa referensi atau literatur yang relevan dengan permasalahan. Adapun kategori variabel penelitian terdiri dari 3 kategori sebagai berikut :

- a) Kriteria Proses pelaksanaan .
Bagaimanakah proses penerapan lelang secara elektronik, tahapan-tahapan sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.
- b) Kriteria manfaat.
Kriteria manfaat yang meliputi waktu, biaya, strategi, hubungan dengan penyedia jasa, dan organisasi internal.

c) Kriteria hambatan.

Kriteria hambatan yang meliputi hambatan internal dan eksternal.

Sedangkan untuk memeriksa keabsahan penelitian dilakukan validasi oleh pakar konstruksi yang berkompeten dalam bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik sekaligus menetapkan variabel penelitian yang diadakan (Adam, 2007). Lebih lanjut variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Hambatan dari penerapan sistem <i>e-Procurement</i>				
No	Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator	Referensi
1	Hambatan	Harga	Implementasi harga	Hawking, Stein, Wyld, Foster (2004)
		Teknologi	Infrastruktur kurang memadai	Hawking, Stein, Wyld, Foster (2004)
			Kurang memadainya infrastruktur penyedia jasa	Hawking, Stein, Wyld, Foster (2004)
			Kurangnya pengintegrasian hubungan dengan penyedia jasa	Hawking, Stein, Wyld, Foster (2004)
			Keamanan	Hawking, Stein, Wyld, Foster (2004)
			Kurangnya kemampuan personal	Hawking, Stein, Wyld, Foster (2004)
		Fokus organisasi internal	Budaya organisasi pengguna jasa	Hawking, Stein, Wyld, Foster (2004)
			Tidak cukupnya proses bisnis untuk mendukung <i>e-Procurement</i>	Hawking, Stein, Wyld, Foster (2004)
			Tidak cukupnya solusi <i>e-Procurement</i>	Hawking, Stein, Wyld, Foster (2004)

Tabel 3.1 Sambungan
Variabel Penelitian

Hambatan dari penerapan sistem <i>e-Procurement</i>				
No	Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator	Referensi
1	Hambatan	Fokus organisasi internal	Dukungan manajemen dari organisasi yang lebih tinggi.	Hawking, Stein, Wyld, Foster (2004)
		Fokus hubungan dengan penyedia jasa	Hubungan dengan penyedia jasa	Hawking, Stein, Wyld, Foster (2004)
		Fokus eksternal	Hukum dan undang-undang yang mengatur	Hawking, Stein, Wyld, Foster (2004)

3.5.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian juga disebut sebagai alat ukur dalam penelitian (Sugiyono, 2008). Jumlah instrumen penelitian tergantung pada proses penelitian yang dilakukan. Instrumen yang diperlukan untuk proses penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya diatas adalah :

- a) Instrumen untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan validasi variabel penelitian.
- b) Instrumen untuk mengukur persepsi para responden mengenai faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi penerapan *e-Procurement*.
- c) Instrumen untuk mengetahui rekomendasi tindakan pencegahan dan koreksi yang dilakukan.
- d) Instrumen untuk melakukan validasi hasil temuan.

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa wawancara dan kuesioner. Teknik wawancara (metode kualitatif) dalam

penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2000). Parameter umum yang perlu ditentukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian, siapa yang akan diobservasi dan diwawancara, dan proses melibatkan diri dengan narasumber.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data primer untuk menjawab tujuan penelitian pertama dan kedua yang berupa kata-kata, tindakan, data tertulis dan gambar yang diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan partisipan dan bahan-bahan tertulis. Pengumpulan data sekunder, caranya melalui pencarian bahan-bahan pendukung seperti referensi, foto, data statistik, kebijakan dan aturan tertulis lembaga.

Sedangkan untuk menjawab tujuan penelitian ketiga maka data didapat dengan menyebarkan kuisisioner. Kuisisioner ini didesain dalam bentuk skala likert dengan pilihan alternative jawaban yang harus dipilih salah satu diantaranya sebagai jawaban yang paling tepat (Nawawi, 1995). Dalam membuat skala peneliti mengasumsikan terdapatnya suatu kaitan yang nyata dari sifat-sifat tertentu. Misalnya dalam persetujuan terhadap sesuatu, terdapat suatu kaitan dari “paling setuju” sampai “paling tidak setuju”, dimana kaitan tersebut disesuaikan dengan bentuk pertanyaan pada setiap penelitiannya (nazir, 1983).

Pertanyaan pada kuisisioner dibuat berdasarkan variabel penelitian hasil validasi pakar. Pertanyaan menyangkut hal-hal yang menjadi hambatan dari penerapan sistem *e-Procurement*.

3.5.2.1 Format Wawancara Terhadap Narasumber

Adapun format pengumpulan data yang digunakan untuk wawancara terstruktur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Form Wawancara Terhadap Narasumber

Form Wawancara	
Bagian I : Data Umum	
1. Nama Instansi	:
2. Alamat	:
3. Responden	:
Nama	:
Jabatan	:
Bagian	:
Bagian II : Penerapan e-Procurement	
1. Sejak tahun berapakah <i>e-Procurement</i> mulai diterapkan pada Pemerintah Kota Bogor?	
2. Q ₂ ?	
3. Q ₃ ?	
4. dan seterusnya	
Bogor, November 2009	
TTD Narasumber	

Format kuesioner lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 2

3.5.2.2 Format Kuesioner Responden

Contoh format kuisisioner penelitian untuk responden yang digunakan dalam survei penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Format Kuisisioner

NO	Indikator Hambatan	Pertanyaan	ST S	T S	R R	S	S S
1.a	Faktor internal	Perlu adanya training untuk menerapkan sistem <i>e-Procurement</i> .					
1.b		Budaya organisasi pengguna jasa yang tidak mendukung					
Qc						
Qd						

Format kuesioner lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 3

3.5.2.3 Format Kuesioner Validasi Pakar

Contoh format kuisisioner penelitian untuk validasi pakar yang digunakan dalam survei penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Format Validasi Kuisisioner Penelitian

Hambatan dari penerapan sistem <i>e-Procurement</i> pada Pemda Dati II						
No	Variabel penelitian	Indikator	Sub indikator	Penilaian		Keterangan
				ya	tidak	
1	Hambatan	Faktor internal	Perlu adanya training untuk menerapkan sistem <i>e-Procurement</i> .			
2			Q2.....			

3.5.3 Penentuan Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini didapatkan dari pihak yang terkait langsung dengan penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor. Diantaranya adalah pengguna jasa dan sekretariat layanan. Pemilihan sumber ini berdasarkan asumsi bahwa mereka adalah pihak-pihak yang intens terlibat dalam kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik pada Pemerintah Kota Bogor.

3.5.4 Pengumpulan Data Penelitian

Cara untuk memperoleh data-data adalah sebagai berikut :

a) *Field Reserch*

Yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan penyelidikan langsung pada organisasi yang diteliti.

b) Wawancara (*interview*)

Dalam hal ini dilakukan wawancara secara langsung dengan pihak terkait penerapan *e-Procurement*.

c) Kuesioner

Tehnik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa macam pertanyaan secara logis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna.

d) Observasi

Yaitu pengamatan langsung yang dilakukan terhadap objek yang diteliti.

3.6 Metode Analisis Data Penelitian

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas diartikan sebagai pengujian untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu test atau instrument penelitian dapat dinyatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Saifuddin, 1997).

Uji validitas atau kesahihan digunakan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur mampu melakukan fungsinya. Alat ukur yang dapat digunakan dalam pengujian validitas suatu kuesioner adalah angka korelasi antara skor pernyataan dan skor keseluruhan pernyataan responden terhadap informasi dalam kuesioner (Triton, 2005).

Pengujian validitas data dilakukan dengan alat bantu software SPSS dengan menggunakan angka r hasil *CorrecedItem Total Correlation* melalui sub menu *Scale* pada pilihan *Reability Analisis*.

3.6.2 Analisis Komparatif

Analisis komparatif digunakan untuk menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan (Sugiyono, 2001). Analisis komparatif ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan diantara responden dalam memberikan penilaian terhadap pertanyaan-pertanyaan kuisisioner. Sementara nilai yang digunakan dalam pengujian komparatif dengan metode koreksi adalah hasil nilai *Asymp Sig* yang didapat. Apabila nilai *Asymp Sig* lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan signifikan diantara responden dalam memberikan jawaban (Triton, 2006). Analisis komparatif dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS.

3.6.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran secara kualitatif mengenai manfaat dan hambatan penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor. Statistik deskriptif adalah suatu metode yang mempelajari cara penyajian suatu gambaran informasi inti dari sekumpulan data yang ada, misalnya pemusatan data dan kecenderungan suatu gugus data (Sugiyono, 2001). Penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. Dalam penelitian ini digunakan ukuran nilai pusat modus dengan metode distribusi asumsi untuk mencari faktor-faktor apa saja yang menentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Responsi dianalisis untuk mengetahui item-item yang sangat nyata antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala total. Misalnya, response responden pada upper 51 persen dan lower 51 persen dianalisis untuk melihat sampai seberapa jauh tiap item dalam kelompok nilai yang berbeda pada setiap skala ukur penilaian terhadap variabel-variabel yang mendukung (Nazir, 1983). Item-item yang tidak menunjukkan hubungan dengan hasil skor dibuang, atau tidak menunjukkan beda yang nyata apakah masuk dalam skor tinggi atau rendah juga dibuang untuk mempertahankan konsistensi pertanyaan.

3.7 Validasi Hasil Penelitian

Setelah melakukan analisis data penelitian, maka tahap selanjutnya adalah melakukan validasi hasil penelitian kepada pakar jasa konstruksi yang kompeten dalam bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk memastikan apakah hasil penelitian yang diperoleh relevan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kriteria pakar konstruksi yang memvalidasi hasil penelitian ini, ditentukan berdasarkan jumlah pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan reputasi dalam bidang jasa pengadaan barang/jasa yang sudah dijelaskan sebelumnya.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

Obyek penelitian dari studi ini adalah Pemerintah Kota Bogor yang telah melaksanakan program *e-Procurement* di lingkungan pemerintahannya. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung, kuisisioner dan wawancara mendalam terhadap *stakeholders* di Sekretariat Layanan *e-Procurement*, yang mengetahui dengan baik proses terlaksananya *e-Procurement* di Pemerintah Kota Bogor. Hasil data primer yang diperoleh melalui wawancara dilengkapi dengan pengamatan deskriptif yang dilakukan di lingkungan kerja Sekretariat Layanan *e-Procurement* Pemerintah Kota Bogor. Pengamatan tersebut dilakukan untuk melihat kegiatan pelayanan yang dilakukan termasuk proses perjalanan *e-Procurement* di *back office*. Pelengkap utama yang dibutuhkan dalam studi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku Laporan Tahunan *e-Procurement* Pemerintah Kota Bogor, Materi Sosialisasi *e-Procurement*, Modul-modul *e-Procurement* dan berita-berita di media cetak dan elektronik terkait pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Bogor. Selain itu data juga didapatkan dengan menyebarkan kuisisioner terhadap panitia lelang dan tim *e-Procurement*.

4.1 Gambaran Pelaksanaan Lelang Secara Elektronik (*E-Procurement*) Di Pemerintah Kota Bogor

Aplikasi sistem *e-Procurement* dikembangkan dari prosedur lelang yang ada pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan cara ini para *user* (panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa) akan dipaksa mengikuti tahapan lelang sebagaimana regulasi yang berlaku. Bagi *user* yang belum begitu mengetahui aturan lelang akan terjaga dari kemungkinan salah prosedur.

Pelelangan dengan sistem *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor dapat diakses melalui portal yang beralamat di www.eprocotabogor.go.id. Dalam pelaksanaannya, sejak tahun 2007 portal ini telah mengalami beberapa kali

improvement yang disesuaikan dengan aturan dan perundangan yang berlaku serta kebutuhan pengguna *e-Procurement*.

4.1.1 Dasar Pemikiran

Salah satu solusi untuk memperbaiki proses pengadaan adalah melalui penerapan sistem elektronik. Dewasa ini, keinginan untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik semakin menguat di berbagai instansi, baik di pusat dan khususnya di daerah. Pada area Nasional, Bappenas mengadakan kerjasama dengan beberapa Propinsi untuk penggunaan sistem *e-Procurement*. Di tingkat Daerah, beberapa Kota/Kabupaten bahkan telah mulai menggunakan sistem ini beberapa tahun sebelumnya.

Kota Bogor berkembang menuju kota metropolitan dengan permasalahan perkotaan yang semakin rumit. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena dalam era reformasi ini tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik, lebih akuntabel, dan transparan sangatlah besar. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang fokus dan komprehensif agar permasalahan pelayanan publik tersebut dapat ditangani dengan semakin baik.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor berupaya melakukan terobosan-terobosan inovatif dalam pengelolaan anggaran dengan harapan dapat mewujudkan percepatan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan *e-Procurement* pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang merupakan salah satu kunci dari efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBD. Pilihan strategis ini diambil karena metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara konvensional dianggap kurang efektif, jadwal penyelesaian proyek tidak akurat, dan belum terakomodirnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pelaksanaan pembangunan.

4.1.2 Sasaran Penerapan

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis web di Kota Bogor dimulai pada Tahun 2007 yang bertujuan untuk mewujudkan *Clean Governance* di era reformasi dan merupakan rencana Pembangunan Daerah

khususnya Pemerintah Kota Bogor untuk mengutamakan transparansi serta keterbukaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis web pada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Bogor, bertujuan untuk membangun potensi inovasi-inovasi dan ide-ide baru, agar mudah di akses dalam penerapannya serta tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku, sehingga berbagai kegiatan di Kota Bogor dapat terlaksana sesuai dengan yang ditetapkan dalam program *e-Procurement* teknologi informasi yang berbasis web.

Sebagai salah satu sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik pemenuhan suatu kebutuhan untuk membantu pelaksanaan fungsi kerja Pemerintah dalam hal pengelolaan proses Pengadaan Barang dan Jasa secara *online* (berbasis internet), *e-Procurement* merupakan media yang sangat efektif untuk menekan pembiayaan proses lelang baik dari sisi Penyedia Barang dan Jasa maupun Pemerintah sebagai pengguna Barang dan Jasa.

4.1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang melandasi Pelaksanaan Pelelangan dengan melalui sistem *e – Procurement* di Pemerintahan Kota Bogor, adalah :

- a) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006
- b) Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- c) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*
- d) Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Dengan Sistem *e-Procurement*

4.1.4 Konsep dan Layanan

Sistem *e-Procurement* Kota Bogor dibangun untuk mewujudkan akuntabilitas publik dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Melalui *e-Procurement* perubahan dan perbaikan dilakukan terhadap prosedur lelang dengan cara:

- a) Menyediakan komunikasi online antar pihak berkepentingan, sehingga potensi pengaturan penawaran dapat ditekan;
- b) Mengubah persyaratan pemenuhan dokumen menjadi tidak harus dalam bentuk *hardcopy/paperless*, sehingga terjadi penghematan 80 persen biaya administrasi pelelangan dibanding dengan sistem pengadaan barang dan jasa secara konvensional.

Secara keseluruhan masyarakat mendapatkan keuntungan dengan akselerasi penyediaan pelayanan publik karena proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terencana dan terintegrasi antara Satuan Kerja.

Konsep layanan *e-Procurement* adalah membentuk *e-Marketplace* antara instansi pemerintah dengan penyedia barang dan jasa dengan memberikan:

- a) *Single Windows for Public Procurement*; yang mana sistem memberikan informasi pelelangan secara terintegrasi dan *one time* registration untuk penyedia barang dan jasa;
- b) *On line Transaction*; yang mana tahapan proses pelelangan dilakukan secara elektronik dan database sistem terhubung dengan pusat database berbagai pihak yang perlu dan bisa dirujuk.

Dalam prakteknya dengan melakukan login ke situs *e-Procurement* Kota Bogor semua *customer* (panitia pengadaan dan calon penyedia barang/jasa) dapat memproses semua tahapan lelang secara *online*.

Layanan *e-Procurement* yang dikembangkan secara online oleh pemerintah kota Bogor meliputi beberapa menu antara lain :

- a) Menu Instansi Pemerintah/Dinas/Satuan Kerja:
 - Pada menu ini bisa diperoleh informasi tahapan lelang dan eksekusi terhadap penawaran bersama penjelasannya
 - Pada menu ini vendor dapat mengetahui informasi mengenai paket pekerjaan, spesifikasi dan harga secara *online*

- b) Menu penyedia Barang dan Jasa:
 - Pada menu ini tersedia fasilitas untuk memilih pekerjaan dan
 - Fasilitas untuk memasukkan penawaran
- c) Menu Administrator Sistem :
 - Pada menu ini tersedia fasilitas untuk up date berita, informasi lelang dan lain - lain terkait dengan fasilitas layanan serta,
 - Fasilitas untuk memantau koneksi internet guna memastikan kualitas data yang akan di-transaksikan oleh para user sistem *e-Procurement*.

Para user (termasuk administrator sistem) akan diberi *user id* dan *password* guna memastikan bahwa antar user memang hanya menguasai akses data ke sistem sebatas data yang menjadi tanggung jawab dan haknya saja.

Selanjutnya pelaksanaan lelang tetap dilaksanakan oleh panitia lelang di tiap SKPD denaan memanfaatkan sistem informasi *e-Procurement* untuk menciptakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi informasi mengenai semua hal terkait proses lelang seperti dokumen pemilihan penyedia barang/jasa disediakan oleh unit kerja/panitia pengadaan.

4.1.5 Sumberdaya

Sumberdaya yang digunakan untuk menciptakan dan menjalankan sistem *e-Procurement* terdiri dari sumberdaya manusia dan infrastruktur penunjang.

4.1.5.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjalankan sistem *e-Procurement* dan pemeliharaan serta pengembangannya dilakukan oleh Sekretariat *e-Procurement* yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bogor di bawah Bagian Pengendalian Program. Jumlah tim adalah 15 orang, termasuk tenaga pendamping. Tim ini menjalankan tugasnya dengan prinsip - prinsip yang ada pada standar keamanan informasi, sehingga berbagai prosedur yang berhubungan dengan operasional dilakukan dengan cara tertutup dan diisolasi dari intervensi pihak - pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu Pemerintah Kota Bogor, juga terus berupaya meningkatkan kemampuan SDM melalui sosialisasi-sosialisasi dan pelatihan.

4.1.5.2 Infrastruktur Penunjang

Infrastruktur penunjang yang ada antara lain:

- a) Penyiapan server khusus untuk administrator *e-Procurement*. Berbagai fasilitas keamanan diletakkan pada perangkat utama server ini, termasuk *access control* ke server utama. Orang yang tidak mempunyai kewenangan tidak mendapatkan akses masuk ke ruangan-ruangan tertentu;
- b) Jaringan komputer (*Local Area Network*) antar unit di lingkup Instansi Pemerintah Kota Bogor untuk menunjang kinerja Panitia Pengadaan dari masing-masing Satuan Kerja;
- c) Menyiapkan *back-up server* data yang selalu identik dengan server induk di Pemerintah Kota Bogor (*Co-Location*) dan diletakkan di Diginet (*Digital Internet Exchange*) Jakarta sehingga terjamin keamanan dan kecepatan aksesnya.

4.1.6 Implementasi *e-Procurement* di Kota Bogor

Pada awal tahun 2007 Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dengan berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah mulai menerapkan *e-Procurement*. Proses registrasi perusahaan yang mengikuti pelelangan dan evaluasi kualifikasi perusahaan tersebut dilakukan melalui internet. Unsur utama pelaksanaan lelang secara elektronik adalah transparansi, efektifitas dan efisiensi. Tanggapan dan antusiasme dunia usaha terhadap program ini sangat beragam. Sekitar 588 badan usaha melakukan registrasi ke portal *e-Procurement* Kota Bogor dan berperan serta mengikuti pelelangan di tiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada tahun anggaran 2007. Namun terkait berbagai hambatan, pada tahun anggaran 2008 pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Bogor kembali dilakukan secara konvensional.

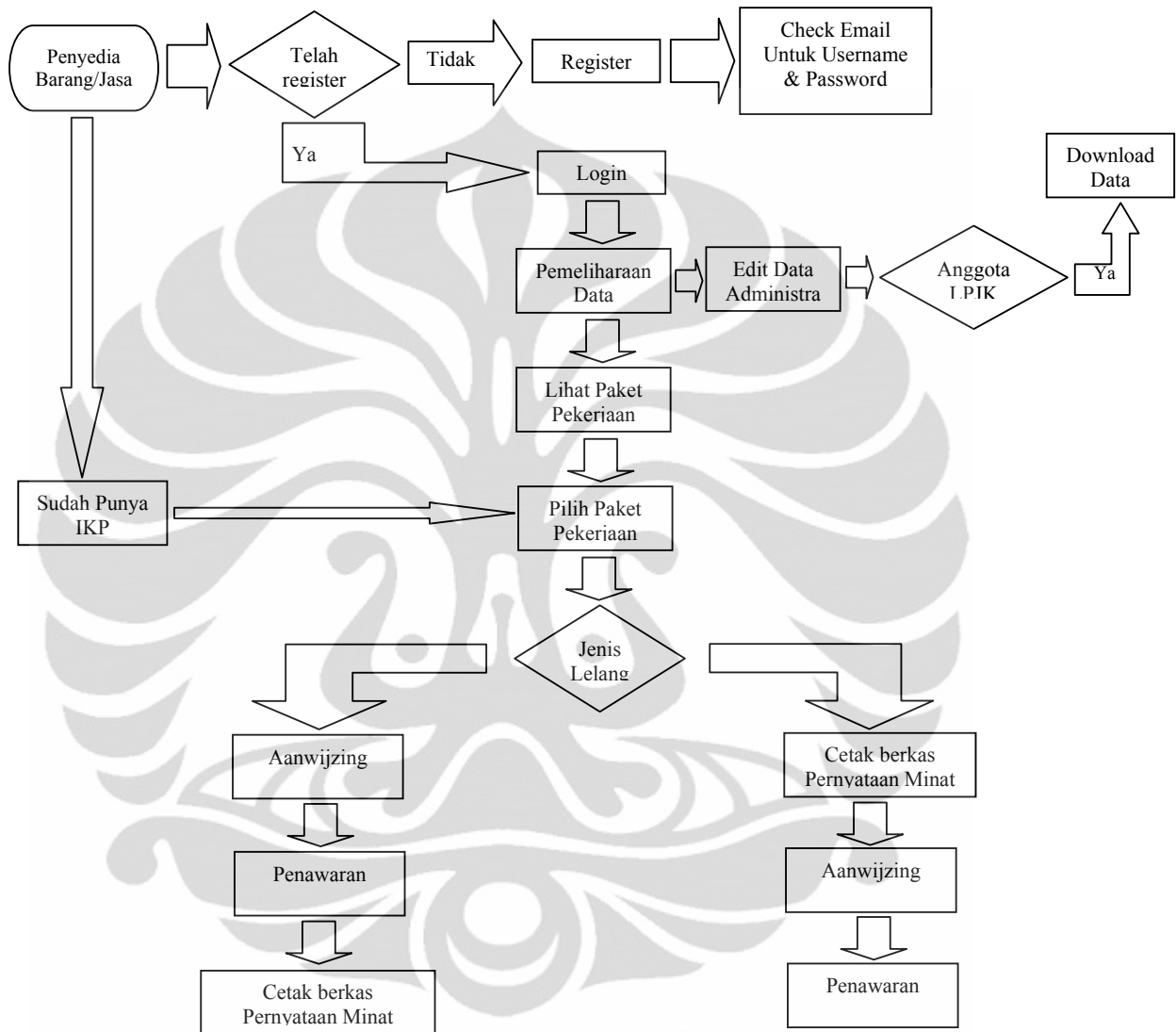
Selama tahun 2008 Pemerintah Kota Bogor terus melakukan peningkatan sistem dan sosialisasi terhadap pengguna jasa dan penyedia jasa, sehingga pada tahun anggaran 2009 lelang elektronik kembali diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Pelaksanaan lelang melalui *e-Procurement* di Pemerintah Kota Bogor dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Pengendalian Program dengan membentuk Tim *e-Procurement*. Satuan Kerja secara mandiri menetapkan paket pekerjaan yang akan dilelang. Kemudian seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa diinput (*upload*) ke dalam portal dan dilaksanakan proses lelang secara *e-Procurement* dengan menggunakan fasilitas portal tersebut, dimana proses ini dilakukan oleh panitia lelang yang ditunjuk oleh Satuan Kerja. Paket pekerjaan yang akan dilelang diumumkan oleh Satuan-Satuan Kerja melalui portal tersebut.

Selanjutnya penyedia barang dan jasa diwajibkan registrasi pada portal *e-Procurement*. Tujuannya adalah untuk menjaring penyedia barang dan jasa sebanyak-banyaknya yang berminat mengikuti proses lelang. Penyedia jasa yang telah terdaftar pada portal *e-Procurement* harus mengisi data kualifikasi yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan bersangkutan dan dalam pengisian/*up date* data kualifikasi tersebut, sistem *e-Procurement* akan mengkonfirmasi kebenarannya ke portal yang dimiliki oleh penyedia data kualifikasi perusahaan tersebut.

Penyedia barang dan jasa sebelum *Aanwijzing* melakukan download dokumen pengadaan barang dan jasa pada portal tersebut dan dapat mengikuti *Aanwijzing* tanpa harus menghadiri penjelasan. Penyedia barang dan jasa dapat memilih paket pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki dan selanjutnya mengajukan penawaran harga yang otomatis dienkripsi oleh *software* portal dengan memasukkan nilai total ke dalam portal sampai batas waktu yang ditetapkan. Pembukaan dokumen penawaran yang terdapat pada portal selanjutnya hanya dapat dibuka oleh panitia lelang yang memiliki otorisasi *password* dan selanjutnya dilakukan evaluasi untuk menentukan pemenang lelang. Seluruh peserta lelang dan masyarakat dapat melihat hasil evaluasi atas penawaran yang dilakukan pada portal *e-Procurement*.

Secara garis besar proses lelang yang harus dilalui oleh calon penyedia barang dan jasa pada Pemerintah Kota Bogor adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Alur Proses Lelang
Sumber : Bagian Pengendalian Program, 2007

Tahapan alur proses lelang diatas dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

- a) Calon Penyedia Barang dan Jasa (Rekanan) yang sudah teregister di portal *e-Procurement*, langsung melakukan login, dengan memasukkan email sebagai *username*, beserta password yang digunakan untuk login;
- b) Bagi rekanan yang belum teregister, melakukan registrasi, dengan mengisi form isian di portal *e-Procurement*, kemudian cek email, apabila sudah ada jawaban dari *administrator e- Procurement*, maka rekanan melakukan aktivasi dengan klik pada *link*, kemudian melakukan *login* di portal *e-Procurement* dengan menggunakan *email* sebagai *username*, beserta *password* yang telah dikirimkan oleh sistem ke alamat email yang bersangkutan;
- c) Rekanan juga harus membuat IKP untuk mendapatkan kunci privat (*key*), kunci publik, dan *passphrase* yang akan digunakan pada saat memasukkan penawaran;
- d) Proses pembuatan IKP dilakukan dengan melakukan klik pada (infrastruktur kunci publik), kemudian memasukkan data pada form isian, dan menyimpan kunci privat (*key*) dan *request certificate* (CSR) dalam *removable disk* (*flashdisk*), kemudian membawa *flashdisk* ke Sekretariat Layanan *e-Procurement* untuk melakukan *approve*, agar rekanan dapat mendownload kunci publik pada menu *list public key* untuk kemudian disimpan dalam *flashdisk* juga;
- e) Untuk rekanan yang sudah berhasil login, melakukan pemeliharaan data pada menu Data Perusahaan; disini rekanan dapat memasukkan data – data administrasi, kualifikasi, pemilik, pengurus, staf ahli, pengalaman, peralatan yang dimiliki perusahaan pada menu yang telah disediakan;
- f) Pada menu Paket Pekerjaan, rekanan dapat melihat seluruh paket pekerjaan yang sedang dilelang pada suatu periode putaran tertentu, melihat dokumen pelengkapannya, serta memilih paket pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi, bidang-sub bidang perusahaan;
- g) Setelah memilih paket pekerjaan, rekanan dapat memasukkan penawaran dengan terlebih dahulu melakukan load key dengan memasukkan kunci privat, *passphrase*, kunci publik yang telah didapatkan/disimpan pada saat pembuatan/pendaftaran IKP;

- h) Apabila proses menawar sudah selesai, rekanan melakukan cetak SPM (Surat Pernyataan Minat), FIPK (Form Isian Penilaian Kualifikasi), SPH (Surat Penawaran Harga) beserta lampiran dari portal *e-Procurement* pada menu yang telah disediakan;
- i) Dan rekanan dapat melihat pengumuman hasil lelang pada menu pengumuman -----> hasil pengadaan;

4.1.7 Jumlah, Nilai dan Jenis Pekerjaan

Pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Bogor yang dimulai dari tahun 2007 sampai saat ini menghasilkan jumlah, nilai kontrak dan jenis pekerjaan seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Bogor

Tahun Anggaran		2007	2009
Jumlah Pekerjaan		191	222
Jenis Pekerjaan (%)	Jasa Pemborongan Konstruksi	71,73	74,77
	Jasa Pemasokan Barang	21,46	17,12
	Jasa Lainnya	2,63	2,70
	Jasa Konsultasi	4,18	5,41

Sumber : Bagian Dalprog Pemkot Bogor, 2009

Tabel 4.2 Nilai Pekerjaan yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Bogor

Tahun Anggaran	2007	2009
Nilai Anggaran	Rp. 91.210.608.890,-	Rp. 99.580.832.808,-
Sisa Anggaran	Rp 11.188.309.163,-	Rp. 3.517.330.009,-
Efisiensi (%)	12,27	3,70

Sumber : Bagian Dalprog Pemkot Bogor, 2009

Jumlah dan nilai pekerjaan yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Bogor dari tahun ke tahun cukup fluktuatif, tergantung pada tingkat kebutuhan masing-masing Satuan Kerja dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungannya. Tahun 2009 merupakan tahun di mana jumlah dan nilai pekerjaan mencapai nilai tertinggi di Pemerintah Kota Bogor. Dari jumlah tersebut, jenis pekerjaan yang

paling banyak dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bogor adalah jasa pemborongan konstruksi, diikuti oleh jasa pemasokan barang. Dua jenis pekerjaan lain yaitu jasa konsultasi, dan jasa lainnya menempati porsi yang relatif kecil.

4.1.8 Kualifikasi Pekerjaan

Kualifikasi pekerjaan pada sistem pengadaan barang dan jasa *e-Procurement* digolongkan dalam kelompok Kecil, Non Kecil dan Umum. Sebagian besar kualifikasi pekerjaan pada sistem pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bogor dari tahun ke tahun adalah kualifikasi pekerjaan kecil. Kualifikasi pekerjaan kecil yang dominan berarti bahwa jenis pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Bogor sebagian besar adalah skala kecil dalam jumlah yang banyak. Pekerjaan skala kecil umumnya melibatkan dana yang relatif tidak besar dan waktu yang juga relatif pendek.

4.2 Potensi manfaat dari implementasi *e - Procurement* Pemerintah Kota Bogor.

Sejak tahun 2007 Pemerintah Kota Bogor berupaya menyempurnakan sistem pengadaan barang jasa tersebut menjadi sistem *e-Procurement*, dan dapat di akses di www.eprockotabogor.go.id. Setiap tahun situs ini selalu mengalami penyempurnaan terhadap menu aplikasi dan tampilan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku serta lebih memudahkan user dalam memanfaatkan aplikasi *e-Procurement* ini.

Pelaksanaan pelelangan hanya dapat diikuti oleh Penyedia Barang dan Jasa yang sudah memiliki Infrastruktur Key Publik (IKP) karena salah satu syarat bagi Penyedia Barang dan Jasa untuk melaksanakan penawaran dalam Proses Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah melalui layanan internet berbasis web dengan sistem *e-Procurement*.

Tabel 4.3 Penyedia Barang/Jasa yang Berpartisipasi Dalam Pelaksanaan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor

No	Tahun	Jumlah Penyedia Barang/Jasa
1.	2007	588 Badan Usaha
2.	2009	483 Badan Usaha

Sumber : Bagian Pengendalian Program, 2009

Tabel 4.4 Sebaran Daerah Asal Penyedia Barang/Jasa yang Berpartisipasi Dalam Pelaksanaan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2007

No	Daerah Asal	Jumlah
1	Kota Bogor	422
2	DKI Jakarta	73
3	Kota Bandung	31
4	Kabupaten Bogor	16
5	Kota Depok	11
6	Kota Bekasi	8
7	Kota Surabaya	8
8	Kabupaten Tangerang	5
9	Kota Cimahi	2
10	Kabupaten Cianjur	2
11	Sukabumi	2
12	Purwakarta	1
13	Semarang	1

Sumber : Bagian Pengendalian Program, 2009

Sedangkan untuk tahun anggaran 2009, *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor diikuti oleh berbagai perusahaan seperti yang tertera dalam tabel 4.4. dibawah ini :

Tabel 4.5 Sebaran Daerah Asal Penyedia Barang/Jasa yang Berpartisipasi Dalam Pelaksanaan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2009

No	Daerah Asal	Jumlah
1	Kota Bogor	346
2	DKI Jakarta	70
3	Kota Bandung	36
4	Kabupaten Bogor	15
5	Kota Depok	3
6	Kota Bekasi	6
8	Kabupaten Tangerang	2
9	Kota Makasar	1
10	Kabupaten Cianjur	1
13	Semarang	1

Sumber : Bagian Pengendalian Program, 2009

Dengan mengetahui dan menganalisa data-data tersebut diatas maka nantinya akan didapatkan berbagai manfaat dari penerapan *e-Procurement* yang lebih lanjut akan dibahas pada bab selanjutnya. Potensi manfaat juga didapatkan dengan cara wawancara seperti terlampir, serta data-data pendukung lainnya (materi sosialisasi, buku laporan).

4.3 Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Dapat Menyebabkan Kegagalan Dari Implementasi *E - Procurement* Pemerintah Kota Bogor.

Untuk mengetahui berbagai hambatan yang muncul selama pelaksanaan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor maka penulis juga melakukan penelitian langsung. Jenis penelitian yang dipakai adalah :

- a) Studi kepustakaan, dimana berupa penelusuran literatur untuk mendapatkan informasi mengenai hambatan-hambatan dalam penerapan *e-Procurement*.
- b) Studi lapangan, untuk mendapatkan data kecenderungan hambatan dalam pelaksanaan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor.

Jenis data penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data primer, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berupa hasil kuisisioner yang didapatkan dengan membagikan kuisisioner langsung kepada responden. Responden diminta untuk mengisi kuisisioner yang diberikan,

kuisisioner disebar untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan dapat menyebabkan kegagalan dari implementasi *e – Procurement* Pemerintah Kota Bogor. Di samping itu, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber untuk mengetahui lebih jauh kondisi di lapangan terkait dengan penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor. Kuisisioner dalam penelitian ini menghasilkan data kuantitatif, yakni data dalam bentuk angka. Sedangkan wawancara dalam penelitian ini menghasilkan data kualitatif, yakni data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka.

- b) Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk menunjang data primer dalam melakukan teknik analisis dan pengolahan data.

4.3.1 Data Responden

Responden dalam survei penelitian ini adalah Tim *e-Procurement* dan Panitia Lelang pada Pemerintah Kota Bogor. Panitia Lelang dimaksud harus telah lulus ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa. Sedangkan tim *e-Procurement* tentunya adalah pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor.

Pengambilan sampel dilakukan dengan *simple random sampling*, dimana sampel yang besarnya n ditarik dari populasi terbatas yang besarnya N , sedemikian rupa sehingga setiap unit dalam sampel mempunyai peluang yang sama untuk dipilih (Nasir, 1998)

Dari data, di Pemerintah Kota Bogor sumber daya manusia yang telah lulus ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa sebanyak 117 orang, namun dari jumlah tersebut yang aktif sebagai peserta lelang sebanyak ± 25 orang. Sedangkan Tim *e-Procurement* terdiri dari 7 orang. Sehingga total populasi dari penelitian ini sebanyak 32 orang. Jumlah sampel dihitung dengan rumus (Yamane, 1967) :

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2} \quad (4.1)$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = persentase ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat diinginkan, dimana presisi yang digunakan adalah 5%.

Dari rumus tersebut, maka kuisioner disebar kepada 30 responden. Dari 32 kuisioner yang dibagikan, sebanyak 30 kuisioner yang terkumpul dan dapat digunakan untuk analisa lebih lanjut.

Dari 30 orang responden 66,67% orang berasal dari Tim *e-Procurement*, 10% orang dari pengguna jasa dan 23,33% orang dari Panitia Lelang dengan distribusi frekuensi dapat dilihat pada Diagram 4.1 berikut.

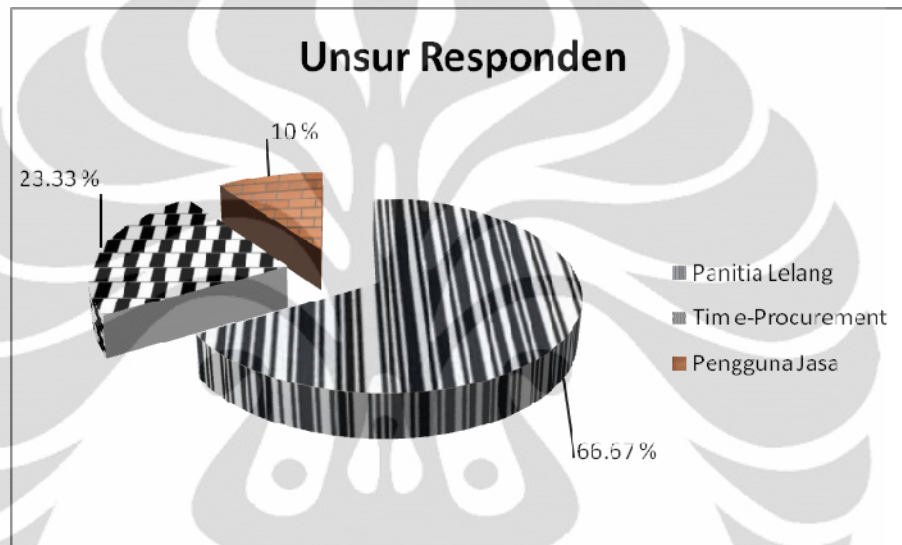


Diagram 4.1 Distribusi Unsur Responden

Dari diagram diatas, terlihat jelas bahwa mayoritas responden adalah Panitia Lelang. Unsur responden merupakan faktor penting yang harus diketahui, karena unsur Tim *e-Procurement* , panitia lelang dan pengguna jasa dianggap sudah mewakili responden terkait.

Selanjutnya, distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan, untuk tingkat pendidikan akademi atau diploma sebanyak 15%, sarjana atau tamat perguruan tinggi sebanyak 58,33%, dan master sebanyak 26,67%. Terlihat bahwa persentase terbesar dimiliki oleh responden dengan tingkat pendidikan akhir sarjana. Tingkat pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap daya tangkap informasi, pengetahuan, sikap, dan minat responden terhadap suatu permasalahan, sehingga tingkat pendidikan responden perlu diketahui. Diagram 4.2. menunjukkan distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan.

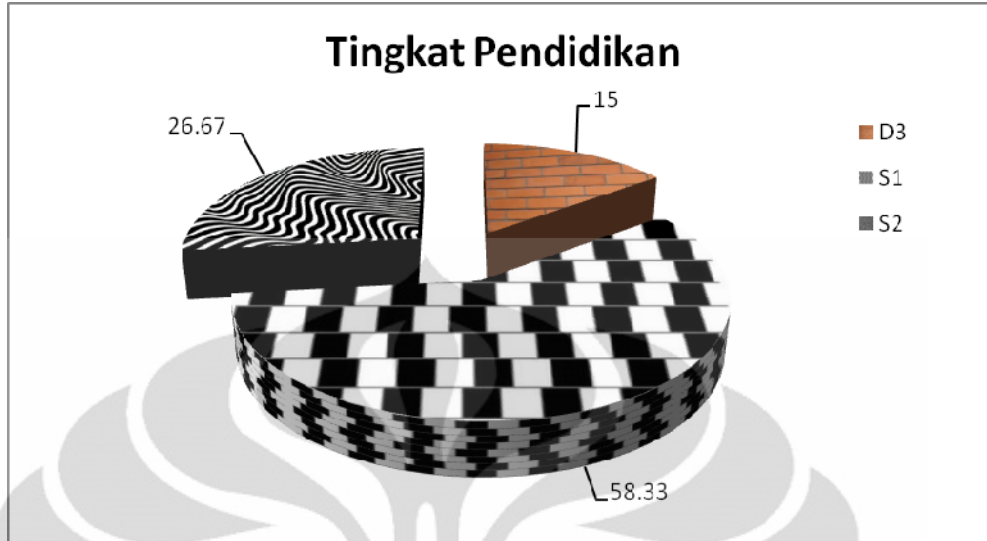


Diagram 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Distribusi responden berdasarkan pengalaman kerjanya, untuk responden dengan pengalaman kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 43.33%, antara 5-10 tahun sebanyak 23.33%, dan pengalaman kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 33.34% dengan distribusi frekuensi sebagaimana yang dapat dilihat pada diagram 4.3. di bawah ini.

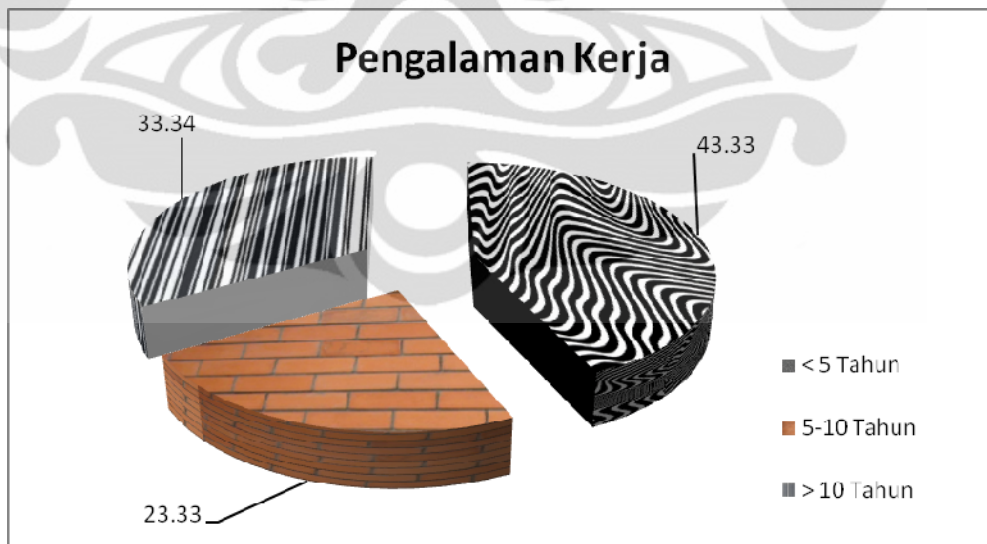


Diagram 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja

4.3.2 Jawaban Responden

Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam proses analisis. Data rekapitulasi hasil pengisian kuisioner responden untuk pertanyaan penelitian pada tabel 4.2 di bawah ini. Data diambil dari 30 responden yang memiliki pengalaman dalam mengikuti *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor.

Tabel 4.6 Rekapitulasi Hasil Isian Kuisioner Pertanyaan Penelitian

Hambatan Pelaksanaan sistem <i>e-Procurement</i> pada Pemerintah Kota Bogor						
Variabel Penelitian		Jawaban Responden				
Hambatan Internal		STS	TS	RR	S	SS
1.a	Perlu adanya training untuk menerapkan sistem <i>e-Procurement</i> .	0	0	3	8	9
1.b	Budaya organisasi pengguna jasa yang tidak mendukung	1	0	4	19	6
1.c	Tidak cukupnya solusi <i>e-Procurement</i> ketika adanya masalah dalam pelaksanaannya	3	13	4	7	3
1.d	Kurangnya dukungan manajemen dari organisasi yang lebih tinggi.	6	10	2	10	1
1.e	Implementasi harga yang tidak sesuai	2	13	11	2	2
1.f	Infrastruktur pendukung <i>e-Procurement</i> kurang memadai	3	5	4	13	5
1.g	Kurangnya kemampuan personil dalam pelaksanaan <i>e-Procurement</i>	0	6	1	13	10
1.h	Kurangnya perangkat teknologi/software yang memadai	3	7	4	13	3
1.i	Kurangnya pengintegrasian hubungan dengan penyedia jasa	3	6	5	13	3
1.j	Keamanan sistem <i>e-Procurement</i> yang dirasa kurang	6	11	4	6	3
1.k	Adanya intervensi " <i>political will</i> " dari pimpinan dalam penentuan pemenang lelang	2	16	4	6	2
1.l	Payung hukum <i>e-Procurement</i> saat ini dirasa belum cukup memadai	0	10	0	14	6

Tabel 4.6 sambungan
Rekapitulasi Hasil Isian Kuisisioner Pertanyaan Penelitian

Hambatan Pelaksanaan sistem <i>e-Procurement</i> pada Pemerintah Kota Bogor						
Variabel Penelitian		Jawaban Responden				
Hambatan Eksternal		STS	TS	RR	S	SS
2.a	Kurangnya pengetahuan teknologi dari penyedia jasa	0	0	5	14	11
2.b	Kurang mendukungnya fasilitas pada penyedia jasa	0	4	3	14	9
2.c	Ketakutan akan teknologi <i>e-Procurement</i> yang dirasa sulit	0	2	2	22	4
2.d	Biaya partisipasi dalam proses <i>e-Procurement</i> yang tinggi	9	18	2	1	0
2.e	Rasa takut jika kompetitor melihat tawaran mereka	6	14	5	4	1
2.f	Ketidakpercayaan atas sistem <i>e-Procurement</i>	0	17	6	4	2

Distribusi jawaban kuisisioner dari responden dengan distribusi frekuensi sebagaimana yang dapat dilihat pada diagram 4.4. di bawah ini.

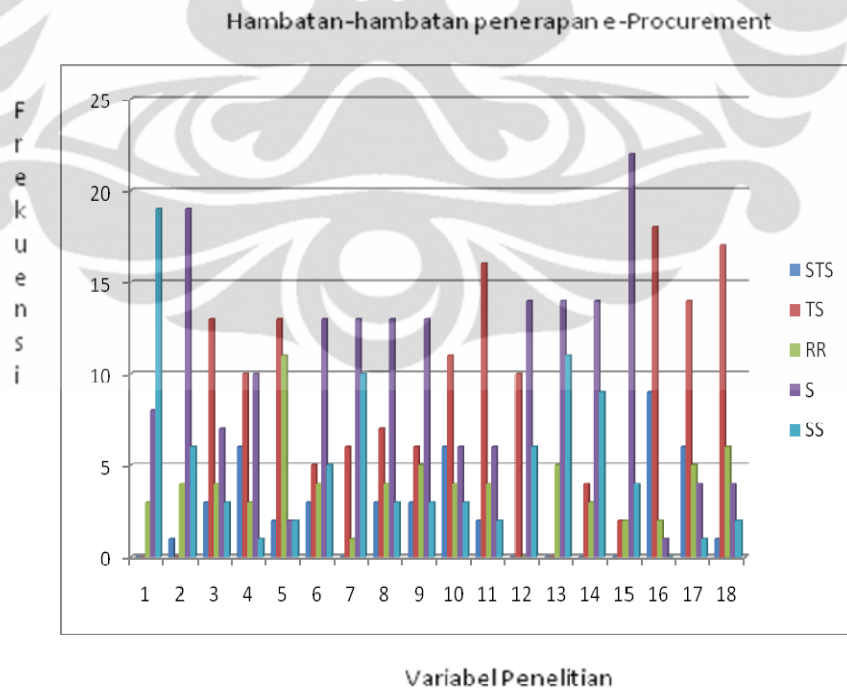


Diagram 4.4 Distribusi Jawaban Pertanyaan Penelitian Terhadap Responden

4.3.3 Analisis Data Penelitian

Prosedur dalam menganalisis data penelitian terdiri dari beberapa tahapan seperti berikut, memeriksa validitas dan reliabilitas kuisisioner penelitian menggunakan *Corrected Item Total Correlation Test*. Kedua, melakukan analisis komparatif dengan metode Kruskal Wallis Test untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan di antara responden dalam menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan kriteria dari setiap responden. Ketiga, menganalisis data penelitian menggunakan analisis *statistic deskriptif* dengan metode distribusi frekuensi berdasarkan nilai modus untuk mencari variabel penentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

4.3.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan konsistensi kuisisioner penelitian yang digunakan berdasarkan nilai-nilai yang dihasilkan pada setiap butir pertanyaan. Perlu diketahui bahwa kuisisioner penelitian untuk responden terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu kuisisioner untuk pertanyaan untuk hambatan internal, dan pertanyaan untuk hambatan eksternal

Untuk variabel hambatan internal hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,273 yang ternyata lebih besar dari nilai r tabel untuk $df = 359$ maka kuisisioner yang diuji terbukti cukup reliabel.

Tabel 4.7. Output Nilai *Cronbach's Alpha* untuk hambatan internal

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha ^a	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items ^a	N of Items
-.273	-.458	2

Tabel 4.8. Output Nilai *df* untuk hambatan internal

	Sum of Squares	df	Mean Square	Friedman's Chi-Square	Sig
Between People	2117.388	359	5.898		
Within People					
Between Items	1891.513 ^a	1	1891.513	148.467	.000
Residual	2694.988	359	7.507		
Total	4586.500	360	12.740		
Total	6703.888	719	9.324		

Untuk variabel hambatan eksternal hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 2,420 yang ternyata lebih besar dari nilai *r* tabel untuk *df* = 179 maka kuisioner yang diuji terbukti cukup reliabel.

Tabel 4.9. Output Nilai *Cronbach's Alpha* untuk hambatan internal

	Cronbach's Alpha	Standardized Items ^a	N of Items
	-2.420	-2.696	2

Tabel 4.10. Output Nilai *df* untuk hambatan eksternal

	Sum of Squares	df	Mean Square	Friedman's Chi-Square	Sig
Between People	182.622	179	1.020		
Within People					
Between Items	11.378 ^a	1	11.378	3.220	.073
Residual	624.622	179	3.490		
Total	636.000	180	3.533		
Total	818.622	359	2.280		

Tabel 4.11. di bawah ini menunjukkan variabel penelitian untuk pertanyaan penelitian pertama yang dinyatakan valid dan reliabel.

Tabel 4.11. Variabel Penelitian hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hambatan Penerapan <i>e-Procurement</i> pada Pemerintah Kota Bogor	
Hambatan Internal	
1.a	Perlu adanya training untuk menerapkan sistem <i>e-Procurement</i> .
1.b	Budaya organisasi pengguna jasa yang tidak mendukung
1.c	Tidak cukupnya solusi <i>e-Procurement</i> ketika adanya masalah dalam pelaksanaannya
1.d	Kurangnya dukungan manajemen dari organisasi yang lebih tinggi.
1.e	Implementasi harga yang tidak sesuai
1.f	Infrastruktur pendukung <i>e-Procurement</i> kurang memadai
1.g	Kurangnya kemampuan personil dalam pelaksanaan <i>e-Procurement</i>
1.h	Kurangnya perangkat teknologi/software yang memadai
1.i	Kurangnya pengintegrasian hubungan dengan penyedia jasa
1.j	Keamanan sistem <i>e-Procurement</i> yang dirasa kurang
1.k	Adanya intervensi " <i>political will</i> " dari pimpinan dalam penentuan pemenang lelang
1.l	Payung hukum <i>e-Procurement</i> saat ini dirasa belum cukup memadai
Hambatan Eksternal	
2.a	Kurangnya pengetahuan teknologi dari penyedia jasa
2.b	Kurang mendukungnya fasilitas pada penyedia jasa
2.c	Ketakutan akan teknologi <i>e-Procurement</i> yang dirasa sulit
2.d	Biaya partisipasi dalam proses <i>e-Procurement</i> yang tinggi
2.e	Rasa takut jika kompetitor melihat tawaran mereka
2.f	Ketidakpercayaan atas sistem <i>e-Procurement</i>

4.3.3.2 Analisis Komparatif

Pada penelitian ini, sampel yang digunakan lebih dari dua (k sampel) sehingga digunakan analisis komparatif dengan metode *Kruskal Wallis Test*. Kriteria responden dibedakan menurut peranan dalam pelelangan, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Hasil analisis komparatif untuk pertanyaan penelitian, baik berdasarkan status responden, tingkat pendidikan maupun pengalaman kerja, tidak didapatkan perbedaan signifikan, karena semua variabel memiliki nilai *Asymp. Sig* 0,065.

Tabel 4.12. Output Nilai *Asymp. Sig*

	Sum of Squares	df	Mean Square	Friedman's Chi-Square	Sig
Between People	373.250	179	2.085	7.230	.065
Within People					
Between Items	16.594 ^a	3	5.531		
Residual	1222.906	537	2.277		
Total	1239.500	540	2.295		
Total	1612.750	719	2.243		

4.3.3.3 Analisis Statistik Deskriptif

Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan analisis *statistic deskriptif*. Untuk menentukan faktor-faktor penentu yang dicari, dilakukan pendistribusian data dengan metode distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi digunakan untuk mendapatkan nilai modus dari keseluruhan penilaian responden terhadap variabel-variabel penelitian yang mendukung pada masing-masing pertanyaan penelitian. Penggunaan *statistic deskriptif* bertujuan untuk memberikan gambaran atau uraian kualitatif mengenai hambatan penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor.

Dari akumulasi data kuisioner terlihat bahwa faktor-faktor yang merupakan hambatan penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor adalah :

- a) Variabel 1a (Perlu adanya training untuk menerapkan sistem e-Procurement)

Dari 30 responden, 3 responden menjawab ragu-ragu, 8 responden menjawab setuju dan 19 responden menjawab sangat setuju, maka

variabel ini dapat ditentukan sebagai faktor yang merupakan hambatan penerapan *e-Procurement*.

- b) Variabel 1b (Budaya organisasi pengguna jasa yang tidak mendukung)
Dari 30 responden, 1 responden menjawab sangat tidak setuju, 4 responden menjawab ragu-ragu, 19 responden menjawab setuju dan 6 responden menjawab sangat setuju, maka variabel ini dapat ditentukan sebagai faktor yang merupakan hambatan penerapan *e-Procurement*.
- c) Variabel 1f (Infrastruktur pendukung *e-Procurement* kurang memadai)
Dari 30 responden, 3 responden menjawab sangat tidak setuju, 5 responden menjawab tidak setuju, 4 responden menjawab ragu-ragu, 13 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab sangat setuju maka variabel ini dapat ditentukan sebagai faktor yang merupakan hambatan penerapan *e-Procurement*.
- d) Variabel 1g (Kurangny kemampuan personil dalam pelaksanaan *e-Procurement*)
Dari 30 responden, 6 responden menjawab tidak setuju, 1 responden menjawab ragu-ragu, 13 responden menjawab setuju, 10 responden menjawab sangat setuju, maka variabel ini dapat ditentukan sebagai faktor yang merupakan hambatan penerapan *e-Procurement*.
- e) Variabel 1h (Kurangny perangkat teknologi/software yang memadai)
Dari 30 responden, 3 responden menjawab sangat tidak setuju, 7 responden menjawab tidak setuju, 4 responden menjawab ragu-ragu, 13 responden menjawab setuju, 3 responden menjawab sangat setuju, maka variabel ini dapat ditentukan sebagai faktor yang merupakan hambatan penerapan *e-Procurement*.
- f) Variabel 1i (Kurangny pengintegrasian hubungan dengan penyedia jasa)
Dari 30 responden, 3 responden menjawab sangat tidak setuju, 6 responden menjawab tidak setuju, 5 responden menjawab ragu-ragu, 13 responden menjawab setuju, 3 responden menjawab sangat setuju, maka variabel ini dapat ditentukan sebagai faktor yang merupakan hambatan penerapan *e-Procurement*.

g) Variabel 11 (Payung hukum e-Procurement saat ini dirasa belum cukup memadai)

Dari 30 responden, 10 responden menjawab tidak setuju, 14 responden menjawab setuju, 6 responden menjawab sangat setuju, maka variabel ini dapat ditentukan sebagai faktor yang merupakan hambatan penerapan *e-Procurement*.

h) Variabel 2a (Kurang pengetahuan teknologi dari penyedia jasa)

Dari 30 responden, 5 responden menjawab ragu-ragu, 14 responden menjawab setuju, 11 responden menjawab sangat setuju, maka variabel ini dapat ditentukan sebagai faktor yang merupakan hambatan penerapan *e-Procurement*.

i) Variabel 2b (Kurang mendukungnya fasilitas pada penyedia jasa)

Dari 30 responden, 4 responden menjawab tidak setuju, 3 responden menjawab ragu-ragu, 14 responden menjawab setuju, 9 responden menjawab sangat setuju, maka variabel ini dapat ditentukan sebagai faktor yang merupakan hambatan penerapan *e-Procurement*.

j) Variabel 2c (Ketakutan akan teknologi e-Procurement yang dirasa sulit)

Dari 30 responden, 2 responden menjawab tidak setuju, 2 responden menjawab ragu-ragu, 22 responden menjawab setuju, 4 responden menjawab sangat setuju, maka variabel ini dapat ditentukan sebagai faktor yang merupakan hambatan penerapan *e-Procurement*.

Dari total variabel penelitian, berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas kuisioner penelitian didapatkan 18 variabel penelitian yang dinyatakan valid. Kemudian, dari hasil analisis komparatif didapatkan 18 variabel yang memiliki perbedaan persepsi responden berdasarkan unsur responden, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Selanjutnya, dari hasil analisis statistik deskriptif menggunakan metode distribusi frekuensi, didapatkan 10 faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan *e-Procurement* pada Pemerintah Daerah Kota Bogor. Tabel. 4.5. dibawah ini merupakan rekapitulasi hasil penelitian yang didapatkan dari ketiga metode analisis pengujian.

Tabel 4.13 Rekapitulasi Hasil Penelitian

Hambatan Penerapan <i>e-Procurement</i> pada Pemerintah Kota Bogor					
Variabel Penelitian		Uji Validitas dan Reliabilitas	Analisis Komparatif	Analisis Statistik Deskriptif	Keterangan
Faktor Internal					
1.a	Perlu adanya training untuk menerapkan sistem <i>e-Procurement</i> .	√	√	√	digunakan
1.b	Budaya organisasi pengguna jasa yang tidak mendukung	√	√	√	digunakan
1.c	Tidak cukupnya solusi <i>e-Procurement</i> ketika adanya masalah dalam pelaksanaannya	√	√		-
1.d	Kurangnya dukungan manajemen dari organisasi yang lebih tinggi.	√	√		-
1.e	Implementasi harga yang tidak sesuai	√	√		-
1.f	Infrastruktur pendukung <i>e-Procurement</i> kurang memadai	√	√	√	digunakan
1.g	Kurangnya kemampuan personil dalam pelaksanaan <i>e-Procurement</i>	√	√	√	digunakan
1.h	Kurangnya perangkat teknologi/software yang memadai	√	√	√	digunakan
1.i	Kurangnya pengintegrasian hubungan dengan penyedia jasa	√	√	√	digunakan

Tabel 4.13 Sambungan
Rekapitulasi Hasil Penelitian

Hambatan Penerapan <i>e-Procurement</i> pada Pemerintah Kota Bogor					
Variabel Penelitian		Uji Validitas dan Reliabilitas	Analisis Komparatif	Analisis Statistik Deskriptif	Keterangan
Faktor Internal					
1.j	Keamanan sistem <i>e-Procurement</i> yang dirasa kurang	√	√		-
1.k	Adanya intervensi “ <i>political will</i> ” dari pimpinan dalam penentuan pemenang lelang	√	√		-
1.l	Payung hukum <i>e-Procurement</i> saat ini dirasa belum cukup memadai	√	√	√	digunakan
Faktor Eksternal					
2.a	Kurangnya pengetahuan teknologi dari penyedia jasa	√	√	√	digunakan
2.b	Kurang mendukungnya fasilitas pada penyedia jasa	√	√	√	digunakan
2.c	Ketakutan akan teknologi <i>e-Procurement</i> yang dirasa sulit	√	√	√	digunakan
2.d	Biaya partisipasi dalam proses <i>e-Procurement</i> yang tinggi	√	√		-

Tabel 4.13 Sambungan
Rekapitulasi Hasil Penelitian

Hambatan Penerapan <i>e-Procurement</i> pada Pemerintah Kota Bogor					
Variabel Penelitian		Uji Validitas dan Reliabilitas	Analisis Komparatif	Analisis Statistik Deskriptif	Keterangan
2.e	Rasa takut jika kompetitor melihat tawaran mereka	√	√		-
2.f	Ketidakpercayaan atas sistem <i>e-Procurement</i>	√	√		-

Dalam menentukan faktor-faktor penentu yang dicari dari penelitian ini, didasarkan pada hasil dari ketiga analisis yang dilakukan, misalnya tahap uji validitas dan reliabilitas didapatkan suatu variabel penelitian yang dinilai valid dan reliable, maka variabel tersebut digunakan. Lalu, ketika hasil analisis komparatif menghasilkan suatu variabel penelitian yang memiliki perbedaan persepsi dari responden, maka variabel tersebut dicocokkan dengan hasil analisis statistis deskriptif. Dari hasil penelitian yang didapatkan, kemudian dilakukan validasi hasil penelitian oleh pakar jasa konstruksi untuk menentukan hasil penelitian mana yang digunakan dan perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.

4.4 Validasi Hasil Penelitian

Validasi hasil penelitian dilakukan dengan cara meminta pendapat dan persetujuan beberapa pakar jasa konstruksi, untuk memastikan apakah penelitian yang diperoleh relevan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Pakar jasa konstruksi yang memvalidasi hasil penelitian ini berjumlah 3 orang dengan kriteria yang sudah ditentukan. Hal ini dimungkinkan karena dengan jumlah ganjil bisa langsung didapatkan pendapat mayoritas dari para pakar. Data pakar jasa konstruksi diatas dapat dilihat pada tabel 4.14. berikut.

Tabel 4.14 Data Pakar Jasa Konstruksi Validasi Hasil Penelitian

No	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman
1	Akademisi	S2	25 tahun
2	Kepala Bagian	S2	17 tahun

4.4.1 Pendapat Pakar

Berikut, data rekapitulasi hasil pengisian kuisioner validasi hasil penelitian oleh pakar jasa konstruksi seperti yang terlihat pada tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 4.15 Validasi Hasil Penelitian

Hambatan Penerapan <i>e-Procurement</i> pada Pemerintah Kota Bogor				
Variabel Penelitian		Jawaban Pakar		Keterangan
Hambatan Internal		ya	tidak	
1.a	Perlu adanya training untuk menerapkan sistem <i>e-Procurement</i> .	2	0	Relevan
1.b	Budaya organisasi pengguna jasa yang tidak mendukung	2	0	Relevan
1.f	Infrastruktur pendukung <i>e-Procurement</i> kurang memadai	2	0	Relevan
1.g	Kurangnya kemampuan personil dalam pelaksanaan <i>e-Procurement</i>	2	0	Relevan
1.h	Kurangnya perangkat teknologi/software yang memadai	2	0	Relevan
1.i	Kurangnya pengintegrasian hubungan dengan penyedia jasa	2	0	Relevan
1.l	Payung hukum <i>e-Procurement</i> saat ini dirasa belum cukup memadai	2	0	Relevan
Hambatan Eksternal				
2.a	Kurangnya pengetahuan teknologi dari penyedia jasa	2	0	Relevan
2.b	Kurang mendukungnya fasilitas pada penyedia jasa	2	0	Relevan
2.c	Ketakutan akan teknologi <i>e-Procurement</i> yang dirasa sulit	2	0	Relevan

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas pakar menyatakan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan

proses validasi hasil penelitian oleh pakar konstruksi diperoleh temuan yang merupakan hambatan pelaksanaan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor adalah :

- a) Variabel 1.a (Perlu adanya training untuk menerapkan sistem *e-Procurement*.)

Mayoritas pakar menyatakan setuju dengan temuan dan pembahasan pada variabel ini.

- b) Variabel 1.b (Budaya organisasi pengguna jasa yang tidak mendukung)

Menurut pakar, hal ini disebabkan perlunya penyesuaian terhadap pelelangan yang awalnya konvensional beralih secara sistem.

- c) Variabel 1.f (Infrastruktur pendukung *e-Procurement* kurang memadai)

Menurut para pakar hal ini disebabkan masih adanya kesenjangan sarana dan prasarana untuk mengakses portal pengadaan dari masing-masing lingkup SKPD.

- d) Variabel 1.g (Kurangny kemampuan personil dalam pelaksanaan *e-Procurement*)

Menurut Pendapat pakar, pelatihan dan sosialisasi harus dilaksanakan secara berkesinambungan.

- e) Variabel 1.h (Kurangnya perangkat teknologi/software yang memadai)

Perangkat teknologi yang belum memadai yang ada pada tiap unit kerja.

- f) Variabel 1.i (Kurangny pengintegrasian hubungan dengan penyedia jasa)

Masih kurangnya sinkronisasi hubungan pengguna jasa dan penyedia jasa menyikapi penerapan sistem *e-Procurement*.

- g) Variabel 1.1 (Payung hukum *e-Procurement* saat ini dirasa belum cukup memadai)

Undang-undang informasi dan teknologi saat ini belum cukup memadai, karena tidak menjamin adanya tanda tangan digital atau materai digital.

- h) Variabel 2.a (Kurangny pengetahuan teknologi dari penyedia jasa)

Menurut pendapat pakar, sebagian besar penyedia jasa yang berkontribusi dalam pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Bogor masih belum memiliki kemampuan yang baik dalam bidang teknologi.

- i) Variabel 2.b (Kurang mendukungnya fasilitas pada penyedia jasa)
Menurut pendapat pakar, hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyedia jasa.
- j) Variabel 2.c (Ketakutan akan teknologi *e-Procurement* yang dirasa sulit)
Menurut pendapat pakar, saat ini masih *e-Procurement* dianggap sesuatu yang rumit dan cukup merepotkan.



BAB 5

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian, dimana dalam pembahasan akan didukung referensi maupun penelitian pendahuluan yang relevan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang komprehensif dan diharapkan dapat menjawab tujuan penelitian.

5.1 Analisis Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa tujuan penelitian adalah memberikan gambaran pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-Procurement*), dapat diidentifikasi dan analisis potensi manfaat apa saja yang diperoleh dari implementasi *e – Procurement*, diketahui analisis faktor-faktor yang menghambat dan dapat menyebabkan kegagalan dari implementasi *e – Procurement*,

5.1.1 Manfaat implementasi penerapan e-Procurement pada Pemerintah Kota Bogor

Dari penerapan *e-Procurement* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor dari tahun 2007, didapatkan sejumlah manfaat langsung yang dapat dirasakan. Manfaat-manfaat itu diantaranya:

- a) Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Bogor. Dengan adanya sistem *e-Procurement* siapapun dapat melihat proses pengadaan yang dilakukan, sehingga masyarakat luas dapat ikut mengawasi proses pengadaan yang dilakukan oleh suatu instansi. *E-procurement* dapat menjadi alat dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat pada proses pengadaan barang/jasa sehingga memperkecil peluang terjadinya penyimpangan yang biasanya mengindikasikan pula terjadinya korupsi dan kolusi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Masyarakat dapat mengetahui perusahaan yang memenangkan lelang di suatu instansi beserta harga penawarannya termasuk mengetahui jumlah dan perusahaan yang mengikuti lelang. Dimana semua informasi ini dapat diakses pada web www.eprocotabogor.go.id

- b) Meningkatkan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha untuk mendapatkan kontrak dengan Pemerintah Kota Bogor. Hambatan-hambatan bagi pelaku usaha dapat diminimalkan sehingga seluruh pelaku usaha yang benar-benar merupakan pelaku usaha akan mendapat akses yang sama untuk mengajukan penawaran. Seperti terlihat pada tabel 4.3 dimana badan usaha yang mengikuti pelelangan pada Pemerintah Kota Bogor sebanyak 588 badan usaha pada tahun anggaran 2007 dan 483 badan usaha pada tahun anggaran 2009.
- c) Adanya efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. *E-procurement* akan sedikit banyak membantu sebagian proses interaksi dengan peserta lelang sehingga dapat meningkatkan efektifitas kinerja. Sistem *e-Procurement* mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/jasa, sehingga paket – paket proyek berjalan relatif lebih tepat. Jika secara konvensional pengadaan melalui lelang akan ditulis pengumuman di koran 1 hari dan 7 hari pengumuman resmi di kantor pemerintah, dengan *e-Procurement* pengumuman tersebut dapat dipersingkat waktunya. Apabila waktu pengumuman yang dibutuhkan lebih pendek maka diharapkan pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan juga akan lebih cepat berjalan. Selain itu panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat.
- d) Proses pengadaan barang/jasa secara *e-Procurement* juga terbukti dapat meningkatkan efisiensi. Dengan menerapkan sistem *e-Procurement* Pemerintah Kota Bogor mampu meningkatkan efisiensi anggaran. Terhadap biaya proses pelelangan juga dapat diminimalisir karena penggunaan kertas kerja menjadi berkurang. Seperti terlihat pada tabel 4.2 dimana efisiensi anggaran yang diperoleh melalui penerapan sistem *e-Procurement* ini pada tahun anggaran 2007 sebesar 12,27 % dan pada tahun anggaran 2009 sebesar 3,70 %.
- e) Masyarakat luas dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Hal ini terbukti dengan adanya rekanan yang menjadi mitra Pemerintah Kota Bogor tidak hanya berasal dari

wilayah Kota Bogor. Hal ini seperti yang terlihat pada pada tabel 4.4 dan tabel 4.5, dimana badan usaha yang mengikuti lelang pada Pemerintah Kota Bogor berasal dari berbagai kota di Indonesia.

- f) Dengan adanya sistem *e-Procurement* maka dapat diperoleh kendali yang lebih baik terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa. Melalui sarana-sarana pelaporan dan analisis yang mudah dan efektif, dapat diperoleh peningkatan efisiensi dalam pemeliharaan laporan, dan menciptakan integrasi data yang utuh. Dimana Bagian Pengendalian Program selaku pengendali kegiatan pada Pemerintah Kota Bogor dapat dengan mudah melakukan kendali melalui sistem *e-Procurement*.
- g) Keuntungan lain *e-Procurement* meliputi penghematan biaya, waktu, dan beban kerja tambahan yang normalnya berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis. Proses pengadaan konvensional biasanya melibatkan banyak pemrosesan kertas-kertas, yang mana menghabiskan sejumlah besar waktu dan uang. Dengan adanya sistem *e-Procurement* maka penggunaan kertas dapat diminimalisir. Karena dokumen lelang dapat diupload dan di download melalui sistem *e-Procurement*.
- h) Keuntungan *e-procurement* tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi juga penyederhanaan keseluruhan proses. Sistem *e-Procurement* membuat proses pemilihan penyedia barang/jasa lebih cepat bila dibanding secara konvensional.

5.1.2 Faktor-faktor yang menghambat dan dapat menyebabkan kegagalan dari implementasi *e – Procurement* di Pemerintah Kota Bogor

Dari hasil penelitian, diperoleh beberapa temuan yang merupakan hambatan dalam pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Bogor adalah :

- a) Variabel 1a (Perlu adanya training untuk menerapkan sistem *e-Procurement*)
- b) Variabel 1b (Budaya organisasi pengguna jasa yang tidak mendukung)
- c) Variabel 1f (Infrastruktur pendukung *e-Procurement* kurang memadai)
- d) Variabel 1g (Kurangny kemampuan personil dalam pelaksanaan *e-Procurement*)

- e) Variabel 1.h (Kurangnya perangkat teknologi/software yang memadai)
- f) Variabel 1i (Kurangnya pengintegrasian hubungan dengan penyedia jasa)
- g) Variabel 1l (Payung hukum *e-Procurement* saat ini dirasa belum cukup memadai)
- h) Variabel 2a (Kurangnya pengetahuan teknologi dari penyedia jasa)
- i) Variabel 2b (Kurang mendukungnya fasilitas pada penyedia jasa)
- j) Variabel 2c (Ketakutan akan teknologi *e-Procurement* yang dirasa sulit)

5.1.2.1 Pembahasan Penelitian

Makin maraknya lembaga pemerintah yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui *e-Procurement* merupakan sinyal positif. Selain terbukti bisa mengurangi korupsi, kolusi dan sejenisnya, *e-Procurement* juga bermanfaat dalam memberikan harga pasar yang wajar. Namun demikian, harus diakui pengadaan barang/ jasa pemerintah baik yang dilakukan secara konvensional ataupun elektronik juga masih menimbulkan masalah. Dari hasil wawancara dan analisa terhadap hasil kuisioner dengan berbagai pihak yang terlibat dalam *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor, tercatat ada beberapa masalah yang berpotensi muncul dalam pengadaan barang/ jasa, diantaranya:

- a) Variabel 1a (Perlu adanya training untuk menerapkan sistem *e-Procurement*)

Dengan mengenalkan sebuah sistem yang dapat digunakan dengan mudah oleh orang-orang dan dengan senang menggunakannya, memungkinkan setiap orang di organisasi menyesuaikan dengan sistem *e-Procurement* yang dipilih dan oleh karena itu akan meningkatkan kemampuan pengguna. Sehingga, pelatihan dan sosialisasi harus dilakukan secara berkesinambungan

- b) Variabel 1b (Budaya organisasi pengguna jasa yang tidak mendukung)
Adanya komitmen dari segenap pimpinan dan karyawan perusahaan untuk merubah budaya kerja (change management) akibat penerapan konsep *e-Procurement* yang berbasis pada penggunaan teknologi

informasi secara optimal ini, terutama dalam kaitannya dengan menjalin kemitraan strategis dengan para penyedia jasa.

- c) Variabel 1f (Infrastruktur pendukung *e-Procurement* kurang memadai)
 Perlunya biaya tambahan terutama di dalam interkoneksi internet dimana pada era sekarang ini masih merupakan produk yang eksklusif/dapat dikatakan mahal. Sebagaimana dimaksud, bahwa *e-Procurement* sebagai suatu sistem informasi merupakan sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi computer, program aplikasi dan jaringan) dan manusia untuk menghasilkan informasi (Setiadi, 2009). Sehingga peningkatan infrastruktur mutlak diperlukan.
- d) Variabel 1g (Kurangny kemampuan personil dalam pelaksanaan *e-Procurement*)
 Disamping harus menguasai cara-cara menggunakan perangkat teknologi informasi (komputer, aplikasi, database, dsb.) dengan baik, SDM yang terlibat dalam proses *e-Procurement* harus memahami secara sungguh-sungguh kerangka pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu kesiapan SDM untuk mengoperasikan *e-Procurement* belum tersebar merata di lingkup SKPD. Perlunya SDM di bidang IT yang memadai, baik dari sisi pengelola dan terutama pengguna jasa, demikian pula penyedia/rekanan yang dapat dipastikan membutuhkan tenaga tambahan untuk dapat mengikuti sistem ini.
- e) Variabel 1h (Kurangny perangkat teknologi/software yang memadai)
 Secara sistem *e-Procurement* telah mampu mengakomodir sebagaimana yang dijabarkan dalam Keppres No.80 Tahun 2003, namun kesenjangan digital antara lingkup SKPD masih menjadi kendala yang serius apabila tidak segera ditanggulangi. Dimana sarana dan prasarana untuk mengakses web pengadaan belum mengakomodir kebutuhan.
- f) Variabel 1i (Kurangny pengintegrasian hubungan dengan penyedia jasa)

Rendahnya komitmen pemimpin lembaga pemerintah untuk mengadakan barang/ jasa secara transparan baik secara konvensional atau elektronik. Sehingga masih banyak terdapat kesalahpahaman dengan penyedia jasa.

- g) Variabel 1l (Payung hukum *e-Procurement* saat ini dirasa belum cukup memadai)

Belum adanya peraturan hukum yang memayungi proses *e-procurement* secara penuh. Akibatnya belum ada standar baku mengenai standar proses *e-procurement*, waktu, penggunaan teknologi informasi, sumber daya manusia, keabsahan hukum dan sebagainya. Undang-undang informasi dan teknologi dirasa belum cukup saat ini.

- h) Variabel 2a (Kurang nya pengetahuan teknologi dari penyedia jasa)

Adanya sikap kooperatif dari penyedia jasa mutlak diperlukan dalam penerapan sistem ini, diantaranya dengan meng-upgrade SDM dari penyedia jasa. Dimana saat ini kemampuan penyedia jasa masih dirasa kurang.

- i) Variabel 2b (Kurang mendukung nya fasilitas pada penyedia jasa)

Tersedianya perangkat pendukung implementasi konsep *e-procurement* baik yang bersifat eksternal sangat multak demi lancarnya sistem ini.

- j) Variabel 2c (Ketakutan akan teknologi *e-Procurement* yang dirasa sulit)

Penyedia jasa kurang memahami sistem *e-Procurement* merupakan kendala yang sangat signifikan. Karena itu sosialisasi sistem *e-Procurement* harus tetap berkesinambungan dan menyediakan layanan *help desk*.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa tahapan penelitian, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menginterpretasi data, menganalisis data dan memvalidasi hasil penelitian, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

Pertama, pada prinsipnya penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Keppres nomor 80 Tahun 2003. Dalam pelaksanaannya baru pada sebatas semi *e-Procurement*, dimana tahapan lelang mulai dari pengumuman lelang, dokumen lelang, *aanwijdzing*, hingga pengumuman lelang telah dapat di akses melalui portal. Namun disisi lain, *aanwijdzing* juga dilaksanakan secara manual jika paket pekerjaan cukup rumit, kemudian penyedia jasa juga diharuskan menyerahkan *hardcopy* dari penawaran karena belum adanya payung hukum yang mengatur mengenai keabsahan tanda tangan dan materai dalam sistem *e-Procurement*.

Kedua, manfaat dari penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor adalah :

- a) Meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Bogor.
- b) Meningkatkan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha untuk mendapatkan kontrak dengan Pemerintah Kota Bogor.
- c) Adanya efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- d) Proses pengadaan barang/jasa secara *e-Procurement* juga terbukti dapat meningkatkan efisiensi.
- e) Masyarakat luas dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi.
- f) Diperoleh kendali yang lebih baik terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa. Melalui sarana-sarana pelaporan dan analisis yang mudah

dan efektif, dapat diperoleh peningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan laporan, dan menciptakan integrasi data yang utuh.

- g) Penghematan biaya, waktu, dan beban kerja tambahan yang normalnya berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis.
- h) Penyederhanaan keseluruhan proses, dimana sistem *e-Procurement* membuat proses pemilihan penyedia barang/jasa lebih cepat bila dibanding secara konvensional

Ketiga, faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor adalah :

- a) Perlu adanya training untuk menerapkan sistem *e-Procurement*.
- b) Budaya organisasi pengguna jasa yang tidak mendukung
- c) Infrastruktur pendukung *e-Procurement* kurang memadai
- d) Kurangnya kemampuan personil dalam pelaksanaan *e-Procurement*
- e) Kurangnya perangkat teknologi/software yang memadai
- f) Kurangnya pengintegrasian hubungan dengan penyedia jasa
- g) Payung hukum *e-Procurement* saat ini dirasa belum cukup memadai
- h) Kurangnya pengetahuan teknologi dari penyedia jasa
- i) Kurang mendukungnya fasilitas pada penyedia jasa
- j) Ketakutan akan teknologi *e-Procurement* yang dirasa sulit

6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut antara lain adalah :

- a) Melakukan penelitian lanjutan yang lebih jauh, baik dari sisi penyedia jasa , panitia lelang dan pengguna jasa tentang analisis penerapan *e-Procurement* pada instansi Pemda lain.
- b) Melakukan penelitian lanjutan dengan lingkup penelitian yang lebih luas, misalnya analisis terhadap rekomendasi tindakan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor.

- a) Melakukan penelitian lanjutan mengenai Langkah-langkah apa yang perlu diterapkan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-Procurement*).



DAFTAR REFERENSI

Angeles, Rebecca & Nath,Ravinder). (2005). *Critical Success Factors for the Implementation of Business To Business Electronic Procurement*. (Volume 5 Issue 1.

Cagno, Enrico & Di Giulio, Augusto & Trucco, Paolo. (2004) *State-Of-Art And Development Prospects Of E-Procurement In The Italian Engineering & Contractor Sector*, 35, 1; ABI/INFORM Global pg. 24. *Project Management Journal*.

Dooley, Ken & Purchase, Sharon purchase. (2006). *Factors influencing e-procurement usage* (vol. 6, edisi 1/2; pg. 28, 18 pgs) *Journal of public procurement*.

G Ash, Colin , & M Burn, Janice . (2006). *Evaluating Benefits of e-Procurement in a B2B Marketplace: A case study of Quadrem*. (Vol. 8, Edisi 2; pg. 5, 19 pgs). *Journal of Information Technology Case and Application Research*.

Hawking, Paul & Stein, Andrew & C Wyld, David & Foster, Susan. (2004) *E-Procurement: Is the Ugly Duckling Actually a Swan Down Under?* (Patrington Vol. 16, Edisi 1; pg. 3, 24 pgs). *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*.

Knudsen, Daniel. (2003) . *Aligning corporate strategy and e-procurement tools*, 33, 8; ABI/INFORM Global pg. 720. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*.

Moon, M jae. (2005). *e-Procurement management in state governments: diffusion of e-procurement practices and its determinants* (vol. 5, edisi 1; pg. 54, 19 pgs) *journal of public procurement*.

Universitas Indonesia

Roche, Jeremy. (2001). *Are you ready for e-procurement?* (Montvale: Jul 2001. Vol. 83, Edisi 1; pg. 56, 4 pgs). Strategic Finance.

Vaidya, Kishor & A S M Sajeev & Guy Callender. (2006). *Critical Factors That Influence E-Procurement Implementation Success In The Public Sector* ,(Boca Raton Vol. 6, Edisi 1/2; pg. 70, 30 pgs). Journal of Public Procurement.

Maharani Fitria, Andriani. (2006). *Manfaat penerapan electronic procurement rekayasa online (EPRO) pada pelaksanaan proyek konstruksi (studi kasus PT: X)*. Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Gokmauli, Florence. (2008). *Kajian kelayakan pelaksanaan sistem lelang elektronik (e-procurement) pada instansi pemerintah ditinjau dari prasyarat pelaksanaan*. Skripsi. Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Setiadi, Darna. (2009). *Implementasi e-Procurement Untuk Meningkatkan Kinerja Operasional PT Garuda Indonesia*. Paper. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

Nasir, M. (1983). *Metode Penelitian*, Jakarta

G. Patriastomo, Ikak. (2008). *Dimulai e-Procurement*. Forum Pengadaan BAPPENAS. Jakarta

Loetan, Syahrial. (2008). *Kebijakan e-Proc Nasional*. Forum Pengadaan BAPPENAS. Jakarta

Mencegah Korupsi melalui e-Procurement, (2007). Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta .

Universitas Indonesia

Laporan Tahunan e-Procurement. (2007). Bagian Pengendalian Program

Chen, Tandiono. Sulaiman, Idris. (2005). *Catatan Khusus Bagi Implementasi E-Procurement di Indoensia.* Tahun IV Nomor 3 - Juli - September

Dwi Nuryanto, Hemat. (2008). *Optimalisasi Penerapan e-Procurement,* Kompas, Jawa Barat. 21 Agustus 2008

Dwi Nuryanto, Hemat. (2009). *Pentingnya Audit dan Standardisasi e-Procurement.* Pikiran Rakyat. 5 Maret 2009

Dummy, (2009). *Seminar E-Auction (E-Procurement) Indonesia .*

Suprayoga, Joko. (2009). *Saatnya Menerapkan E-procurement.* 10 Februari 2009

Mulayanto, Bagya. (2008). *Analisis implementasi e-procurement pada badan usaha milik negara, studi kasus pada pt (persero) pupuk sriwijaya, pt (persero) industri gelas dan pt (persero) angkasa pura II.* Tesis. Magister Bisnis. Institut Pertanian Bogor

Effendi, Muh Arief. (2005). Implementasi GCG Melalui e-Procurement.

<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=127704>

Fal-tSe. (2009). Penerapan E-Procurement untuk Percepatan Penyerapan Anggaran.

<http://sukasayurasem.wordpress.com/2009/03/31/penerapan-e-procurement-untuk-percepatan-penyerapan-anggaran/>

Universitas Indonesia

Meilyta, (2009). Peran E-Procurement Dalam Meningkatkan Profit dan Mengurangi Biaya

<http://meilytathu.blogspot.com/2009/04/peran-e-procurement-dalam-meningkatkan.html>

Rahardjo, Budi. (2005). *e-Procurement Security*. Institut Teknologi Bandung

<http://budi.paume.itb.ac.id/articles/e-procurement-security.doc>

Satyawira, Reagan. *Meningkatkan Profitabilitas dan Cost saving ???e-procurement.*

<http://reagansatyawira.blogspot.com/2008/12/e-procurement-meningkatkan.html>

Simamora Martin. *Kesenjangan Digital Jadi Penghalang Serius Implementasi e-Procurement.*

[http://v3.wartaegov.com/index.php?id=97&tx_ttnews\[tt_news\]=127&tx_ttnews\[backPid\]=99&cHash=881b7bd8e3](http://v3.wartaegov.com/index.php?id=97&tx_ttnews[tt_news]=127&tx_ttnews[backPid]=99&cHash=881b7bd8e3)

Wahid, Fathul. *e-Procurement Atasi Korupsi dalam Pengadaan Barang-Jasa di Sektor Publik Indonesia.*

<http://fit.uui.ac.id/index.php/Berita-Informatika/Fathul-Wahid-e-Procurement-Atasi-Korupsi-dalam-Pengadaan-Barang-Jasa-di-Sektor-Publik-Indonesia.html>

Wicaksono, Divera. *Potensi (Masalah) E-Procurement*

http://www.denpasarkota.go.id/main.php?act=i_opi&xid=66

Yudiatna, Heldi. (2008). E-proc (e-procurement) Kota Bogor untuk tahun 2008 ditunda,

<http://heldi.net/2008/05/e-proc-e-procurement-kota-bogor-untuk-tahun-2008-ditunda/>

E-procurement Pada Perusahaan PT. Garuda Indonesia

www.garuda-indonesia.com

E-Procurement sebagai media bertransaksi.

http://www.inaplas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2617%3Ae-procurement-sebagai-media-bertransaksi&catid=17%3Aoperation&Itemid=21&lang=en

E-Procurement: Teknologi Bebas KKN, 2009. Wartaegov

http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=420&catid=39:teknologiegov&Itemid=63

E-Procurement. (2009)

<http://ebisnis.wordpress.com/materi/e-procurement/>

Jurus-jurus PU Menjalankan e-Procurement. (2008). Wartaegov. Jakarta

http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=878:jurus-jurus-pu-menjalankan-e-procurement&catid=40:praktikegov

Ketimpangan Infrastruktur TI Di Daerah Hambat E-Proc. (2009). Bappenas

<http://bappenas.go.id>

Tujuan dan Manfaat E-Procurement

<http://eprocdenpasarkota.wordpress.com/tujuan-dan-manfaat-e-procurement/>

Lampiran 1
Kuisisioner penelitian skripsi

Kepada Yth :

Bapak/Ibu

Pengguna Jasa/ Panitia Lelang/ Tim *e-Procurement*

Di Tempat

Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan untuk penyusunan skripsi dengan judul “**Analisa Penerapan e-Procurement Pada Pemerintah Daerah Tingkat II (Studi Kasus Pada Pemkot Bogor)**”, dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.

Atas perhatian dan peran serta Bapak/Ibu dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Anik Pujiati
NPM . 0706 1979 12

(lanjutan)



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA PENERAPAN E-PROCUREMENT PADA PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT II (STUDI KASUS PADAPEMKOT BOGOR)**

KUISIONER PENELITIAN

ANIK PUJIATI

0706 1979 12

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
DEPOK
NOVEMBER 2009**

(lanjutan)

ANALISA PENERAPAN E-PROCUREMENT PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II (STUDI KASUS PADA PEMKOT BOGOR)

Pendahuluan

Sebagaimana dimaklumi, untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah diperlukan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yang baik dan handal. Untuk itu, maka perlu diperkenalkan sistem pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement*. Dengan mengimplementasikan sistem ini, maka dapat dimungkinkan adanya efisiensi sekurang-kurangnya 30% dalam belanja (Loetan, 2008).

Pada prinsipnya *e-Procurement* merupakan sistem pengadaan atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Sistem tersebut selain mengefisienkan proses pengadaan barang dan jasa juga merupakan cara yang efektif dan transparan serta bisa memangkas biaya secara signifikan, dibandingkan dengan sistem lama. Hal itu sesuai dengan pernyataan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dimana 70 persen dari total kasus yang ditanganinya berasal dari korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa (Nuryanto, 2008). Pada prinsipnya embrio sistem *e-Procurement* adalah Keppres No 80 Tahun 2003. Keppres tersebut menggariskan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN dan APBD dengan menggunakan teknologi informasi, terbuka, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif. Prosedur *e-Procurement* yang belum termuat dalam Keppres diatas kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006.

Berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, proses pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, dan mulai menggunakan *e-Procurement*.

Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Memberikan gambaran pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-Procurement*).
- b) Dapat diidentifikasi dan analisis potensi manfaat apa saja yang diperoleh dari implementasi *e - Procurement*.
- c) Diketahui analisis faktor-faktor yang menghambat dan dapat menyebabkan kegagalan dari implementasi *e - Procurement*.

(lanjutan)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, dimana proses pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penyebaran kuisisioner dan wawancara langsung dengan responden. Sedangkan prosedur yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah analisis statistik deskriptif dengan metode distribusi frekuensi dan metode analisis statistik yang meliputi uji validitas dan reabilitas dengan corrected item total correlation test dan analisis komparatif dengan kruskal wallis Test. Adapun hasil penelitian yang diharapkan adalah mengetahui faktor-faktor penentu yang sesuai dengan tujuan penelitian

Tujuan kuisisioner

Kuisisioner ini bertujuan mengetahui variabel terkait dengan penelitian yang berjudul “**Analisa Penerapan e-Procurement Pada Pemerintah Daerah Tingkat II (Studi Kasus Pada Pemkot Bogor)**”. Adapun variabel yang menjadi pertanyaan adalah variabel yang akan digunakan untuk menjawab penelitian seperti dibawah ini :

Informasi

Bila bapak/ibu mempunyai pertanyaan atau memerlukan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi :

- Peneliti : Anik Pujiati
Telp : 0813 1923 8517
- Pembimbing : Ir. Setyo Supriyadi, M.Si
Telp : 0818 705 726
- Pembimbing : Ayomi Dita R, ST,MT
Telp : 0812 8120 721

**SEMUA INFORMASI YANG ANDA BERIKAN DALAM KUISISIONER INI DIJAMIN
KERAHASIANNYA DAN HANYA DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN
SKRIPSI**

(lanjutan)

DATA NARASUMBER

Mohon dilengkapi data narasumber pada isian dibawah ini untuk memudahkan kami menghubungi kembali bila klarifikasi data diperlukan.

No	Uraian	Keterangan
1	Nama	
2	Nama instansi	
3	Jabatan	
4	Alamat	
5	Telephon	
6	Pendidikan terakhir	
7	Pengalaman dalam bidang jasa konstruksi	<input type="checkbox"/> 0-5 Tahun <input type="checkbox"/> 5-10 Tahun <input type="checkbox"/> >10 Tahun

PETUNJUK PENGISIAN

Silahkan berikan persetujuan maupun pendapat yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian dalam kuisisioner ini yang menurut Bapak/Ibu bisa menjawab pertanyaan yang digunakan pada penelitian ini .

Catatan :

.....

.....

.....

(lanjutan)

DATA RESPONDEN

Mohon dilengkapi data responden pada isian dibawah ini untuk memudahkan kami menghubungi kembali bila klarifikasi data diperlukan.

No	Uraian	Keterangan
1	Nama	
2	Nama instansi	
3	Jabatan	
4	Alamat	
5	Telephon	
6	Pendidikan terakhir	
7	Pengalaman dalam bidang jasa konstruksi	<input type="checkbox"/> 0-5 Tahun <input type="checkbox"/> 5-10 Tahun <input type="checkbox"/> >10 Tahun

Berikut ini beberapa pertanyaan mengenai hambatan yang terdapat dalam sistem *e-Procurement* secara umum. Jawaban dari kuisisioner ini akan mengidentifikasi hambatan dalam penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor. Saudara diminta untuk menchecklist kolom STS,TS,RR,S,SS untuk mempresentasikan jawaban saudara :

1. STS adalah sangat tidak setuju, yaitu apabila saudara sangat tidak setuju dengan pernyataan dibawah ini
2. TS adalah tidak setuju, yaitu apabila saudara tidak setuju dengan pernyataan dibawah ini
3. RR adalah ragu-ragu, yaitu apabila saudara ragu-ragu dengan pernyataan dibawah ini
4. S adalah setuju, yaitu apabila saudara setuju dengan pernyataan dibawah ini
5. SS adalah sangat setuju, yaitu apabila saudara sangat setuju dengan pernyataan dibawah ini

(lanjutan)

NO	Indikator Hambatan	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
1.a	Faktor internal	Perlu adanya training untuk menerapkan sistem <i>e-Procurement</i> .					
1.b		Budaya organisasi pengguna jasa yang tidak mendukung					
1.c		Tidak cukupnya solusi <i>e-Procurement</i> ketika adanya masalah dalam pelaksanaannya					
1.d		Kurangnya dukungan manajemen dari organisasi yang lebih tinggi.					
1.e		Implementasi harga yang tidak sesuai					
1.f		Infrastruktur pendukung <i>e-Procurement</i> kurang memadai					
1.g		Kurangnya kemampuan personil dalam pelaksanaan <i>e-Procurement</i>					
1.h		Kurangnya perangkat teknologi/software yang memadai					
1.i		Kurangnya pengintegrasian hubungan dengan penyedia jasa					
1.j		Keamanan sistem <i>e-Procurement</i> yang dirasa kurang					
1.k		Adanya intervensi " <i>political will</i> " dari pimpinan dalam penentuan pemenang lelang					
1.l		Payung hukum <i>e-Procurement</i> saat ini dirasa belum cukup memadai					
1.m						
1.n						
1.o						

NO	Indikator Hambatan	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
2.a	Faktor eksternal	Kurangnya pengetahuan teknologi dari penyedia jasa					
2.b		Kurang mendukungnya fasilitas pada penyedia jasa					
2.c		Ketakutan akan teknologi <i>e-Procurement</i> yang dirasa sulit					
2.d		Biaya partisipasi dalam proses <i>e-Procurement</i> yang tinggi					
2.e		Rasa takut jika kompetitor melihat tawaran mereka					
2.f		Ketidakpercayaan atas sistem <i>e-Procurement</i>					
2.g						
2.h						
2.i						

Bagian III

Rekomendasi tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut diatas ?

.....

Bogor, Desember 2009

.....

TTD responden

**TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN WAKTU ANDA UNTUK MENGISI
KUESIONER PENELITIAN INI**

Lampiran 2

Kuisioner validasi hasil penelitian

Kepada Yth :
Bapak/Ibu
Pakar Konstruksi
Di Tempat

Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan untuk penyusunan skripsi dengan judul “**Analisa Penerapan e-Procurement Pada Pemerintah Daerah Tingkat II (Studi Kasus Pada Pemkot Bogor)**”, dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk memvalidasi variabel penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.

Atas perhatian dan peran serta Bapak/Ibu dalam memvalidasi penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Anik Pujiati
NPM 0706 1979 12

(lanjutan)



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISA PENERAPAN E-PROCUREMENT PADA PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT II (STUDI KASUS PADAPEMKOT BOGOR)

KUISIONER VALIDASI VARIABEL PENELITIAN

ANIK PUJIATI

0706 1979 12

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
DEPOK
DESEMBER 2009

(lanjutan)

ANALISA PENERAPAN E-PROCUREMENT PADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II (STUDI KASUS PADA PEMKOT BOGOR)

Pendahuluan

Sebagaimana dimaklumi, untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah diperlukan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yang baik dan handal. Untuk itu, maka perlu diperkenalkan sistem pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement*. Dengan mengimplementasikan sistem ini, maka dapat dimungkinkan adanya efisiensi sekurang-kurangnya 30% dalam belanja (Loetan, 2008).

Pada prinsipnya *e-Procurement* merupakan sistem pengadaan atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Sistem tersebut selain mengefisienkan proses pengadaan barang dan jasa juga merupakan cara yang efektif dan transparan serta bisa memangkas biaya secara signifikan, dibandingkan dengan sistem lama. Hal itu sesuai dengan pernyataan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dimana 70 persen dari total kasus yang ditanganinya berasal dari korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa (Nuryanto, 2008). Pada prinsipnya embrio sistem *e-Procurement* adalah Keppres No 80 Tahun 2003. Keppres tersebut menggariskan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN dan APBD dengan menggunakan teknologi informasi, terbuka, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif. Prosedur *e-Procurement* yang belum termuat dalam Keppres diatas kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006.

Berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, proses pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, dan mulai menggunakan *e-Procurement*.

Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Memberikan gambaran pelaksanaan lelang secara elektronik (*e-Procurement*).
- b) Dapat diidentifikasi dan analisis potensi manfaat apa saja yang diperoleh dari implementasi *e - Procurement*.
- c) Diketahui analisis faktor-faktor yang menghambat dan dapat menyebabkan kegagalan dari implementasi *e - Procurement*.

(lanjutan)

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, dimana proses pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penyebaran kuisisioner dan wawancara langsung dengan responden. Sedangkan prosedur yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah analisis statistik deskriptif dengan metode distribusi frekuensi dan metode analisis statistik yang meliputi uji validitas dan reabilitas, analisis komparatif. Adapun hasil penelitian yang diharapkan adalah mengetahui faktor-faktor penentu yang sesuai dengan tujuan penelitian

Tujuan kuisisioner

Kuisisioner ini bertujuan memvalidasi variabel terkait dengan penelitian yang berjudul **“Analisa Penerapan e-Procurement Pada Pemerintah Daerah Tingkat II (Studi Kasus Pada Pemkot Bogor)”**. Adapun variabel yang divalidasi adalah variabel yang akan digunakan untuk menjawab penelitian seperti dibawah ini :

Informasi

Bila bapak/ibu mempunyai pertanyaan atau memerlukan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi :

- Peneliti : Anik Pujiati
Telp : 0813 1923 8517
- Pembimbing : Ir. Setyo Supriyadi, M.Si
Telp : 0818 705 726
- Pembimbing : Ayomi Dita R, ST,MT
Telp : 0812 8120 721

**SEMUA INFORMASI YANG ANDA BERIKAN DALAM KUISISIONER INI DIJAMIN
KERAHASIANNYA DAN HANYA DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN
SKRIPSI**

(lanjutan)

DATA PAKAR

Mohon dilengkapi data pakar pada isian dibawah ini untuk memudahkan kami menghubungi kembali bila klarifikasi data diperlukan.

No	Uraian	Keterangan
1	Nama pakar	
2	Nama perusahaan/instansi	
3	Jabatan	
4	Alamat	
5	Telephon	
6	Pendidikan terakhir	
7	Pengalaman dalam bidang jasa konstruksi	<input type="checkbox"/> 10-15 Tahun <input type="checkbox"/> 15-20 Tahun <input type="checkbox"/> >20 Tahun

PETUNJUK PENGISIAN

Silahkan berikan persetujuan maupun pendapat yang berkaitan dengan variabel penelitian dalam kuisisioner ini yang menurut Bapak/Ibu valid untuk digunakan pada penelitian ini .

Catatan :

.....

.....

.....

(lanjutan)

Tabel 1. Validasi Variabel Penelitian Pertanyaan Penelitian

Hambatan dari penerapan sistem <i>e-Procurement</i> pada Pemda Dati II						
No	Variabel penelitian	Indikator	Sub indikator	Penilaian		Keterangan
				ya	tidak	
1	Hambatan	Faktor internal	Perlu adanya training untuk menerapkan sistem <i>e-Procurement</i> .			
			budaya organisasi pengguna jasa yang tidak mendukung			
			Infrastruktur pendukung <i>e-Procurement</i> kurang memadai			
			Kurangnya kemampuan personil dalam pelaksanaan <i>e-Procurement</i>			
			Kurangnya perangkat teknologi/software yang memadai			
			Kurangnya pengintegrasian hubungan dengan penyedia jasa			
			Payung hukum <i>e-Procurement</i> saat ini dirasa belum cukup memadai			
2	Hambatan	Faktor Eksternal	Kurangnya pengetahuan teknologi dari penyedia jasa			
			Kurang mendukungnya fasilitas pada penyedia jasa			
			Ketakutan akan teknologi <i>e-Procurement</i> yang dirasa sulit			

Jakarta, Desember 2009

.....

TTD pakar

**TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN WAKTU ANDA UNTUK MEMVALIDASI
VARIABEL PENELITIAN INI**

Lampiran 3
Risalah Skripsi Sarjana

RISALAH SKRIPSI SARJANA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Nama : ANIK PUJIATI
NPM : 0706197912
Judul Skripsi : ANALISA PENERAPAN *e-PROCUREMENT* PADA PEMERINTAH
DAERAH TK. II (STUDI KASUS PADA PEMKOT BOGOR)

Dosen Pembimbing : Ir.Setyo Supriyadi, M.Si

No	Pertanyaan atau Saran	Keterangan
1.	9 tujuan dari penerapan <i>e-Procurement</i> yang terdapat dalam Bab 2 agar diintegrasikan dengan pembahasan pada Bab 5.	Sudah diperbaiki, dapat dilihat pada Bab 5 halaman 90-92.

Dosen Pembimbing : Ayomi Dita Rarasati, ST,MT

No	Pertanyaan atau Saran	Keterangan
1.	Sesuaikan seluruh penulisan skripsi dengan Pedoman TA UI berdasar SK Rektor Tahun 2008.	Sudah diperbaiki sesuai dengan pedoman penulisan terbaru.
2.	Bagaimana mendapatkan manfaat <i>e-Procurement</i> (Hal 91-93)	Sudah diperbaiki, dapat dilihat pada Bab 3 halaman 54-55, bahwa berkaitan dengan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data primer untuk menjawab tujuan penelitian pertama dan kedua yang berupa kata-kata, tindakan, data tertulis dan gambar yang

(Lanjutan)

Dosen Pembimbing : Ayomi Dita Rarasati, ST,MT

No	Pertanyaan atau Saran	Keterangan
		diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan partisipan dan bahan-bahan tertulis. Pengumpulan data sekunder, caranya melalui pencarian bahan-bahan pendukung seperti referensi, foto, data statistik, kebijakan dan aturan tertulis lembaga.
3.	Seluruh format untuk mendapatkan hasil penelitian agar dimasukkan dalam penulisan	Sudah diperbaiki, dapat dilihat pada Bab 3 halaman 56 tabel 3.2 dan tabel 3.3 lampiran 1 dan 2.

Dosen Penguji : M. Ali Berawi, M.Eng. Sc, Phd

No	Pertanyaan atau Saran	Keterangan
1.	Pertajam pembahasan pada Bab 4	Sudah diperbaiki, dapat dilihat pada Bab 4
2.	Kesimpulan diperbaiki	Sudah diperbaiki, dapat dilihat pada Bab 6.
3.	Gambarkan RQ 1 pada kesimpulan	Sudah diperbaiki, dapat dilihat pada Bab 6 halaman 96.

Dosen Penguji : Alin Veronika, ST, MT

No	Pertanyaan atau Saran	Keterangan
1.	Perbaiki redaksi pada abstrak	Sudah diperbaiki, dapat dilihat pada hal vi – vii.
2.	Jelaskan alasan kenapa Pemkot Bogor dijadikan sebagai studi kasus	Sudah dijelaskan pada Bab 1 Hal 3, dengan alasan bahwa dalam lingkup Provinsi Jawa Barat Pemkot Bogor merupakan pelopor dalam penerapan <i>e-Procurement</i> . Selain itu penerapan <i>e-</i>

Dosen Penguji : Alin Veronika, ST, MT

No	Pertanyaan atau Saran	Keterangan
		<p><i>Procurement</i> pada Pemerintah Kota Bogor juga mendapat apresiasi yang sangat baik, hal ini terbukti dengan diraihnya juara 3 (tiga) dalam kompetisi <i>e-Government</i> dalam tingkat nasional (Wartaegov, 2009).</p>
3.	<p>Apakah ada lembaga lain yang sudah menerapkan <i>e-Procurement</i> secara semi/full <i>e-Procurement</i>.</p>	<p>Sudah dijelaskan pada Bab 2 Hal 33, bahwa dalam lingkup nasional instansi yang telah menerapkan sistem <i>e-Procurement</i> adalah Bappenas dan dapat dilihat pada web http://pengadaannasionalbappenas.go.id. Sedangkan untuk daerah Tk II, Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan system ini sejak tahun 2004. Sedangkan untuk diluar pemerintahan sudah ada beberapa perusahaan yang menerapkan <i>e-Procurement</i> seperti Garuda Indonesia, PT. Indonesia Power.</p>
4.	<p>Bagaimana proses mendapatkan RQ1.</p>	<p>pengumpulan data primer untuk menjawab tujuan penelitian pertama dan kedua yang berupa kata-kata, tindakan, data tertulis dan gambar yang diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan partisipan dan bahan-bahan tertulis. Pengumpulan data sekunder, caranya melalui pencarian bahan-bahan pendukung seperti referensi, foto, data statistik, kebijakan</p>

Dosen Penguji : Alin Veronika, ST, MT

No	Pertanyaan atau Saran	Keterangan
		dan aturan tertulis lembaga.
5.	Bagaimana populasi yang mengerti <i>e-Procurement</i> .	Sudah dijelaskan pada Bab 4 Hal 73-74, Dari data, di Pemerintah Kota Bogor sumber daya manusia yang telah lulus ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa sebanyak 117 orang, namun dari jumlah tersebut yang aktif sebagai peserta lelang sebanyak ± 25 orang. Sedangkan Tim <i>e-Procurement</i> terdiri dari 7 orang. Sehingga total populasi dari penelitian ini sebanyak 32 orang.

Depok, 13 Januari 2010
Menyetujui

Pembimbing 1



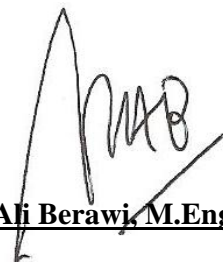
Ir. Setyo Supriyadi, M.Si

Pembimbing 2



Ayomi Dita Rarasati, ST, MT

Penguji 1



M. Ali Berawj, M.Eng. Sc, Phd

Penguji 2



Alin Veronika, ST, MT

Lampiran 4

Transkrip wawancara terhadap narasumber

Bagian I : Data Umum Narasumber

1. Nama Instansi : Pemerintah Kota Bogor
2. Alamat : Jl.Ir. H.Juanda No.10 Bogor
3. Jabatan : Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan
4. Bagian/Divisi : Bagian Pengendalian Program Setdakot Bogor

Bagian II : Penerapan e-Procurement

1. Penulis (P) : Sejak tahun berapakah *e-Procurement* mulai diterapkan pada Pemerintah Kota Bogor?

Narasumber (N) : Pada awal tahun 2007 Pemerintah Kota Bogor bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya sudah mulai menerapkan *e-Procurement*. Namun terkait berbagai hambatan, pada tahun anggaran 2008 pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kota Bogor kembali dilakukan secara konvensional. Dan selama tahun 2008 Pemerintah Kota Bogor terus melakukan peningkatan sistem dan sosialisasi terhadap pengguna jasa dan penyedia jasa, sehingga pada tahun anggaran 2009 lelang elektronik kembali diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pelelangan dengan sistem *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor dapat diakses melalui portal yang beralamat di www.eprocotabogor.go.id.

2. (P) : Apakah latar belakang, serta maksud dan tujuan penerapan *e-Procurement* pada Pemerintah Kota Bogor?

(N) : Pemerintah Kota Bogor berupaya melakukan terobosan-terobosan inovatif dalam pengelolaan anggaran dengan harapan dapat mewujudkan percepatan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan *e-Procurement* pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang merupakan salah satu kunci dari efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBD. Pilihan strategis ini diambil karena metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara konvensional dianggap kurang efektif, jadwal penyelesaian proyek tidak akurat, dan belum terakomodirnya

tuntutan masyarakat terhadap transparansi pelaksanaan pembangunan.

3. (P) : Apakah sasaran dari penerapan *e-Procurement* ini?
 (N) : Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis web di Kota Bogor yang dimulai pada Tahun 2007 yang bertujuan untuk mewujudkan *Clean Governance* di era reformasi dan merupakan rencana Pembangunan Daerah khususnya Pemerintah Kota Bogor untuk mengutamakan transparansi serta keterbukaan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
4. (P) : Apakah landasan hukum yang digunakan dalam penerapan *e-Procurement*?
 (N) : Landasan Hukum yang melandasi Pelaksanaan Pelelangan dengan melalui sistem *e – Procurement* di Pemerintahan Kota Bogor, adalah :
- a) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006
 - b) Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
 - c) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*
 - d) Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Dengan Sistem *e-Procurement*
5. (P) : Bagaimana kondisi sistem *e-Procurement* saat ini? Dalam jangka waktu berapa lama *e-Procurement* diupdate? bagaimana prosesnya?
 (N) : Saat ini penerapan *e-Procurement* pada Pemkot Bogor masih dalam tahap semi *e-Procurement*. Hal ini karena belum ada payung hukum yang mengatur tanda tangan basah dan materai, sehingga penyedia jasa masih harus menyerahkan hard copy dari dokumen penawaran. Saat ini sistem masih terus diupgrade secara bertahap untuk menuju konsep full procurement.

6. (P) : Bagaimana konsep dari layanan *e-Procurement*?
- (N) : Sistem *e-Procurement* Kota Bogor dibangun untuk mewujudkan akuntabilitas publik dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi.
7. (P) : Bagaimana kesiapan dari SMD dan sarana infrastruktur penunjang *e-Procurement*?
- (N) : Untuk menjalankan sistem *e-Procurement* dan pemeliharaan serta pengembangannya dilakukan oleh Sekretariat *e-Procurement* yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bogor di bawah Bagian Pengendalian Program. Jumlah tim adalah 15 orang, termasuk tenaga pendamping. Sedangkan panitia lelang yang telah lulus sertifikasi pengadaan pada Pemkot Bogor sebanyak 48 orang. Infrastruktur penunjang yang ada antara lain:
- a) Penyiapan server khusus untuk administrator *e-Procurement*. Berbagai fasilitas keamanan diletakkan pada perangkat utama server ini, termasuk *access control* ke server utama. Orang yang tidak mempunyai kewenangan tidak mendapatkan akses masuk ke ruangan-ruangan tertentu;
 - b) Jaringan komputer (*Local Area Network*) antar unit di lingkup Instansi Pemerintah Kota Bogor untuk menunjang kinerja Panitia Pengadaan dari masing-masing Satuan Kerja;
 - c) Menyiapkan *back-up server* data yang selalu identik dengan server induk di Pemerintah Kota Bogor (*Co-Location*) dan diletakkan di Diginet (*Digital Internet Exchange*) Jakarta sehingga terjamin keamanan dan kecepatan aksesnya.
8. (P) : Bagaimana proses pendidikan yang dilakukan dalam mengajarkan *e-Procurement* kepada pihak terkait (SKPD, Panitia lelang, Penyedia Jasa) ?
- (N) : Untuk mensosialisasikan sistem *e-Procurement*, Pemkot Bogor mengadakan pelatihan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan *e-Procurement* seperti pengguna jasa, panitia lelang dan penyedia jasa. Selain itu, disediakan juga help desk pada sekretariat layanan.

9. (P) : Apa saja yang menjadi parameter keefektifan penerapan *e-Procurement* dibanding sistem pengadaan konvensional?
- (N) : Sebenarnya tidak ada parameter tetap untuk menghitung keefektifan penerapan *e-Procurement* ini, namun hal ini bisa terlihat adanya efisiensi anggaran, waktu pelaksanaan lelang lebih cepat dan sanggahan lelang yang mulai berkurang.
10. (P) : Bagaimana tahapan proses *e-Procurement* secara umum?
- (N) : Pelaksanaan lelang melalui *e-Procurement* di Pemerintah Kota Bogor dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Pengendalian Program dengan membentuk Tim *e-Procurement*. Satuan Kerja secara mandiri menetapkan paket pekerjaan yang akan dilelang. Kemudian seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa diinput (*upload*) ke dalam portal dan dilaksanakan proses lelang secara *e-Procurement* dengan menggunakan fasilitas portal tersebut, dimana proses ini dilakukan oleh panitia lelang yang ditunjuk oleh Satuan Kerja. Paket pekerjaan yang akan dilelang diumumkan oleh Satuan-Satuan Kerja melalui portal tersebut.
11. (P) : Tahap-tahap apa yang terdapat dalam *e-Procurement*?
- (N) : Pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan lelang secara konvensional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada modul *e-Procurement*.
12. (P) : Apa saja manfaat penerapan *e-Procurement* ?
- (N) : Adanya efisiensi, transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa.

Lampiran 5

Tabulasi Kuisisioner Penelitian Skripsi

Tabel 1. Tabulasi Kuisisioner Penelitian Skripsi

1	1.a	1.b	1.c	1.d	1.e	1.f	1.g	1.h	1.i	1.j	1.k	1.l	2.a	2.b	2.c	2.d	2.e	2.f
R ₁	5.0	1.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	4.0	5.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0
R ₂	5.0	4.0	2.0	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0	1.0	3.0	2.0	4.0	4.0	4.0	1.0	1.0	2.0
R ₃	5.0	4.0	1.0	1.0	2.0	1.0	5.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	5.0	5.0	4.0	1.0	4.0	5.0
R ₄	4.0	5.0	5.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	1.0	4.0	5.0	5.0	5.0	2.0	2.0	2.0
R ₅	5.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
R ₆	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0	3.0
R ₇	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0
R ₈	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0
R ₉	5.0	4.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	5.0	4.0	2.0	1.0	2.0	3.0
R ₁₀	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.0	2.0	2.0	4.0
R ₁₁	5.0	4.0	2.0	1.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	4.0	2.0
R ₁₂	5.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0
R ₁₃	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0
R ₁₄	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	2.0	5.0	4.0	4.0	4.0	2.0	3.0	4.0
R ₁₅	5.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0

(lanjutan)

1	1.a	1.b	1.c	1.d	1.e	1.f	1.g	1.h	1.i	1.j	1.k	1.l	2.a	2.b	2.c	2.d	2.e	2.f
R ₁₆	5.0	4.0	3.0	2.0	2.0	4.0	5.0	2.0	4.0	1.0	2.0	5.0	5.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
R ₁₇	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	1.0	2.0
R ₁₈	5.0	5.0	2.0	1.0	2.0	5.0	5.0	4.0	4.0	1.0	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	2.0	3.0
R ₁₉	5.0	5.0	2.0	2.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	5.0	2.0	2.0	2.0
R ₂₀	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0	2.0	3.0	2.0
R ₂₁	5.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0
R ₂₂	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0	3.0
R ₂₃	5.0	4.0	1.0	1.0	2.0	1.0	5.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	5.0	5.0	4.0	1.0	1.0	2.0
R ₂₄	5.0	4.0	1.0	1.0	2.0	1.0	5.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	5.0	5.0	4.0	1.0	3.0	2.0
R ₂₅	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0	5.0	4.0	4.0	5.0	2.0	3.0	2.0
R ₂₆	5.0	4.0	2.0	1.0	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.0	2.0	4.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0	3.0
R ₂₇	4.0	4.0	2.0	2.0	1.0	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0	1.0	2.0
R ₂₈	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0
R ₂₉	4.0	4.0	2.0	2.0	3.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	1.0	1.0	2.0
R ₃₀	5.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	1.0	4.0	5.0

Keterangan :

1.0 Sangat Tidak Setuju

2.0 Tidak Setuju

3.0 Ragu-ragu

4.0 Setuju

5.0 Sangat Setuju

Lampiran 6

Output SPSS Uji Validitas, Reliabilitas dan Analisis Komparatif

Reability 1

Scale: ALL VARIABLES

ANOVA with Friedman's Test

	Sum of Squares	df	Mean Square	Friedman's Chi-Square	Sig
Between People	2117.388	359	5.898		
Within People					
Between Items	1891.513 ^a	1	1891.513	148.467	.000
Residual	2694.988	359	7.507		
Total	4586.500	360	12.740		
Total	6703.888	719	9.324		

Grand Mean = 4.8875

a. Kendall's coefficient of concordance W = .282.

Reliability Statistics

	Cronbach's Alpha	N of Items
Cronbach's Alpha ^a	-.273	2
Based on Standardized Items ^a	-.458	2

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	360	100.0
Excluded ^a	0	.0
Total	360	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
9.7750	11.796	3.43453	2

lanjutan)

Reability 2

ANOVA with Friedman's Test

	Sum of Squares	df	Mean Square	Friedman's Chi-Square	Sig
Between People	182.622	179	1.020		
Within People Between Items	11.378 ^a	1	11.378	3.220	.073
Residual	624.622	179	3.490		
Total	636.000	180	3.533		
Total	818.622	359	2.280		

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha ^a	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items ^a	N of Items
-2.420	-2.696	2

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

Grand Mean = 3.3222

a. Kendall's coefficient of concordance $W = .014$.

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
6.6444	2.040	1.42845	2

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	180	50.0
	Excluded ^a	180	50.0
	Total	360	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Hambatan Internal	6.5083	11.827	-.186	.035	a
Variabel Penelitian	3.2667	1.578	-.186	.035	a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Hambatan eksternal	3.5000	2.933	-.574	.330	a
Variabel Penelitian	3.1444	1.577	-.574	.330	a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.